LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LKIP)

TAHUN 2021

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA CILEGON

BPBD KOTA CILEGON

Jl. Teuku Cik Ditiro No.164
Kel. Sukmajaya Kec. Jombang
Kota Cilegon 42416

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT, yang telah melimpahkan karunia Nya sehingga penyusunan "***Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)*** Kota Cilegon Tahun 2021 Tahun Anggaran 2022 ini dapat diselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPBD Kota Cilegon ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara reviu atas Laporan Kinerja pada setiap masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah. LAKIP BPBD Kota Cilegon merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja BPBD dalam mencapai tujuan/sasaran strategis BPBD untuk mewujudkan VISI dan MISI BPBD. Melalui dokumen LKIP ini dapat memberikan gambaran pencapaian kinerja yang telah ditargetkan didalam Rencana Kerja BPBD tahun 2021.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, sehingga LKIP BPBD Kota Cilegon Tahun 2021 dapat tersusun tepat waktu. Tentunya dalam pelaksanaan kinerja pelayanan penanggulangan bencana selama Tahun 2021 masih banyak kekurangan, sehingga kami memerlukan kritik dan saran yang bermanfaat bagi peningkatan kinerja BPBD Kota Cilegon pada masa yang akan datang

Semoga Laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Cilegon, Januari 2022
Kepala Pelaksana BPBD Kota Cilegon

Drs. H. NIKMATULLAH, M.Si
NIP. 196307041984101011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	.....	i
DAFTAR ISI	.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	.....	1
A. Latar Belakang	.....	1
B. Tugas dan Fungsi BPBD Kota Cilegon	.....	3
C. Struktur Organisasi BPBD Kota Cilegon	.....	5
D. Sumber Daya Aparatur BPBD Kota Cilegon	.....	6
E. Sistematika Penulisan	.....	13
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	.....	16
A. Rencana Strategis	.....	16
B. Perjanjian Kinerja	.....	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	.....	21
A. Capaian Kinerja Organisasi	.....	23
B. Realisasi Anggaran	.....	36
BAB IV PENUTUP	.....	43
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maka setiap instansi pemerintah harus mampu mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam melaksanakan prioritas RPJMD Cilegon 2021-2026 yaitu penanganan kebencanaan.

Dalam Penanggulangan bencana, BPBD Kota Cilegon menjalankan peran sebagai koordinator dan menegaskan bahwa manajemen penanggulangan bencana bukanlah suatu kegiatan yang bersifat mendadak hanya tanggap darurat saja, akan tetapi meliputi berbagai aspek baik sebelum (pra bencana), pada saat bencana (Tanggap darurat) dan setelah terjadinya bencana (pasca bencana).

Adapun tujuan, sasaran dan capaian kinerja BPBD Kota Cilegon pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Realisasi Kinerja	Renstra
				2021	
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan Profesionalitas Aparatur	Nilai Lakip Perangkat Daerah	78,43	poin 79
			Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	38,93	poin 42
2	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Meningkatnya Ketangguhan Bencana	Persentase Masyarakat Di Wilayah rawan Bencana Yang Mendapatkan Informasi Kebencanaan	100%	100%
			Persentase Masyarakat di Wilayah Rawan Bencana yang Mendapatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	100%	100%

			Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%

sasaran yang tertuang dalam RENSTRA sama dengan yang tertuang di RPJMD Kota Cilegon Tahun 2021-2026 yaitu Meningkatnya Ketangguhan Bencana. Dengan demikian capaian sasaran pada Tahun 2021 sesuai target sehingga capaian sasaran ini dapat mendukung indikator tujuan yang tertuang di RPJMD Kota Cilegon yaitu menurunkan Indeks Risiko Bencana dengan poin 128,15 (Kelas Risiko Sedang) berdasarkan hasil penilaian mandiri (self assessment) dengan mengisi kuisioner Peringkat Penilaian Kapasitas Daerah (7 Fokus Prioritas dan 71 Indikator pencapaian) dari BNPB. Dari hasil kinerja sasaran diatas, semua sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis telah tercapai sesuai target. Hal ini disebabkan adanya faktor-faktor pendukung keberhasilan baik internal maupun eksternal.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi BPBD Kota Cilegon ke depan, agar perlu mendapat upaya maksimal dalam hal sebagai berikut:

1. Pelayanan masyarakat untuk mendapatkan informasi kebencanaan.
2. Pelayanan masyarakat terhadap pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, dan
3. Pelayanan masyarakat terhadap Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi BPBD Kota Cilegon dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa sebagai salah satu upaya meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita Pembangunan Daerah Kota Cilegon. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimite serta untuk memantapkan pelaksanaan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance* yang merupakan prasyarat bagi setiap penyelenggara pemerintahan.

Atas dasar hal tersebut di atas, untuk mempertangungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Setiap instansi pemerintah yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan negara, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, wajib memberikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan dokumen berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga.

Oleh sebab itu, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Adapun informasi yang diharapkan dari laporan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif

dan responsif terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Pelaksanaan penyusunan LAKIP Badan Penanggulangan Daerah Kota Cilegon Tahun 2021 dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan LAKIP, yaitu :

1. TAP MPR No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Permenpan RB No. 25 Tahun 2012 Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja;

11. Keputusan Walikota Cilegon No. 060/kep.639-Bappeda/2019 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelaporan kinerja secara *Real-Time* dan terintegrasi di Lingkungan Pemerintahan Kota Cilegon.

B. Tugas dan Fungsi BPBD Kota Cilegon

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon dan Peraturan Walikota Cilegon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penjabaran tugas dan fungsi Badan Penggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon. Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota, yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan, koordinasi, komando dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku. tugas dan fungsi BPBD sebagai berikut:

1. Tugas

a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD dan penerimaan lain yang sah; danmelaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon menyelenggarakan fungsi yaitu :

a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
b. pengordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi BPBD Kota Cilegon

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon sebagai berikut :

I. Kepala Badan;

II. Unsur Pengarah;

III. Unsur Pelaksana; terdiri dari :

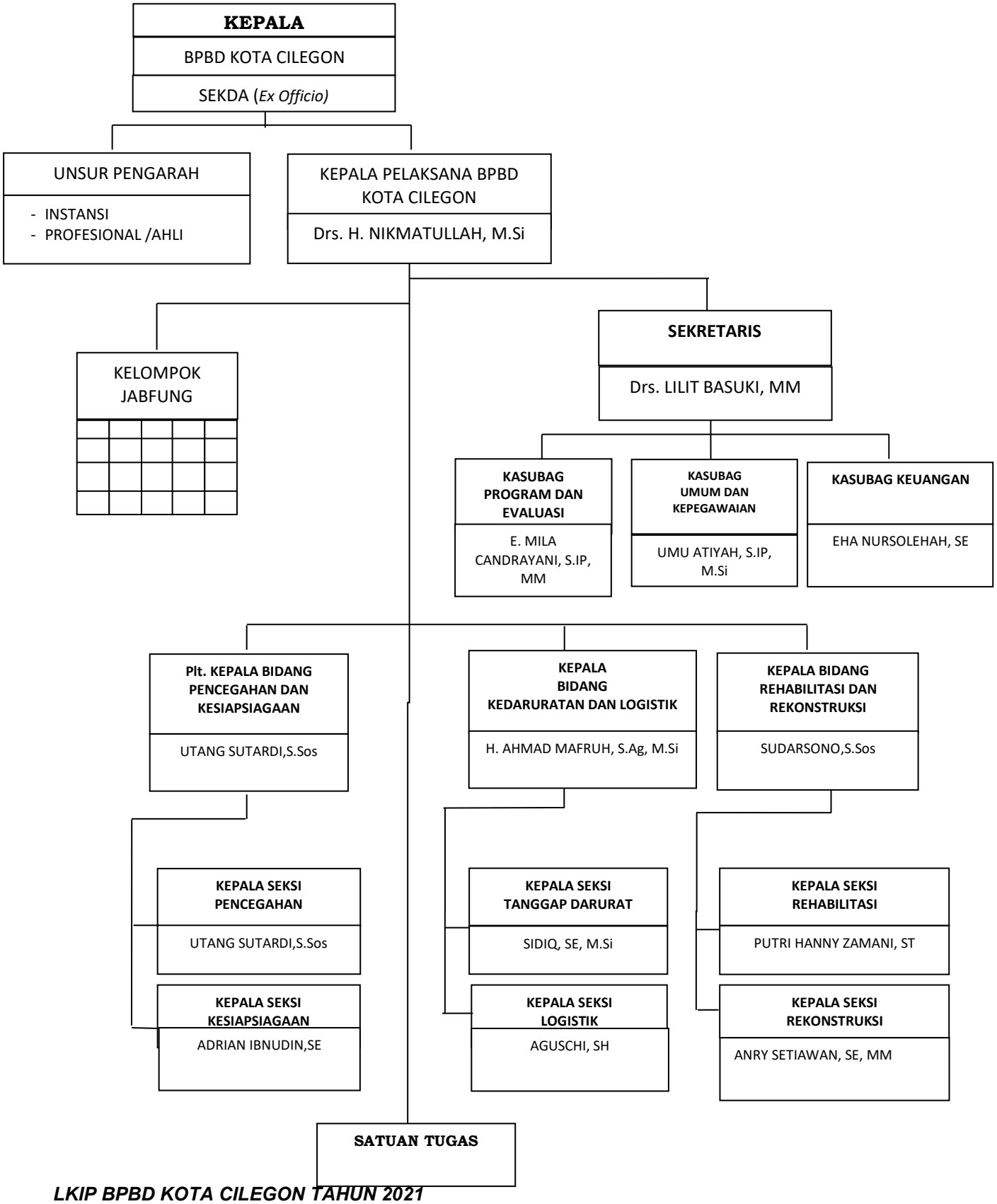
a. Kepala Pelaksana
b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Umum;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Program dan Evaluasi.
c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
    1. Seksi Pencegahan;
    2. Seksi Kesiapsiagaan
d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
    1. Seksi Tanggap Darurat; dan
    2. Seksi Logistik.
e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
    1. Seksi Rehabilitasi; dan
    2. Seksi Rekonstruksi.
f. Satuan Tugas
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sedangkan uraian tugas dan fungsi Kepala BPBD dan unsur pelaksana berdasarkan Peraturan Walikota Cilegon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penjabaran tugas dan fungsi Badan Penggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon dapat dilihat pada

gambar 2.1 berikut ini:

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA CILEGON



D. Sumber Daya Aparatur BPBD Kota Cilegon

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon memiliki sumber daya antara lain menyangkut sumber daya manusia dan peralatan serta perlengkapan kantor.

Dari sisi **sumber daya manusia**, aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon terdiri dari para pegawai yang diurai menurut status kepegawaian, kepangkatan, tingkat pendidikan formal/fungsional/struktural, dan jenis kelamin, sebagai berikut :

Tabel 1.1
Pegawai BPBD Kota Cilegon
Berdasarkan Golongan Ruang

NO	GOLONGAN	PRIA	WANITA	TOTAL	KET
1.	IV	5	-	5	
2.	III	9	5	14	
3.	II	5	1	6	
JUMLAH		**19**	**6**	**25**	

Tabel 1.2

Pegawai BPBD Kota Cilegon Berdasarkan Eselon

NO	ESELON	PRIA	WANITA	TOTAL	KET
1.	II	1		1	
2.	III	3		3	
3.	IV	5	4	9	
JUMLAH		**9**	**4**	**13**	

Tabel 1.3

Pegawai BPBD Kota Cilegon Berdasarkan Pendidikan Formal

NO	PENDIDIKAN	PRIA	WANITA	TOTAL	KET
1.	S2	5	3	**8**	
2.	S1	5	6	**11**	
3.	D3	1		**1**	
4.	SLTA	4	1	**5**	
JUMLAH		**15**	**10**	**25**	

(Sumber : Kasubag Umum dan Kepegawaian BPBD, Desember 2021)

Dari sisi aset yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon dan diperoleh Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
DAFTAR ASET BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2021

No	Nama Alat	JUMLAH
1	MOBIL RESCUE/ KOMANDO	2
2	MOBIL TAKTIS PICK UP	3
3	SEPEDA MOTOR TRAIL	7
4	TRUCK SERBAGUNA	1
5	TENDA PENGUNGSI/ TENDA PELETON	11
6	TENDA KELUARGA	19
7	CHAINSAW	5
8	GENZET	2
9	VELBED	53
10	LAMPU SENTER HID	4
11	LAMPU SENTER LED	2
12	PERAHU FIBER	2
13	MESIN BOAT	2
14	JARING HARNES	9
15	HAND SPRAYER	10
16	THERMOGUN/ ALAT PENGUKUR SUHU	2
17	PORTABLE WATER PUMP	3

18	WATER TREATMENT	1
19	ALAT UKUR UNIVERSAL LAINNYA (GPS)	2
20	MEGAPHONE	4
21	HANDY TALKIE/HT	11
22	RIG	3
23	SSB	2
24	REPEATER	1
25	UHF/VHF STATIONERY	1
26	ALAT KOMUNIKASI LAINNYA	2

Sumber: Pengurus Barang BPBD, Desember 2021

E. Permasalahan Utama (*strategic Issued*) yang dihadapi BPBD

Kota Cilegon dengan luas wilayah 17.550 Ha sebagai kota perdagangan dan jasa dewasa ini banyak diminati oleh investor dalam dan luar negeri. Perkembangan pembangunan kota cilegon sampai dengan saat ini telah dirasakan peningkatan hasil dan manfaatnya oleh masyarakat. Dengan bertambahnya industri di kota cilegon dewasa ini tentunya menambah pula jumlah bangunan dan penduduk di Kota Cilegon.

Seiring dengan perkembangan kota, terdapat peningkatan kebutuhan akan pembangunan prasarana kota untuk memenuhi kebutuhan air bersih, drainase, persampahan, pengendalian banjir dan bencana lainnya serta juga adanya peningkatan jumlah bangunan fasilitas umum dan sosial termasuk ruang terbuka hijau. Kondisi ini tentunya bisa memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat Cilegon. Dampak positifnya antara lain yaitu adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon, sedangkan dampak negatifnya yaitu bisa timbul bencana.

Menurut UU No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Potensi penyebab bencana dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis yaitu :

1. Bencana alam

   Bencana alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung berapi, angin topan/puting beliung, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan, karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.

2. Bencana non alam

   Bencana non alam antara lain kebakaran hutan/lahan/pemukiman yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.

3. Bencana sosial

   Bencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial politik dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi.

Menurut data Indek Risiko Bencana Indonesia (IRBI) BNPB 2020, Kota Cilegon masuk dalam kategori kelas risiko sedang dengan skor 128 seperti yang terlihat dalam Tabel 1.1 dan ada 8 jenis ancaman potensi bencana di Kota Cilegon yaitu: banjir, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, gelombang ekstrem, abrasi, kebakaran hutan, cuaca ekstrem, dan kekeringan.

Tabel 1.3

INDEKS RISIKO BENCANA DI PROVINSI BANTEN

BERDASARKAN INDEKS RESIKO BENCANA INDONESIA (IRBI) BNPB

TAHUN 2020

I. INDEKS RISIKO BENCANA MULTI ANCAMAN

NO	KABUPATEN/KOTA	SKOR	KELAS RISIKO
1.	PANDEGLANG	177	TINGGI
2.	LEBAK	182	TINGGI
3.	KAB. SERANG	203	TINGGI
4.	KAB. TANGERANG	147	TINGGI
5.	KOTA SERANG	169	TINGGI
6.	CILEGON	128	SEDANG
7.	KOTA TANGERANG	136	SEDANG
8.	KOTA TANGERANG SELATAN	97	SEDANG
PROV. BANTEN		155	TINGGI

II. INDEKS RISIKO BENCANA BANJIR

NO	KABUPATEN/KOTA	SKOR	KELAS RISIKO
1.	KAB. TANGERANG	36	TINGGI
2.	KAB. SERANG	36	TINGGI
3.	PANDEGLANG	36	TINGGI
4.	LEBAK	36	TINGGI
5.	KOTA TANGERANG	34	TINGGI
6.	KOTA SERANG	34	TINGGI
7.	CILEGON	34	TINGGI

III. INDEKS RISIKO BENCANA GEMPA BUMI

NO	KABUPATEN/KOTA	SKOR	KELAS RISIKO
1.	KAB. TANGERANG	22	TINGGI
2.	KOTA TANGERANG	22	TINGGI
3.	KAB. SERANG	22	TINGGI
4.	KOTA TANGERANG SELATAN	22	TINGGI
5.	LEBAK	22	TINGGI
6.	PANDEGLANG	22	TINGGI
7.	KOTA SERANG	22	TINGGI
8.	CILEGON	22	TINGGI

IV. INDEKS RISIKO BENCANA TSUNAMI

NO	KABUPATEN/KOTA	SKOR	KELAS RISIKO
1.	KAB. SERANG	24	TINGGI
2.	PANDEGLANG	24	TINGGI
3.	CILEGON	24	TINGGI
4.	LEBAK	24	TINGGI
5.	KAB. TANGERANG	24	TINGGI
6.	KOTA SERANG	24	TINGGI

V. INDEKS RISIKO BENCANA TANAH LONGSOR

NO	KABUPATEN/KOTA	SKOR	KELAS RISIKO
1.	LEBAK	24	TINGGI
2.	PANDEGLANG	24	TINGGI
3.	KAB. TANGERANG	12	TINGGI
4.	KAB. SERANG	12	TINGGI
5.	CILEGON	12	TINGGI
6.	KOTA SERANG	12	SEDANG
7.	KOTA TANGERANG	11	SEDANG
8.	KOTA TANGERANG SELATAN	11	SEDANG

VI. INDEKS RISIKO BENCANA GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI

NO	KABUPATEN/KOTA	SKOR	KELAS RISIKO
1.	KAB. TANGERANG	36	TINGGI
2.	KAB. SERANG	36	TINGGI
3.	PANDEGLANG	36	TINGGI
4.	LEBAK	36	TINGGI
5.	CILEGON	24	TINGGI
6.	KOTA SERANG	22	TINGGI

VII. INDEKS RISIKO BENCANA KEBAKARAN LAHAN DAN HUTAN

NO	KABUPATEN/KOTA	SKOR	KELAS RISIKO
1.	LEBAK	36	TINGGI
2.	PANDEGLANG	36	TINGGI
3.	KAB. SERANG	36	TINGGI
4.	CILEGON	36	TINGGI
5.	KOTA SERANG	35	TINGGI
6.	KAB. TANGERANG	34	TINGGI
7.	KOTA TANGERANG SELATAN	34	TINGGI

VIII. INDEKS RISIKO BENCANA CUACA EKSTRIM

NO	KABUPATEN/KOTA	SKOR	KELAS RISIKO
1.	KAB. TANGERANG	14	SEDANG
2.	KAB. SERANG	14	SEDANG
3.	KOTA TANGERANG	14	SEDANG
4.	KOTA SERANG	14	SEDANG
5.	PANDEGLANG	14	SEDANG
6.	LEBAK	14	SEDANG
7.	KOTA TANGERANG SELATAN	14	SEDANG
8.	CILEGON	7	SEDANG

IX. INDEKS RISIKO BENCANA KEKERINGAN

NO	KABUPATEN/KOTA	SKOR	KELAS RISIKO
1.	KAB. TANGERANG	24	TINGGI
2.	KAB. SERANG	24	TINGGI
3.	LEBAK	24	TINGGI
4.	PANDEGLANG	24	TINGGI
5.	CILEGON	24	TINGGI
6.	KOTA SERANG	23	TINGGI
7.	KOTA TANGERANG	22	TINGGI
8.	KOTA TANGERANG SELATAN	22	TINGGI

Selain 8 risiko bencana di Kota Cilegon ini masih terdapat risiko bencana yaitu kegagalan teknologi. Hal ini dimungkinkan oleh adanya pengembangan kawasan industri berskala nasional maupun internasional yang secara langsung atau tidak sangat mempengaruhi kualitas lingkungan hidup. Beberapa aktifitas yang dapat menimbulkan ancaman bencana kegagalan teknologi yang ada di Kota Cilegon antara lain kegiatan bongkar muat B3, penyimpanan dan penampungan limbah B3, proses produksi bahan kimia, keberadaan radioaktif di pabrik – pabrik di sekitar Cilegon, penempatan beberapa pipa interkoneksi yang berisi limbah B3, adanya pipa gas dan aktifitas industri lainnya.

Dalam perkembangannya di Kota Cilegon, untuk penanganan bencana sebelum OPD BPBD terbentuk, dilaksanakan oleh Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satlak PB) yang

didalamnya terlibat beberapa OPD dan Instansi vertikal misalnya OPD Badan Kesbang linmas (Sekretariat Satlak PB), Unsur Kodim Cilegon, Unsur Polres Cilegon, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas PU, PMI,Tagana dan lain-lain, sehingga apabila terjadi bencana kelemahannya adalah sulitnya dalam koordinasi antar unsur dimaksud.

Menyadari adanya ancaman bencana dan sulitnya koordinasi antar instansi di Kota Cilegon, sebagai langkah antisipasi untuk pengurangan risiko bencana dan upaya mengurangi atau menghilangkan kerugian serta korban jiwa yang lebih besar bagi masyarakat, maka Pemerintah Kota membentuk Badan Penggulangan Bencana Daerah (BPBD) berdasarkan Perda Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (**LKIP**) BPBD Kota Cilegon Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Ringkasi Eksekutif memuat:

1. Pada Bagian ini disajikan tujuan dan sasaran strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya.
2. Disebutkan pula Langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan Langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi di tahun mendatang

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama *(Strategic issued)* yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2020;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2020 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

b. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. dan masih mengacu pada Peraturan Kepala LAN Nomor 239/1X/6/8/2003 Tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Rencana Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya,

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai, dengan memperhitungkan potensi, peluang ataupun hambatan dan kendala yang mungkin timbul. Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2026

merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan,Sasaran, Program dan kegiatan. RENSTRA BPBD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

2.1 VISI dan MISI

Visi dan Misi Kepala Daerah Visi misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam tabel RPJMD Kota Cilegon Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

Tabel 2.1

Ringkasan Visi Misi RPJMD Kota Cilegon 2021-2026

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
TERWUJUDNYA CILEGON BARU, MODERN DAN BERMARTABAT	**1 Menghadirkan pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel**	**Peningkatan kualitas layanan pemerintahan**	**Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalisme aparatur**
	2 Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas	Peningkatan kualitas Pendidikan	Terwujudnya kualitas pendidikan yang merata
			Meningkatnya kompetensi literasi masyarakat
	3 Meningkatkan pelayanan Kesehatan	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan individu
	4 Mewujudkan kesejahteraan yang merata	Pemerataan kesejahteraan masyarakat	Berkurangnya kesenjangan sosial ekonomi masyarakat
			Meningkatnya kesempatan kerja masyaraka
			Meningkatnya investasi dan pendapatan daerah
	5 Mewujudkan masyarakat berperadaban	**Peningkatan** kualitas pembangunan dan **kualitas hidup masyarakat**	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur Kota, prasarana, sarana dan utilitas permukiman
			Meningkatnya pelestarian budaya, dan pengembangan destinasi wisata
			Stabilitas pangan, **Ketangguhan bencana**, kondusifitas wilayah, kerukunan umat beragama
			Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
			Meningkatnya kualitas hidup perempuan, anak, pemuda dan olahraga

(Sumber: RPJMD Kota Cilegon Tahun 2021-2026)

Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, BPBD Kota Cilegon mendukung pencapaian 2 (Dua) Sasaran Pemerintah Daerah yang terdapat pada Misi 1 yaitu Meningkatnya akuntabilitas Pemerintah dan Profesional Aparatur dan pada Misi 5 yaitu Stabilitas pangan, Ketangguhan bencana, kondusifitas wilayah, kerukunan umat beragama, dan fokus pada pencapaian terhadap **Ketangguhan Bencana.**

2.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka menengah BPBD Kota Cilegon selama 5 tahun anggaran adalah : **Meningkatnya kualitas layanan pemerintahan** dan **Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat**

Sasaran Strategis

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD Kota Cilegon

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Satuan	KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
					kondisi Kinerja Awal Periode (2021)	2022	2023	2024	2025	2026
					Target	Target	Target	Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	62,97	71,20	75,30	78,00	82,20	84,20
		Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan Profesionalitas Aparatur								
			Nilai LAKIP Perangkat Daerah	Poin	79,00	80,00	81,00	82,00	83,00	85,00
			Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	42,00	45,00	48,00	50,00	52,00	52,00
2.	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat		Indeks Resiko bencana	Poin	135	130	125	120	115	110
		Meningkatnya ketangguhan bencana								

			Persentase Masyarakat di Wilayah Rawan Bencana yang mendapatkan Informasi Kebencaaaan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Persentase Masyarakat di Wilayah Rawan Bencana yang mendapatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

2.3 Strategi, Program dan Kegiatan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi perangkat daerah. Sasaran, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis kemudian dijabarkan lebih lanjut kedalam suatu rencana kinerja tahunan, dan guna mencapai sasaran tersebut diatas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon menyusun program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.4

Strategi, Program dan Kegiatan

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4
1	**Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan Profesionalitas Aparatur**	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
			Administrasi Umum Perangkat Daerah;
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
			Administrasi Kepegawean Perangkat Daerah
2	**Meningkatnya Ketangguhan Bencana**	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

B. Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra Tahun 2021-2026, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja BPBD Kota Cilegon adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja APBD-P Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan Profesionalitas Aparatur	Nilai Lakip Perangkat Daerah	Poin	79
		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		42
2	Meningkatnya Ketangguhan Bencana	Persentase Masyarakat di Wilayah Rawan Bencana yang mendapatkan Informasi Kebencanaaan	%	100
		Persentase Masyarakat di Wilayah Rawan Bencana yang mendapatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana		100

		Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		100

No.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 8.691.254.840	APBD
2	Program Penanggulangan Bencana	Rp 10.231.146.279	APBD dan DID

Berikut ini kami sampaikan Perjanjian Kinerja pada Tahun 2021 dengan Jumlah Anggaran setelah perubahan anggaran APBD-P Tahun 2021 pada 2 (Dua) Program sebesar **Rp. 18.922.401.119 (Delapan Belas Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Satu Ribu Seratus Sembilan Belas Rupiah)**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi.

Pada BAB ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu dilaporkan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja efisiensi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cilegon sebagai salah satu organisasi perangkat daerah, melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPBD Kota Cilegon yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
LAKIP BPBD Tahun 2021 ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) BPBD Kota Cilegon tahun 2021-2026. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi Pemerintah Kota Cilegon. Pelaporan Kinerja BPBD Tahun

2021 ini didasarkan pada Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama RENSTRA BPBD Tahun 2021-2026.

Untuk mempermudah interprestasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan diberlakukan penilaian ***skala ordinal*** sebagai ***parameter*** keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

URUTAN	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
I	Lebih dari 100%	Baik Sekali
II	Lebih dari 75%-100%	Baik
III	55% - 75%	Cukup
IV	Kurang dari 55%	Kurang

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2021 yang membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran sebagai berikut :

Misi 1 **: Menghadirkan Pemerintahan Daerah yang Profesional dan akuntabel**

Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Layanan Pemerintahan

Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan Profesionalitas Aparatur

Tabel 3.1
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

No	Indikator Sasaran	Sat.	Tahun 2021		Capaian Kinerja 2021
			Target	Realisasi	
1	*Nilai Lakip Perangkat Daerah*	Poin	79	78,43	BB
2	*Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah*	Poin	42	38,93	C

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran diatas dimana hasil penilaian berdasarkan tahun n-1 yaitu berdasarkan hasil penilaian Tahun 2020, dimana kinerja pada tahun 2020 (n-1) pada 2 (dua) indicator pada sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan Profesionalitas Aparatur yaitu poin lakip PD sebesar 78,43 dan indeks reformasi birokrasi PD sebesar 38,93. Sedangkan penilaian pada Tahun 2021 ini dengan *self assessment* atau penilaian mandiri, upaya kita untuk meningkatkan poin pada kedua indicator sasaran pada tahun 2021. Setidaknya upaya kita pada Tahun 2021 sesuai target. Adapun hasil yang didapat dari self asseement (penilaian mandiri) berupa pengisian LKE RB dan Kertas Kerja Pra Lakip. Ada upaya untuk mencapai target tahun 2021. Adapun faktor pendorong didalam meningkatkan capaian indikator pertama pada sasaran 1 yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian sasaran/Kinerja Organisasi. Sedangkan untuk factor pendorong didalam peningkatan capaian indikator kedua pada sasaran 1 yaitu Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Misi 5 **: Mewujudkan Masyarakat Berperadaban**
Tujuan 2 : Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat

Sasaran 2 : Meningkatnya Ketangguhan Bencana

Indikator Tujuan dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat adalah Indeks Risiko Bencana,

No	Indikator Tujuan	Sat.	Tahun 2021		Capaian Kinerja 2021
			Target	Realisasi	
1	Indeks Resiko Bencana	Kelas Risiko	**Sedang**	**Sedang**	**Sedang (skor 128,15)**

Capaian Kinerja indikator sasaran ini didapat dari self assessment dengan mengisi kuisioner Peringkat Penilaian Kapasitas Daerah (7 Fokus Prioritas dan 71 Indikator pencapaian) dari BNPB.

Pendekatan teknis perhitungan indeks resiko bencana didasarkan pada Peraturan Kepala (Perka) BNPB No. 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana

Terdapat 3 (Tiga) Indikator sasaran yang merupakan salah satu faktor pendukung untuk menurunkan indeks risiko bencana di Kota Cilegon adalah sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Sat.	Tahun 2021		Capaian Kinerja 2021 (%)
			Target	Realisasi	
1	*Persentase Masyarakat Di Wilayah rawan Bencana Yang Mendapatkan Informasi Kebencanaan*	%	100	100	**100**

Pada Indikator yang 1 yaitu Persentase masyarakat di wilayah rawan bencana yang mendapatkan informasi kebencanaan dengan target 100% telah terealisasi 100%; yang didapat dari Jumlah masyarakat yang memperoleh layanan informasi rawan bencana. Capaian tersebut signifikan dikarenakan (1)Telah dilaksanakan sosialisasi Informasi melalui Media Cetak dan Media Elektronik (Leaflet, Stiker, Koran, Online, dan Radio); (2)Telah dilaksanakan sosialisasi kepada kelompok pemuda, kelompok wanita, kelompok pelajar/mahasiswa, kelompok aparatur, kelompok guru, dan kelompok RT/RW; (3)Seluruh Kelurahan yang ada di Kota Cilegon telah melakukan sosialisasi kepada warganya secara mandiri melalui anggaran DPWKEL; (4)Peran serta industri juga aktif melakukan sosialisasi kepada warga di sekitar perusahaannya;

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja tahun 2021 mencapai target yaitu 100 % dalam kategori baik sekali.

Sedangkan untuk realisasi anggaran sebesar 96,94% sudah tercapai dengan baik dengan target anggaran sebesar Rp. 74.998.000 realisasi sebesar Rp. 72.705.908.

No	Indikator Sasaran	Sat.	Tahun 2021		Capaian Kinerja 2021 (%)
			Target	Realisasi	
2	*Persentase Masyarakat di Wilayah Rawan Bencana yang Mendapatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana*	%	100	100	100

Indikator kedua adalah persentase masyarakat di wilayah rawan bencana yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana dengan target 100% telah terealisasi 100%, yang didapat dari penjumlahan masyarakat yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Capaian tersebut signifikan dikarenakan (1)Telah tersedianya Lokasi Evakuasi, Jalur Evakuasi, Zonasi; (2)Telah adanya Peralatan Kebencanaan, Pusdalops, TRC dan Relawan Kebencanaan; (3)Sering dilakukan drill/Simulasi kebencanaan baik di sekolah-sekolah, kelurahan-kelurahan, dan di industri-industri;

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja tahun 2021 mencapai target yaitu 100 % dalam kategori baik sekali

Untuk realisasi anggaran pada APBD-P TA. 2021 yaitu sebesar Rp. 411.219.333 atau 79,48% dari anggaran sebesar RP. 517.361.577

No	Indikator Sasaran	Sat.	Tahun 2021		Capaian Kinerja 2021 (%)
			Target	Realisasi	
3	*Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana*	%	100	100	**100**

Untuk indikator yang ketiga yaitu persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dengan target 100% telah terealisasi 100%, yang didapat dari penjumlahan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dimana berdasarkan data kejadian sebanyak 65 Kejadian dan jumlah data korban kejadian selama tahun 2021 sebanyak 2.686 KK atau sekitar 10.744 Jiwa, dapat teratasi dengan baik. capaian ini signifikan dikarenakan telah melaksanakan (1) Fungsi komando yang dilaksanakan melalui pengerahan SDM, Peralatan, Logistk dari OPD terkait, (2) Fungsi

Koordinasi yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan OPD terkait, instansi vertical, Lembaga Usaha dll dan (3) Fungsi Pelaksana unsur pelaksana BPBD Kota Cilegon yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan OPD terkait dan instansi vertical yang ada di daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja tahun 2021 mencapai target yaitu 100 % dalam kategori baik sekali

Sedangkan untuk realisasi anggaran sebesar 67,66% atau sebesar Rp. 6.521.687.286 dari anggaran sebesar Rp. 9.638.786.702

Berikut disampaikan Ketercapaian Indikator Sasaran Terhadap Target sebagai berikut :

Tabel 3.3
Ketercapaian Indikator Sasaran Terhadap Target

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Ketercapaian Target	Keterangan
Misi 1 : Menghadirkan Pemerintahan Daerah yang Profesional dan akuntabel				
Tujuan 1: Meningkatnya Kualitas Layanan Pemerintahan				
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan Profesionalitas Aparatur	2	2 Indikator Mencapai Target	mencapai target
	Jumlah Indikator Sasaran	2		
Misi 5: Mewujudkan Masyarakat Berperadaban				
Tujuan 2: Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat				
2	Meningkatnya Ketangguhan Bencana	3	3 Indikator Mencapai Target	mencapai target
	Jumlah Indikator Sasaran	3		
	Jumlah Indikator Sasaran	**5**		

Adapun Rekapitulasi beserta perhitungan ketercapaian indikator sasaran terhadap target Tahun 2020 dapat dilihat dalam **tabel 3.4 berikut ini:**

TABEL 3.4

REKAPITULASI KETERCAPAIAN INDIKATOR SASARAN TERHADAP TARGET TAHUN 2021

No	Indikator Kinerja Utama		Uraian	Cara Perhitungan	s. d Tahun 2021 (dlm Jumlah)		Tahun 2021		Capaian Kinerja 2021 (%)
					Target	Realisasi	Target (%)	Realisasi (%)	
1	*2*		*3*	*4*	*5*		*6*		***7***
1	Nilai Lakip Perangkat Daerah		poin	Berdasarkan Hasil Penilaian Lakip dari Tim Evaluator	79	78,43	79	78,43	**99,27**
2	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		poin	Berdasarkan Hasil Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi dari Tim Evaluator	42	38,93	42	38,93	**92,69**
3	Persentase Masyarakat Di Wilayah rawan Bencana Yang Mendapatkan Informasi Kebencanaan		%	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana dibagi jumlah penduduk di kawasan rawan bencana x 100%	100	100	100	$\frac{445.961}{445.961} * 100\% = 100\%$	**100**

4	Persentase Masyarakat di Wilayah Rawan Bencana yang Mendapatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana		%	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana dibagi jumlah penduduk di kawasan rawan bencana x 100%	100	100	100	$\frac{445.961}{445.961}$ * 100% = 100%	**100**
5	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		%	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban bencana dibagi jumlah korban bencana x 100%	100	100	100	$\frac{10.744}{10.744}$ * 100% = 100%	**100**

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Mengingat BPBD Kota Cilegon baru efektif pada tanggal 26 Januari 2015, sehingga perbandingan kinerja yang disajikan dengan 3 tahun terakhir yaitu, 2018, 2019 dan Tahun 2020 yang berdasarkan indikator pada Renstra sebelumnya, dan untuk capaian kinerja tahun 2021 berdasarkan renstra Tahun 2021-2026 Berikut ini ditampilkan realisasi kinerja BPBD Tahun 2018, 2019 dan Tahun 2020 pada **tabel 3.5** berikut:

Tabel 3.5

PERBANDINGAN REALISASI PENCAPAIAN KINERJA DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

NO	SASARAN STRATEGIS	TAHUN 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	Target (%)	Realisasi	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian
		(%)	(%)			(%)			(%)		%	%	%
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan												
a.	Nilai Lakip Perangkat Daerah	B	CC	C	B	B	B	BB	BB	BB			
b.	Tingkat maturitas SPIP	3	0	0	3	3	3	3	3	3			
2	Meningkatnya pencegahan dampak dan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran												
a.	Indeks Risiko Bencana	Tinggi (Kelas Risiko)	164,32 (Skor)	Sedang (Kelas Risiko)	Sedang (Kelas Risiko)	147,21 (skor)	Sedang (Kelas Risiko)	Sedang (Kelas Risiko)	128,15 (skor)	Sedang (Kelas Risiko)			
1	**Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan Profesionalitas Aparatur**												

a.	**Nilai Lakip Perangkat Daerah**										**79**	78,43	**99,27**
b.	**Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**										**42**	38,93	**92,69**
2	**Meningkatnya Ketangguhan Bencana**												
a.	**Persentase Masyarakat Di Wilayah rawan Bencana Yang Mendapatkan Informasi Kebencanaan**										**100**	**100**	**100**
b.	**Persentase Masyarakat di Wilayah Rawan Bencana yang Mendapatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana**										**100**	**100**	**100**
c.	**Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**										**100**	**100**	**100**

3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi atau RPJMD Kota Cilegon 2021-2026

LAKIP harus mempertanggungjawabkan kinerja yang telah diperjanjikan/diterapkan dalam Perjanjian Kinerja dan terkait dengan rencana kinerja yang telah direncanakan dalam Rencana Jangka Menengah (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). BPBD Kota Cilegon yang relatif baru dibentuk dan melanjutkan program dari Badan KesbangLinmas Kota Cilegon telah membuat Renstra Tahun 2021-2026 yang mengacu pada RPJMD Kota Cilegon Tahun 2021-2026. Sehingga realisasi kinerja Tahun 2021 merupakan capaian kinerja dari target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen RPJMD Kota Cilegon Tahun 2021-2026

Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Renstra

NO	SASARAN	INDIKATOR	Realisasi Kinerja	Renstra
			2021	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan Profesionalitas Aparatur	Nilai Lakip Perangkat Daerah	78,43	poin 79
		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	38,93	poin 42
2	Meningkatnya Ketangguhan Bencana	Persentase Masyarakat Di Wilayah rawan Bencana Yang Mendapatkan Informasi Kebencanaan	100%	100%
		Persentase Masyarakat di Wilayah Rawan Bencana yang Mendapatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	100%	100%
		Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%

4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Beberapa penyebab menurunnya pencapaian target kinerja BPBD Kota Cilegon dari Tahun sebelumnya antara lain:

a. Dengan kondisi saat ini maka untuk meningkatkan kinerja BPBD dimasa yang akan datang perlu didukung oleh SDM yang memadai
b. Masih kurang koordinasi dengan SKPD/instansi terkait, sehingga hasil belum maksimal
c. Lingkup penanganan BPBD terhadap pemahaman bencana kepada masyarakat masih belum menyentuh kepada seluruh sasaran sehingga kesadaran masyarakat terhadap upaya pencegahan bencana masih kurang.
d. Masih belum terjalin komunikasi yang efektif dengan industri baik yang berada di zona I, II maupun III, sehingga masih ada industri yang enggan memberikan data terkait kebencanaan
e. Keterbatasan alat-alat kebencanaan yang menjadi pendukung utama dalam penanganan bencana

Strategi pemecahan masalah yang ditempuh oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun 2021 yaitu:

a. Membuat usulan ke BKPP untuk penambahan PNS pada BPBD untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia baik petugas BPBD maupun OPD/Instansi dan relawan melalui berbagai pelatihan kebencanaan
b. Melakukan peningkatan koordinasi dengan OPD/Instansi terkait baik melalui pertemuan formal maupun non formal
c. Memaksimalkan upaya pencegahan bencana terhadap masyarakat dengan Sosialisasi, Informasi dan Edukasi terhadap Bencana.
d. Menjalin komunikasi dengan industri baik melalui simulasi bersama maupun pertemuan baik formal maupun non formal dan menyarankan ke Pihak industri melalui Zona I, II, III.
e. Perkuatan Kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana dengan tersedianya alat-alat kebencanaan yang memadai

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun 2021 ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon telah melaksanakan 2 (dua) Program, 11 (Sebelas) Kegiatan dan 37 (Tiga puluh Tujuh) Sub Kegiatan. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2021. untuk mencapai 5 (Lima) sasaran atau dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan penilaian sendiri (self assessment) atas realisasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2021, penyerapan pembiayaan untuk program kegiatan prioritas dengan anggaran sebesar Rp **18.922.401.119,-** dan terealisasi per 31 Desember 2021 sebesar **Rp. 13.553.181.217** atau tingkat realisasi anggaran sebesar **71,63%** terlihat bahwa BPBD Kota Cilegon telah melakukan efisiensi penggunaan sumber daya.

6. Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat diuraikan dibawah ini.

Program Penanggulangan Bencana

Pada Program ini terdapat 3 (tiga) Indikator untuk keberhasilan Program Penanggulangan Bencana yaitu Persentase Masyarakat Di Wilayah rawan Bencana Yang Mendapatkan Informasi Kebencanaan (100%), Persentase Masyarakat di Wilayah Rawan Bencana yang Mendapatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana (100%), dan Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (100%).

Pada Program Penanggulangan Bencana terdapat 3 (Tiga) Kegiatan yaitu Kegiatan Pelayanan informasi Rawan Bencana kab/Kota, Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan Terhadap Bencana dan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana . Kegiatan- kegiatan inilah yang menunjang tercapainya indikator-indikator pada program penanggulangan bencana

a. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota

Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota didukung oleh 2 (Dua) Sub Kegiatan yaitu Penyusunan kajian Risiko Bencana Kab/Kota dan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), Rawan Bencana Kab/Kota.

Ditahun 2021, untuk Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana tidak dapat dilaksanakan di tahun 2021 dikarenakan keterbatasan waktu dan Sumber Daya Manusia (SDM) dan akan

segera disusun di TA. 2022.

Untuk sosialisasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kab/Kota melalui Sosialisasi informasi kebencanaan dengan tatap muka dengan peserta 100 orang, media Radio (5 Radio untuk himbauan walikota kepada masyarakat), cetak (3 kali terbit di koran radar banten dan banten raya), online (8 kali tayang), dan leaflet yang berisi informasi 6 jenis bencana)

2 (dua) Sub kegiatan ini sangat mendukung indikator pertama pada program penanggulangan bencana dan SPM yaitu ketercapaian Masyarakat Di Wilayah rawan Bencana Yang Mendapatkan Informasi Kebencanaan (100 %) dengan upaya- upaya diatas tersebut setidaknya masyarakat dapat terlayani dalam hal pelayanan informasi kebencanaan di Kota Cilegon.

Anggaran Kegiatan ini pada APBD-P TA. 2021 semula Rp. 174.996.700 menjadi Rp. 74.998.000

Dikarenakan ada sub kegiatan yang dinihilkan yaitu Kajian Risiko Bencana dikarenakant keterbatasan waktu dan sumber daya manusia (SDM) dan akan dilaksanakan pada tahun berikutnya yaitu Tahun 2022.

Capaian realisasi anggaran per 31 desember 2021 adalah sebesar Rp. 72.705.908 atau 96,94%

Dari anggaran sebesar 74.998.000. secara keseluruhan kegiatan pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota berjalan baik

b. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Kegiatan ini didukung oleh beberapa sub kegiatan yaitu: Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana kab/kota, Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana, Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan, Penanganan Pasca Bencana Kab/Kota, dan Pengembangan Kapasitas Tim reaksi Cepat (TRC) Bencana Kab/Kota.

Pada Tahun 2021 ini telah terlaksana sub kegiatan pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana sebanyak 44 orang.

Sub Kegiatan Peralatan dan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yaitu dengan tersedianya alat Early Warning System (EWS) akan tetapi alat ini tidak dapat tersedia dikarenakan keterbatasan waktu dan Sumber daya Manusia (SDM).

Sub Kegiatan Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan yaitu berupa terlaksananya apel siaga sebanyak 180 orang, Forum FGD Kebencanaan sebanyak 40 orang, dan PAM PHBN/PHBI sebanyak 20 orang.

Sub kegiatan Penanganan Pasca Bencana yang berupa kegiatan koordinasi dan evaluasi penanganan rekonstruksi, Terlaksananya rapat-rapat koordinasi penanganan rehabilitasi pasca

bencana dan terlaksananya survey/monitoring koordinasi penanganan rehab pasca bencana.
Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas TRC Bencana Kab/Kota dimana terlaksananya kapasitas SDM, tidak dapat terlaksana dikarenakan masih masa pandemic covid 19 dan ada beberapa pegawai BPBD yang terpapar Covid-19, sehingga sub keg ini tidak dapat dilaksanakan.

Beberapa sub kegiatan ini yang mendukung indikator kedua pada program penanggulangan bencana kab/kota dan SPM yaitu ketercapaian Masyarakat di Wilayah Rawan Bencana yang Mendapatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana (100%) dengan upaya- upaya diatas tersebut setidaknya masyarakat dapat terlayani dalam hal pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana di Kota Cilegon.
pada APBD-P TA. 2021 Terdapat perubahan anggaran, semula sebesar Rp. 1.260.552.627 menjadi Rp. 517.361.577.
Perubahan anggaran tersebut dikarenakan Pengadaan alat EWS tidak dapat terlaksana dikarenakan keterbatasan waktu dan Sumber Daya Manusia
Untuk realisasi anggaran pada APBD-P TA. 2021 yaitu sebesar Rp. 411.219.333 atau 79,48% dari anggaran sebesar RP. 517.361.577
Secara keseluruhan kegiatan pencegahan dan Kesiapsiagaan dapat berjalan baik

c. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan sebagai berikut: Sub Kegiatan Respon cepat darurat bencana kab/kota dan Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota.
Sub Kegiatan Respon cepat darurat bencana kab/kota dimana output terdiri dari Operasional Tanggap Darurat (OTD), Fasilitasi Isolasi Mandiri Covid-19 dan Kesekretariatan Gugus Tugas Covid 19 di Kota Cilegon. Untuk Operasional Tanggap Darurat (OTD) adalah penanganan bencana yang terjadi sepanjang tahun 2021 sebanyak 65 kejadian yaitu banjir sebanyak 13 kejadian, Longsor sebanyak 7 kejadian, Angin Pitung Beliung sebanyak 26 kejadian, kekeringan sebanyak 1 kejadian, Kebakaran Lahan sebanyak 18 kejadian dengan jumlah data korban sebanyak 2.686 KK/ 10.744 jiwa (2.686 KK x 4 orang). Penanganan bencana sepanjang Tahun 2021 dapat diatasi dengan baik dikarenakan dalam pelaksanaan tugas penanganan bencana, BPBD Kota Cilegon dibantu oleh unsur OPD terkait, TNI/Polri, Pihak kecamatan dan kelurahan, Unsur Relawan dari PMI, Tagana, Kelurahan Tangguh Bencana, Unsur Akademisi dan masyarakat yang peduli dengan kebencanaan.

Untuk Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota yaitu terlaksananya penyediaan dan pendistribusian logistik ke daerah rawan bencana dimana terdapat 8 titik penyerahan bantuan logistik ke daerah yang terdampak bencana.

Beberapa sub Kegiatan ini yang mendukung indikator ketiga program penanggulangan bencana yaitu tercapainya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (100%) dengan upaya- upaya diatas tersebut setidaknya masyarakat dapat terlayani dalam hal pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana di Kota Cilegon.

pada APBD-P TA. Terdapat perubahan anggaran, semula sebesar Rp 523.703.802 menjadi Rp. 9.638.786.702. terdapat perubahan anggaran yang digunakan untuk mengatasi covid-19 di Kota Cilegon.

Serapan anggaran pada TA. 2021 untuk kegiatan ini sebesar Rp. 6.514.651.671 (67,75%) dari besaran pagu Rp. 9. 638.786.702.

hal ini karena disesuaikan dengan jumlah kejadian bencana di wilayah Kota Cilegon dan personil yang terlibat dalam pelaksanaan tugas tanggap darurat Bencana dan operasional pendistribusian logistik, begitupun dengan penanganan covid – 19 yaitu Fasilitasi Siolasi Mandiri (ISMAN) Covid 19 dan Kesekretariatan Satuan Tugas Covid 19 terjadi pelandaian kasus terkonfirmasi covid 19 pada 4 bulan terakhir dan kebutuhan pasien covid 19 pun berkurang sehingga anggaran yang tersedia dalam DPA tidak dapat diserap seluruhnya.

d. Penanganan Covid-19

Anggaran penanganan Covid 19 dalam APBD Kota Cilegon Tahun 2021 pada BPBD Kota Cilegon dianggarkan melalui Pos Belanja Tidak Terduga (BTT) dan Hasil Refocusing APBD Kota Cilegon TA. 2021 (DAU dan DID). Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cilegon Nomor 900/Kep.13-BPKAD/2021 tentang Persetujuan Penggunaan Belanja Tidak Terduga APBD TA. 2021 Tanggal 5 Januari 2021, Surat Keputusan Walikota Cilegon Nomor 900/Kep.169-BPKAD/2021 tentang persetujuan Penggunaan Belanja Tidak Terduga APBD TA. 2021 tanggal 13 Juli 2021, dan Surat Keputusan Walikota Cilegon Nomor 900/Kep.171-BPKAD/2021 tentang Persetujuan Penggunaan Belanja Tidak Terduga APBD Kota Cilegon TA. 2021 tanggal 14 Juli 2021.

Kegiatan Penanganan Covid 19 yang dilaksanakan oleh BPBD TA. 2021 yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) dituangkan dalam 54 rencana kebutuhan belanja (RKB) BTT sebesar Rp. 4.832.230.000 yang terdiri dari:

1. Operasional Tempat Isolasi Mandiri Covid 19;
2. Operasional Satuan Tugas (Penanganan Jenazah Covid 19);
3. Operasional Piket Posko Terpadu Covid 19;
4. Operasional Piket Posko 8 Kecamatan
5. Operasional Piket Posko 43 Kelurahan

Untuk Kegiatan penanganan Covid 19 yang bersumber dari Refocussing DID dan DAU, dituangkan dalam DPA BPBD Program Penanggulangan Bencana, Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kab/Kota dengan rincian anggaran penanganan covid 19 Rp. 9.115.082.900. anggaran ini berasal dari refocusing sumber dana DID sebesar RP. 7.052.082.900 dan refocusing sumber dana DAU sebesar RP. 2.063.000.000.

Kegiatan Penanganan Covid 19 yang bersumber dari refocusing anggaran DID yaitu digunakan untuk Fasilitasi Isolasi Mandiri Penanganan Covid 19

Sedangkan kegiatan penanganan Covid 19 yang bersumber dari refocusing anggaran DAU yaitu digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cilegon sebagai Kesekretariatan Gugus Tugas Daerah dan Pelaksanaan Fasilitasi Penanganan Covid 19 oleh Instansi Vertikal melakukan penanganan Covid 19 dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Operasional Piket Kesekretariatan Covid 19,dan
2. Operasional Tenaga Penyemprotan.

Adapun Instansi vertikal meliputi Polres Cilegon, Kodim 0623 Cilegon, Kejaksaan Tinggi Negeri, Lanal Banten, BIN, PMI, BPBD dan Dinas Kesehatan.

Realisasi Anggaran yang bersumber dari dana BTT sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 3.235.748.000 atau 72,69% dari total anggaran BTT sebesar Rp. 4.451.460.000

Untuk Realisasi Anggaran yang bersumber dari dana DID (Fasilitasi ISMAN) sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 4.991.703.900 atau 70,78% dari anggaran Rp. 7.052.082.900

Dan Realisasi anggaran yang bersumber dari dana DAU (Kesekretariatan Gugus Tugas Covid 19)

sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 1.112.420.000 atau 53,92% dari anggaran sebesar Rp. 2.063.000.000

BPBD Kota Cilegon menerima bantuan berupa barang dari sumber lainnya diluar APBD Kota Cilegon berupa alat kesehatan, dengan jenis seperti Masker, Handsgloves, Hand Sanitizer, hazmat suit, Cairan Disinfektan, Sabun, Face Shield, Kantong Mayat, Alat Rapid Tes, dan Pallet.

REALISASI ANGGARAN

Kebijakan umum pengelolaan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan dengan tetap mengacu pada kebijakan umum sesuai yang tertuang dalam RENSTRA BPBD Kota Cilegon Tahun 2021-2026

Jumlah Pagu Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk tahun 2021 berdasarkan DPA Perubahan APBD Kota Cilegon tahun 2021 adalah sebesar Rp **18.922.401.119,-** dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2021 sebesar **Rp. 13.553.181.217,-** atau tingkat realisasi sebesar 71,63%.

Tabel. 3.7

Jumlah Anggaran dan Realisasi Penyerapan Tahun 2021

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	KET
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	**8.691.254.840,00**	**6.638.859.951,00**	**76,39%**
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**52.785.386,00**	**52.515.386,00**	**99,49%**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.395.290,00	8.305.290,00	98,93%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.498.000,00	2.498.000,00	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.999.732,00	2.999.732,00	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2.499.000,00	2.499.000,00	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.897.624,00	25.897.624,00	100,00%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.495.740,00	8.315.740,00	97,88%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**5.587.133.935,00**	**3.835.982.304,00**	**68,66%**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.527.524.021,00	3.802.502.304,00	68,79%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	47.160.000,00	33.480.000,00	70,99%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12.449.914,00	12.449.914,00	100,00%

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**18.000.000,00**	**18.000.000,00**	**100,00%**
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**197.650.000,00**	**189.480.500,00**	**95,87%**
Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	197.650.000,00	189.480.500,00	95,87%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**705.822.089,00**	**537.781.985,00**	**76,19%**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.226.498,00	8.887.340,00	96,32%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	302.061.129,00	259.489.950,00	85,91%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.507.488,00	30.570.488,00	100,21%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	139.792.974,00	99.027.907,00	70,84%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.950.000,00	26.828.000,00	52,66%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	28.776.000,00	7.340.000,00	25,51%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.840.000,00	6.060.000,00	77,30%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	136.668.000,00	61.158.000,00	44,75%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**47.314.152,00**	**46.190.000,00**	**97,62%**
Pengadaan Mebel	12.406.359,00	11.675.000,00	94,10%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.907.793,00	34.515.000,00	98,87%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**1.619.507.280,00**	**1.475.576.582,00**	**91,11%**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	240.245.023,00	176.418.695,00	73,43%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.373.262.257,00	1.293.157.887,00	94,17%
Pemeliharaan Barang Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**463.041.998,00**	**336.406.847,00**	**72,65%**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	365.782.201,00	256.098.647,00	70,01%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.797.000,00	34.150.000,00	69,98%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	48.462.797,00	46.158.200,00	95,24%
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	**10.231.146.279,00**	**7.048.797.699,00**	**68,90%**
Pelayanan Informasi Rawan Bencara Kabupaten/Kota	**74.998.000,00**	**72.705.908,00**	**96,94%**
Penyusuan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota	0,00	-	0,00%
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	74.998.000,00	72.705.908,00	96,94%
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	**517.361.577,00**	**446.340.120,00**	**86,27%**
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	47.144.026,00	43.851.026,00	93,02%

Penyediaan Peralatan Perlindungan dari Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	0,00	-	0,00%
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	309.320.234,00	282.422.234,00	91,30%
Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	143.639.350,00	120.066.860,00	83,59%
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kab/Kota	17.257.967,00	-	0,00%
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	**9.638.786.702,00**	**6.529.751.671,00**	**67,74%**
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	9.388.358.758,00	6.345.940.123,00	67,59%
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota	250.427.944,00	183.811.648,00	73,40%

Tabel 3.8

Realisasi Anggaran BPBD Kota Cilegon Tahun 2021 Per Sasaran dan Program Pendukung Sasaran

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Program	Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan Profesionalitas Aparatur**	Nilai Lakip Perangkat Daerah	79	78,43	99,28%	**Program Penunjang Urusan PD Kab/Kota**	8.493.604.840	6.449.379.451	75,93 %
		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	42	38,93	92,69%		197.650.000,00	189.480.500,00	95,86 %

2	**Meningkatnya Ketangguhan Bencana**	Persentase Masyarakat Di Wilayah rawan Bencana Yang Mendapatkan Informasi Kebencanaan	100	100	100,00%	**Program Penanggulangan Bencana**	74.998.000,00	72.705.908,00	96,94 %
		Persentase Masyarakat di Wilayah Rawan Bencana yang Mendapatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	100	100	100,00%		517.361.577,00	446.340.120,00	86,27%
		Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100	100	100,00%		9.638.786.702,00	6.529.751.671,00	67,74%
Jumlah **Total Belanja**							**18.922.401.119**	**13.553.181.217**	**71,63**

Tabel 3.9

Analisis Efisiensi Anggaran Dalam Rangka Pencapaian Sasaran BPBD Kota Cilegon

No	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Capaian Kinerja	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	**Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan Profesionalitas Aparatur**	Nilai Lakip Perangkat Daerah	99,28%	75,93%	
		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	92,69%	95,86%	
			95,99	85,90	**10,09**
2	**Meningkatnya Ketangguhan Bencana**	Persentase Masyarakat Di Wilayah rawan Bencana Yang Mendapatkan Informasi Kebencanaan	100%	96,94%	
		Persentase Masyarakat di Wilayah Rawan Bencana yang Mendapatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	100%	86,27%	
		Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	67,74%	
			100%	83,65%	**16,35%**

Dari tabel tersebut (table 3.9) diketahui bahwa Sasaran Strategis BPBD Kota Cilegon telah mencapai kinerja dan penyerapan anggaran sebesar > dari 80% dan dikatakan EFISIEN dengan efisiensi anggaran sebesar 10,09% pada sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan Profesionalitas Aparatur dan 16,35% pada sasaran Meningkatnya Ketangguhan Bencana. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh pemantapan koordinasi baik internal BPBD Kota Cilegon maupun dengan perangkat daerah terkait.

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran pada table 3.9, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran sebesar 71,63% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2021 telah mencukupi. Akan tetapi perlu ditingkatkan lagi dengan usaha yang maksimal dan perencanaan yang matang agar sasaran dan penyerapan anggaran kedepannya sesuai dengan sasaran BPBD Kota Cilegon dan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Selanjutnya berikut ini Rekapitulasi Anggaran Belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon APBD-P Tahun Anggaran 2021 :

Tabel 3.10

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja BPBD Kota Cilegon

Pada APBD-P Tahun Anggaran 2021

URAIAN BELANJA	***ANGGARAN (RP)***	***REALISASI ANGGARAN (RP)***	***CAPAIAN (%)***
BELANJA OPERASI	**18.657.814.726**	**13.303.362.217**	**71,63**
Belanja Pegawai	5.672.097.021	3.904.832.304	71,30
Belanja Barang dan Jasa	12.985.717.705	9.398.529.913	68,84
BELANJA MODAL	**264.586.393**	**249.819.000**	**94,42**
TOTAL BELANJA DAERAH	**18.922.401.119**	**13.553.181.217**	**71,63**

BAB IV

PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cilegon Tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa secara umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Pada Tahun Anggaran 2021, sasaran sebagaimana tertuang dalam RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon Tahun 2021-2026 berjumlah 2 (Dua) sasaran dengan 5 (Lima) indikator sasaran.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap 5 (Lima) indikator sasaran dengan hasil sebagai berikut :

1. Nilai Lakip Perangkat Daerah mendapat poin 78,43
2. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah mendapat poin 38,93
3. Persentase Masyarakat Di Wilayah rawan Bencana Yang Mendapatkan Informasi Kebencanaan (100%)
4. Persentase Masyarakat di Wilayah Rawan Bencana yang Mendapatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana (100%)
5. Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (100%)

Di lihat dari hasil penilaian terhadap 5 indikator sasaran diatas maka pencapaian sasaran kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon Tahun 2021 sudah mencapai target. Namun demikian masih terdapat beberapa perlu penyempurnaan terhadap pemenuhan indikator-indikator sasaran agar BPBD menjadi lebih baik lagi.

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah - langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia baik petugas BPBD maupun OPD/Instansi dan relawan melalui berbagai pelatihan kebencanaan
2. Membuat usulan ke BKPP untuk penambahan PNS pada BPBD
3. Memberdayakan Pegawai non PNS untuk diperbantukan di bidang-bidang yang tidak ada staf/pelaksana
4. Melalui Musrenbang BPBD Kota Cilegon mengusulkan penambahan peralatan pendukung, upaya yang lain yaitu membuat Proposal ke BNPB dan BPBD Propinsi Banten untuk mendapatkan bantuan logistik dan peralatan.
5. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan, dalam hal ini melakukan peningkatan koordinasi dengan OPD/Instansi terkait baik melalui pertemuan formal maupun non formal
6. Melakukan peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana
7. Perkuatan Kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana dengan tersedianya alat-alat kebencanaan yang memadai

sasaran yang tertuang dalam RENSTRA sama dengan yang tertuang di RPJMD Kota Cilegon Tahun 2021-2026 yaitu Meningkatnya Ketangguhan Bencana. Dengan demikian capaian sasaran pada Tahun 2021 sesuai target sehingga capaian sasaran ini dapat mendukung indikator tujuan yang tertuang di RPJMD Kota Cilegon yaitu menurunkan Indeks Risiko Bencana dengan poin 128,15 (Kelas Risiko Sedang) berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh BNPB.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator sasaran yang dicantumkan dalam RENSTRA BPBD Kota Cilegon Tahun 2021-2026 dapat terlaksana dengan kategori sangat baik dan baik. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, tentunya harus menjadi motivasi bagi BPBD untuk lebih baik lagi kedepan dalam pencapaian indikator kinerja yang sudah ditargetkan.

LAMPIRAN

WALI KOTA CILEGON
PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA CILEGON
NOMOR : 060/kep.639-Bappeda/2019

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAPORAN KINERJA SECARA *REAL-TIME* DAN TERINTEGRASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CILEGON

WALI KOTA CILEGON,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip transparan, akuntabel, efektif dan efisien, perlu didukung dengan instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan prosedur kerja bagi aparatur yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan daerah dalam bentuk standar operasional prosedur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Standar Operasional Prosedur Pelaporan Kinerja secara *Real-Time* dan Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3. Undang ...

Scanned by TapScanner

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4689);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 649);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2018 Nomor 2);
9. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 45 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2018 Nomor 45);

MEMUTUSKAN ...

Scanned by TapScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelaporan Kinerja Secara *Real-Time* dan Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, terdiri dari:

a. Penyusunan Rencana Proses Pelaksanaan Kegiatan; dan
b. Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Kegiatan di lingkup Perangkat Daerah dan Pemerintah Kota Cilegon.

KETIGA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan evaluasi sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 13 Desember 2019
WALI KOTA CILEGON

EDI ARIADI

Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kota Cilegon;
2. Yth. Inspektur Kota Cilegon;
3. Yth. Kepala Perangat Daerah se Kota Cilegon.

Scanned by TapScanner

WALIKOTA CILEGON
PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA CILEGON
NOMOR : 060/Kep.270-ORB/2018

TENTANG
MEKANISME PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CILEGON

WALI KOTA CILEGON,

Menimbang : a. bahwa melaksanakan Ketentuan dalam dalam huruf D, Lampiran II, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

b. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, responsibilitas dan kinerja, serta kualitas laporan akuntabilitas kinerja, perlu adanya mekanisme yang sama dalam menyusun laporan kinerja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Mekanisme Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 114);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 649);
6. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Tahun 2016, Nomor 3).
7. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mekanisme Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Cilegon merupakan standarisasi langkah dan/atau tahapan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Cilegon.

KEDUA Mekanisme Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Cilegon sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi :

1. Mekanisme Pengumpulan Data Laporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah;
2. Mekanisme Penyampaian Laporan Kinerja Perangkat Daerah;
3. Mekanisme Penyusun Laporan Kinerja Perangkat Daerah; dan
4. Mekanisme Penyusunan Laporan Kinerja Tingkat Kota Cilegon.

KETIGA : Mekanisme Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Cilegon sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Mekanisme Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Cilegon sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dapat dilakukan evaluasi dan/atau perubahan sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

KELIMA : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah, yang diserahkan ke Inspektorat dan Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi harus mencantumkan lembar verifikasi dari Bagian pada Sekretariat Daerah yang mengoordinatori Urusan.

KEENAM : Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Cilegon.

KETUJUH ...

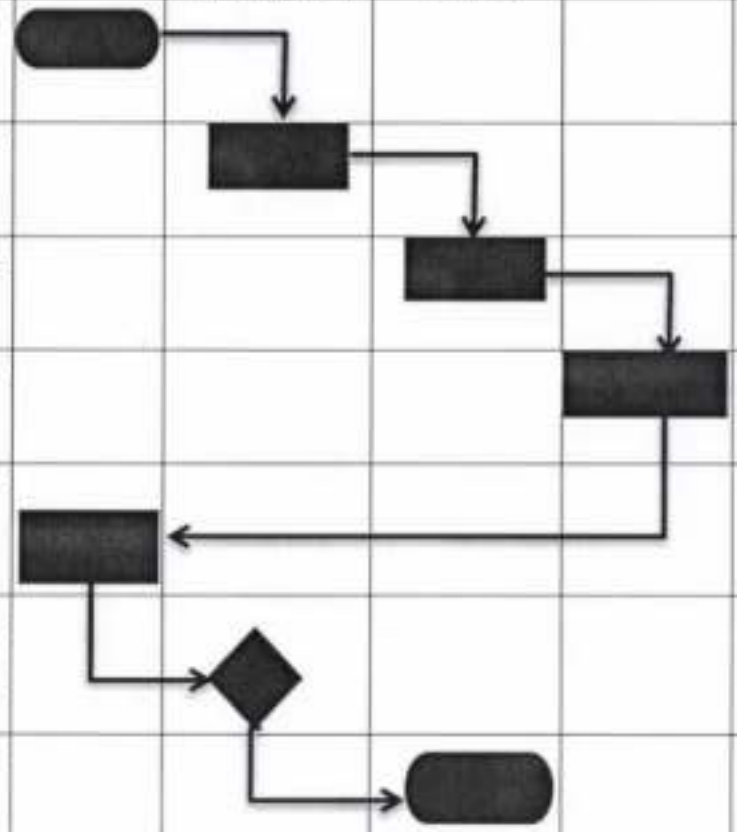
KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 19 Maret 2018
Plt. WALI KOTA CILEGON

EDI ARIADI

Lampiran I : KEPUTUSAN WALI KOTA CILEGON
Nomor : 060/ Kep. 270-ORB/ 2018
Tentang : MEKANISME PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CILEGON

O	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			
		SERETARIS DINAS	KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN	PEJABAT FUNGSIONAL UMUM	KEPALA BIDANG	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KE NO
.	Menugaskan Kepada Kasubag Program dan Keuangan untuk mengumpulkan data kinerja					Agenda Kerja	10 menit	Disposisi	
.	Menugaskan kepada JFU untuk mengumpulkan data kinerja					Disposisi	10 menit	Disposisi	
.	Membuat Nota Dinas Permohonan Data Kinerja dan menyampaikannya kepada Kepala Bidang					Disposisi	30 menit	Nota Dinas	
.	Membuat laporan data dan analisa capaian kinerja dan menyampaikannya kepada Sekretaris Dinas					Nota Dinas	5 hari	Data dan analisa capaian kinerja	
.	Menugaskan Kepada Kasubag untuk mengolah Data Kinerja					Data dan analisa capaian kinerja	10 menit	Disposisi	
.	Menelaah dan Memverifikasi data kinerja. Jika Sesuai akan diteruskan kepada JFU untuk diolah. Jika Tidak Sesuai akan dikembalikan kepada Kepala Bidang untuk diperbaiki kembali					Data Kinerja dan Disposisi	10 menit	Data Kerja dan Disposisi	
.	Mengolah Data Kinerja dalam data base capaian kinerja					Data Kinerja dan Disposisi	10 menit	Data Base Capaian Kinerja	

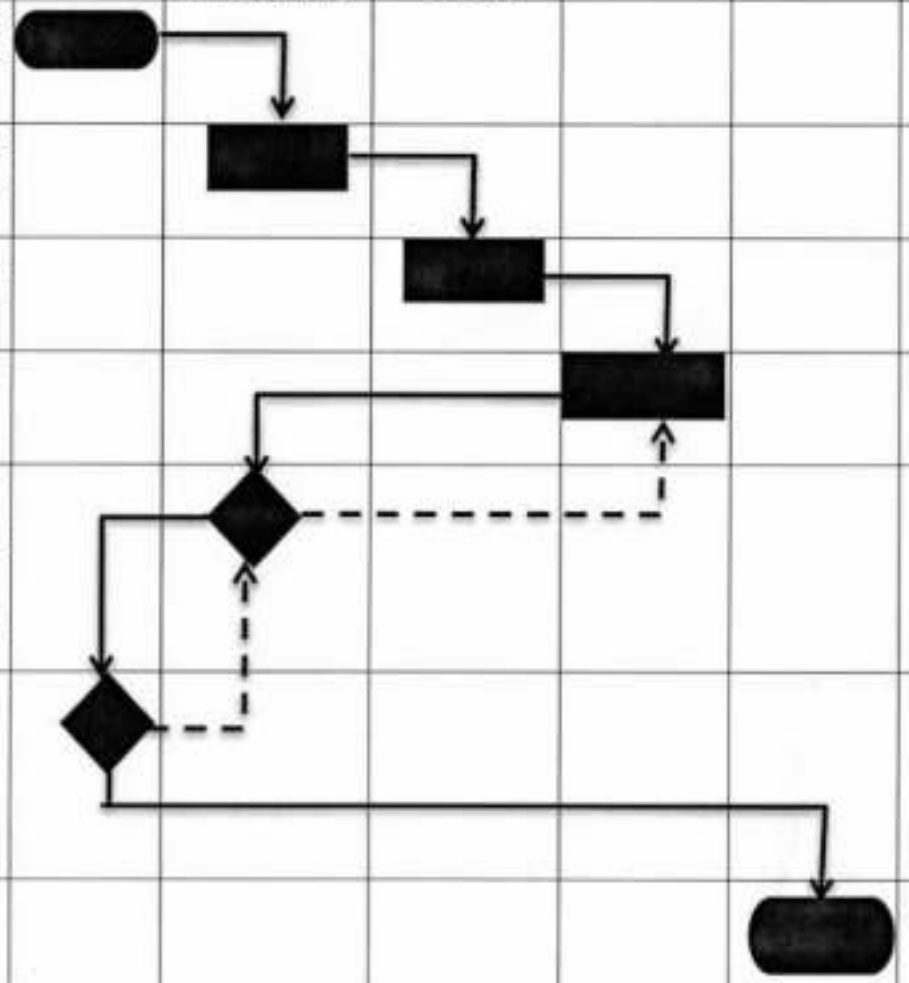


Plt. WALI KOTA CILEGON

EDI ARIADI

Lampiran II : KEPUTUSAN WALI KOTA CILEGON
Nomor : 060/ Kep.270-ORG/ 2018
Tentang : MEKANISME PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CILEGON

KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			
	SERETARIS DINAS	KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN	PEJABAT FUNGSIONAL UMUM	TIM Penyusun Laporan	Kepala Dinas	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	K A
Menugaskan kepada Kasubag untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah						Agenda Kerja	10 menit	Disposisi	
Menugaskan kepada JFU untuk mengumpulkan data kinerja dan menyampaikan kepada tim						Disposisi	10 menit	Disposisi	
Mengumpulkan dan menyampaikan data kinerja dari masing-masing bidang kepada tim penyusun Laporan						Nota Dinas	5 Hari	Data Capaian Keinerja	
Menyusun Draft Laporan Kinerja Instansi Pemerintah						Data Kerja	15 Hari	Rancangan Laporan	
Menelaah dan mengoreksii Rancangan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Jika Setuju akan diparaf dan diteruskan kepada Sekretaris Dinas. Jika Tidak Setuju, akan dikembalikan kepada Tim Penyusun Laporan untuk diperbaiki						Rancangan Laporan	5 Hari	Rancangan Laporan	
Menelaah dan mengoreksi Draft Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Jika Setuju akan diparaf dan diteruskan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani. Jika Tidak Setuju, akan dikembalikan kepada Kasubag Program dan Keuangan untuk diperbaiki						Rancangan Laporan	3 Hari	Rancangan Laporan	
Menandatangani Laporan Kinerja Instansi Pemerintah						Rancangan Laporan	25 menit	Laporan	

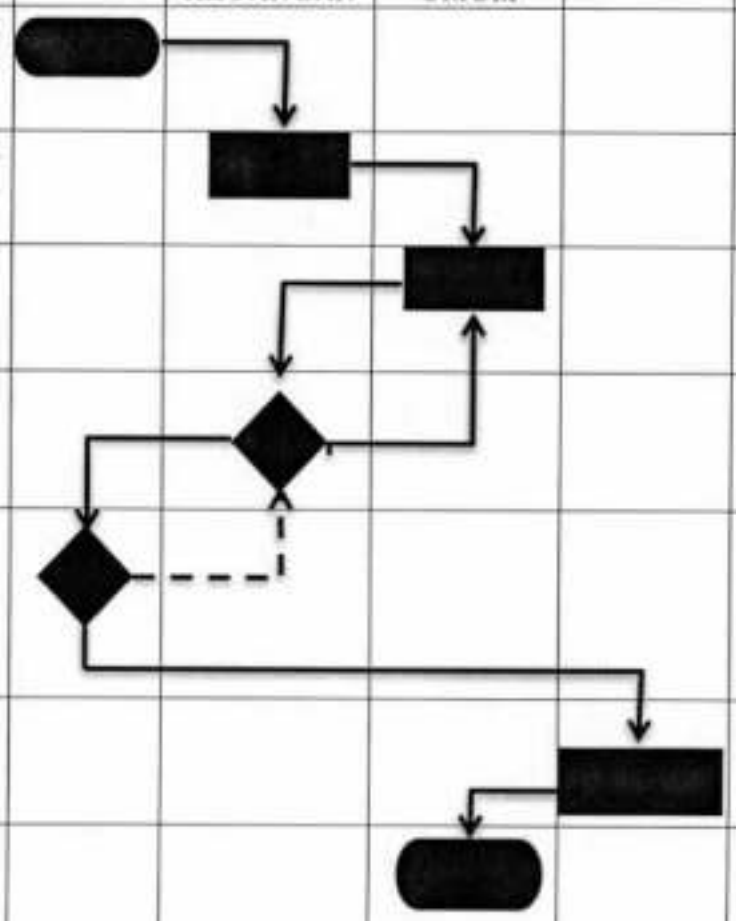


Plt. WALI KOTA CILEGON

EDI ARIADI

Lampiran III : KEPUTUSAN WALI KOTA CILEGON
Nomor : 060/ Kep.270-ORB/ 2018
Tentang : MEKANISME PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CILEG

KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
	SEKRETARIS DINAS	KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN	PEJABAT FUNGSIONAL UMUM	Kepala DINAS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
Menugaskan kepada Kasubag untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah					Agenda Kerja	10 menit	Disposisi	
Menugaskan kepada JFU untuk membuat Surat Pengantar dan menyiapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang telah ditandatangani					Disposisi	10 menit	Disposisi	
Membuat Surat Pengantar dan Menyiapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja					Nota Dinas dan Disposisi	20 menit	Rancangan Surat Pengantar dan Kelengkapan	
Menelaah dan memeriksa Rancangan Surat Pengantar beserta kelengkapannya. Jika Setuju akan diparaf. Jika Tidak Setuju akan di kembalikan kepada JFU untuk diperbaiki					Rancangan Surat Pengantar dan Kelengkapan	20 menit	Rancangan Surat Pengantar dan Kelengkapan	
Menelaah dan memeriksa Rancangan Surat Pengantar beserta kelengkapannya. Jika Setuju akan diparaf dan diteruskan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani. Jika Tidak Setuju akan di kembalikan kepada JFU untuk diperbaiki					Rancangan Surat Pengantar dan Kelengkapan	20 Menit	Rancangan Surat Pengantar dan Kelengkapan	
Menandatangani Surat Pengantar					Rancangan Surat Pengantar dan Kelengkapan	10 menit	Surat Pengantar dan Kelengkapan	
Menyampaikan surat pengantar beserta kelengkapannya kepada inspektorat, dan Bagian Organisasi dan RB Setda.					Surat Pengantar dan Kelengkapan	1 hari	Surat Pengantar dan Laporan Kinerja	

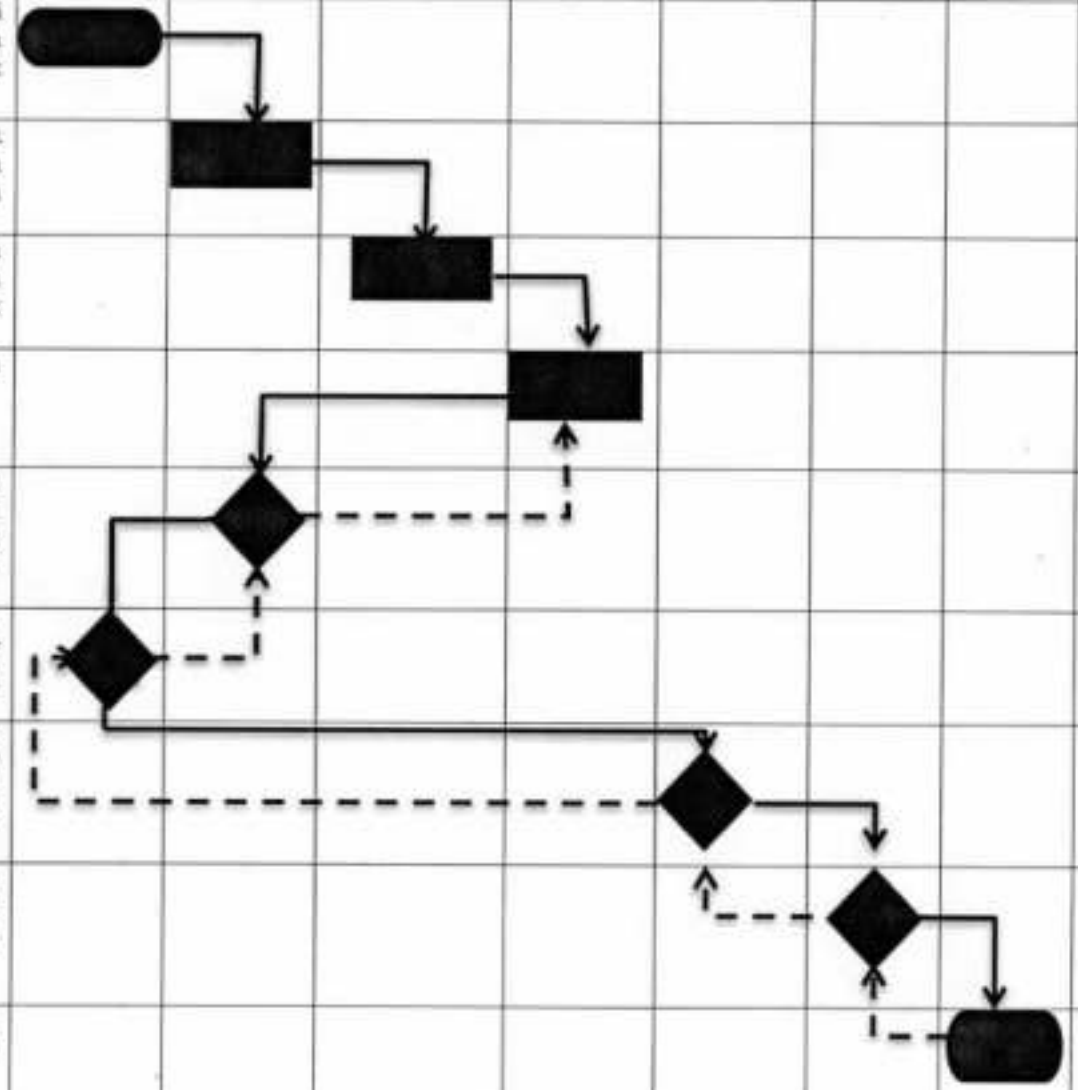


Plt. WALI KOTA CILEGON

EDI ARIADI

Lampiran IV : KEPUTUSAN WALI KOTA CILEGON
Nomor : 060/ Kep.270-ORB/ 2018
Tentang : MEKANISME PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CILEGON

NO	KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU			
		KABAG ORB	KASUBAG ARB	JFU	TIM Penyusun	ASDA	SEKDA	WALI KOTA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
1.	Menerima data kinerja dari instansi di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon dan menugaskan kepada Kasubag ARB untuk menyusun Laporan Kinerja Tk. Kota								Data Kerja	5 menit	Disposisi	
2.	Menugaskan kepada JFU untuk membuat database kinerja dan menyerahkan kepada tim penyusun untuk membuat Draft Laporan Kinerja Tk. Kota								Data Kerja	10 menit	Disposisi	
3.	Mengumpulkan dan merekap data kinerja dalam data base kinerja. Selanjutnya diserahkan kepada tim penyusun untuk diolah dan disusun								Data Kerja	5 Hari	Data Kerja	
4.	mengolah, menganalisa, dan menyusun Draft Laporan Kinerja Tk. Kota								Rancangan Laporan	20 Hari	Rancangan Laporan	
5.	memeriksa, menganalisa dan menelaah draft Laporan Kinerja Tk. Kota. Jika Setuju akan diserahkan kepada Kabag ORB untuk diparaf. Jika Tidak, akan dikembalikan untuk diperbaiki								Rancangan Laporan	5 Hari	Rancangan Laporan	
6.	Memeriksa dan menelaah draft Laporan Kinerja Tk. Kota. Jika Setuju akan diparaf dan dilanjutkan kepada asisten. Jika Tidak akan dikembalikan untuk diperbaiki								Rancangan Laporan	3 Hari	Rancangan Laporan	
7.	Memeriksa dan menelaah draft Laporan Kinerja Tk. Kota. Jika Setuju akan diparaf dan dilanjutkan kepada Sekretaris Daerah. Jika Tidak akan dikembalikan untuk diperbaiki								Rancangan Laporan	1 Hari	Rancangan Laporan	
8.	menelaah draft Laporan Kinerja Tk. Kota. Jika Setuju akan diparaf dan dilanjutkan kepada Walikota untuk ditandatangani. Jika Tidak, akan dikembalikan untuk diperbaiki								Rancangan Laporan	1 Hari	Rancangan Laporan	
9.	menelaah draft Laporan Kinerja Tk. Kota. Jika Setuju akan ditandatangani, Jika Tidak akan dikembalikan untuk diperbaiki								Rancangan Laporan	1 Hari	Laporan	



Plt. WALI KOTA CILEGON

EDI ARIADI

WALI KOTA CILEGON
PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA CILEGON

NOMOR : 060/Kep.287/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CILEGON TAHUN 2021-2026

WALI KOTA CILEGON,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Cilegon 2021-2026 serta dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2021-2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Cilegon tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2021-2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Penyusunan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 807);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1872);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2021, Nomor 7);
10. Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2021 Nomor 40);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2021-2026, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Indikator Kinerja pada Lampiran I sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dipergunakan sebagai Pedoman untuk Perjanjian Kinerja dan Pengukuran Kinerja Wali Kota.

KETIGA : Indikator Kinerja pada Lampiran II sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dipergunakan sebagai Pedoman untuk Perjanjian Kinerja dan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 22 Desember 2021
WALI KOTA CILEGON,

HELLDY AGUSTIAN

Tembusan:
1. Yth. Ketua DPRD Kota Cilegon
2. Yth. Inspektur Kota Cilegon
3. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cilegon

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN WALI KOTA CILEGON

NOMOR : 060/Kep.287/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CILEGON TAHUN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CILEGON TAHUN 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1.	Meningkatkan kualitas layanan pemerintahan	Indeks reformasi birokrasi	Poin	Perhitungan Indeks Reformasi Birokrasi berdasarkan nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh kementrian PANRB dengan berpedoman pada PermenPANRB Nomor 26 Tahun 2020
2.	Meningkatkan kualitas pendidikan	Indeks pendidikan	Poin	Sesuai dengan metodologi BPS dalam penghitungan IPM Inkesra (Jika data Publikasi BPS Tahun N belum tersedia, maka menggunakan data pada tahun N-1)
3.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	Sesuai dengan metodologi BPS dalam penghitungan IPM Inkesra (Jika data Publikasi BPS Tahun N belum tersedia, maka menggunakan data pada tahun N-1)
4.	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat	Tingkat kemiskinan	Persen	Sesuai dengan metodologi BPS dalam penghitungan Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), Jika data Publikasi BPS Tahun N belum tersedia, maka menggunakan data pada tahun N-1
		Tingkat pengangguran terbuka	Poin	Sesuai dengan metodologi BPS dalam penghitungan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Jika Publikasi BPS terkait Sakernas Tahun N belum tersedia, maka menggunakan data pada tahun N-1

NO ...

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
5.	Meningkatkan kualitas pembangunan dan kualitas hidup masyarakat	Indeks kebahagiaan	Poin	Sesuai dengan metodologi BPS dalam penghitungan Subdimensi Kepuasan Hidup Personal dan Subdimensi Kepuasan Hidup Sosial, (Jika data Publikasi BPS Tahun N belum tersedia, maka menggunakan data pada tahun N-1)

WALI KOTA CILEGON,

HELLDY AGUSTIAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA CILEGON
NOMOR : 060/Kep.287/2021
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CILEGON TAHUN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CILEGON TAHUN 2021-2026

A. SEKRETARIAT DAERAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan profesionalitas aparatur	Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APIP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60 %, hasil 40 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Nilai Lakip Perangkat Daerah	Poin	Nilai lakip yang dinilai setiap tahun oleh APIP dengan komponen perencanaan kinerja 30 %, pengukuran kinerja 25 %, pelaporan kinerja 15 % dan Evaluasi Internal 10 % dan Capaian Kinerja 20 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Persentase Progress Capaian Roadmap Reformasi Birokrasi	%	Rata-rata capaian indikator sasaran roadmap Reformasi Birokrasi terhadap Target Akhir Road Map
		Tingkat Kepuasan layanan Keprotokolan (Bagian Protokol)	%	Hasil survey kepuasaan kemanfaatan layanan keprotokolan

NO ...

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
		Indeks Tata Kelola Barang dan Jasa (Bagian Barjas)	Poin	Penilaian aspek kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ (bobot 50 %) dan tingkat kematangan UKPBJ (bobot 50 %)
		Persentase tindak lanjut hasil monev permasalahan lingkup Administrasi Tata Pemerintahan	%	Jumlah tindaklanjut hasil monev yang ditindaklanjuti dibagi temuan monev x 100 %
		Persentase tindak lanjut hasil monev permasalahan lingkup eksda (eksda)	%	Jumlah tindaklanjut hasil monev yang ditindaklanjuti dibagi temuan monev x 100 %
		Persentase tindak lanjut hasil monev permasalahan lingkup Kesos dan Kesra	%	Jumlah tindaklanjut hasil monev yang ditindaklanjuti dibagi temuan monev x 100 %
		Persentase tindak lanjut hasil monev permasalahan Program (Adpem)	%	Jumlah tindaklanjut hasil monev yang ditindaklanjuti dibagi temuan monev x 100 %
		Rata-Rata Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagian Hukum (Bagian Hukum dan HAM)	%	Rata-rata dari persentase capaian kinerja pelayanan banhuk ditambah persentase capaian kinerja produk hukum ditambah persentase capaian kinerja dokumentasi produk hukum

B. INSPEKTORAT ...

B. INSPEKTORAT

<table>
<tr><th>NO</th><th>SASARAN STRATEGIS</th><th>INDIKATOR KINERJA</th><th>SATUAN</th><th>PENJELASAN
FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN</th></tr>
<tr><td rowspan="4">1.</td><td rowspan="4">Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur</td><td>Nilai Lakip Perangkat Daerah</td><td>Poin</td><td>Nilai lakip yang dinilai setiap tahun oleh APIP dengan komponen perencanaan kinerja 30 %, pengukuran kinerja 25 %, pelaporan kinerja 15 % dan Evaluasi Internal 10 % dan Capaian Kinerja 20 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)</td></tr>
<tr><td>Indeks RB Perangkat Daerah</td><td>Poin</td><td>Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APIP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60 %, hasil 40 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)</td></tr>
<tr><td>Indeks Manajemen Resiko</td><td>Level</td><td>Capaian Penilaian Indeks Penerapan Manajemen Resiko Berdasarkan 7 Parameter :
<table>
<tr><th>NO</th><th>ELEMEN</th><th>BOBOT</th></tr>
<tr><td>A</td><td>KAPABILITAS</td><td>60.00%</td></tr>
<tr><td>I</td><td>KEPEMIMPINAN</td><td>10.00%</td></tr>
<tr><td>II</td><td>KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO</td><td>10.00%</td></tr>
<tr><td>III</td><td>SUMBER DAYA MANUSIA</td><td>10.00%</td></tr>
<tr><td>IV</td><td>KEMITRAAN</td><td>5.00%</td></tr>
<tr><td>V</td><td>PROSES MANAJEMEN RISIKO</td><td>25.00%</td></tr>
<tr><td>B</td><td>HASIL</td><td>40.00%</td></tr>
<tr><td>VI</td><td>AKTIVITAS PENANGANAN RISIKO</td><td>25.00%</td></tr>
<tr><td>VII</td><td>OUTCOMES</td><td>15.00%</td></tr>
<tr><td>C</td><td>TOTAL (KAPABILITAS + HASIL)</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>D</td><td>MANAJEMEN RISIKO INDEKS (TOTAL NILAI X 5)</td><td>5</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Indeks Kapabilitas APIP</td><td>Level</td><td>Hasil Capaian Indeks Kapabilitas APIP berdasarkan 6 elemen Penilaian meliputi :
1. Peran dan Layanan APIP;
2. Pengelolaan SDM;
3. Praktik Profesional;
4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja;
5. Budaya dan Hubungan Organisasi;
6. Struktur Tata Kelola.</td></tr>
</table>

C. SEKRETARIAT ...

C. SEKRETARIAT DPRD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	Nilai Lakip Perangkat Daerah	Poin	Nilai lakip yang dinilai setiap tahun oleh APIP dengan komponen perencanaan kinerja 30 %, pengukuran kinerja 25 %, pelaporan kinerja 15 % dan Evaluasi Internal 10 % dan Capaian Kinerja 20 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APIP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60 %, hasil 40 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Survey Kepuasan Layanan Sekretariat DPRD	Poin	Survey dilakukan kepada anggota DPRD untuk mengetahui persepsi anggota DPRD terhadap kualitas layanan Sekretariat DPRD, Berdasarkan indikator : - Dukungan SDM; - Pelayanan Alat Kelengkapan; - Pelayanan Kesehatan; - Penyediaan Sarana dan Prasarana; - Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan; - Pelayanan Persidangan dan risalah; - Pelayanan Bagian Perundang-undangan dan kajian; dan - Pelayanan bagian Keuangan.

D. BADAN ...

D. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APIP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60 %, hasil 40 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Nilai Lakip Perangkat Daerah	Poin	Nilai lakip yang dinilai setiap tahun oleh APIP dengan komponen perencanaan kinerja 30 %, pengukuran kinerja 25 %, pelaporan kinerja 15 % dan Evaluasi Internal 10 % dan Capaian Kinerja 20 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Indeks Perencanaan	%	Persentase hasil keselarasan, integrasi, dan sinkronisasi perencanaan kota
		Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan	%	Persentase hasil keselarasan, integrasi, dan sinkronisasi perencanaan sektoral
2.	Meningkatnya Budaya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Poin	Indeks Inovasi Daerah dinilai setiap tahun oleh Kemendagri yang telah divalidasi oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri

E. BADAN ....

E. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APIP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60 %, hasil 40 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Nilai Lakip Perangkat Daerah	Poin	Nilai lakip yang dinilai setiap tahun oleh APIP dengan komponen perencanaan kinerja 30 %, pengukuran kinerja 25 %, pelaporan kinerja 15 % dan Evaluasi Internal 10 % dan Capaian Kinerja 20 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	Berdasarkan hasil penilaian (IKM) yang dilakukan oleh Surveyor dengan berpedoman pada Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017. (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Indeks Pengelolaan Keuangan	Poin	Hasil Pengukuran atas 6 Dimensi Pengelolaan Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indek Pengelolaan Keuangan Daerah
2.	Meningkatnya pendapatan daerah	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	%	Persentase Peningkatan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun n terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun n-1 Formulasi = $((X_n - X_{n-1})/X_{n-1}) \times 100\%$ Keterangan : X_n=Realisasi PAD Tahun n X_{n-1} =Realisasi PAD Tahun (n-1)

F. BADAN ...

F. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APIP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60 %, hasil 40 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Nilai Lakip Perangkat Daerah	Poin	Nilai lakip yang dinilai setiap tahun oleh APIP dengan komponen perencanaan kinerja 30 %, pengukuran kinerja 25 %, pelaporan kinerja 15 % dan Evaluasi Internal 10 % dan Capaian Kinerja 20 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
2.	Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Indeks Merit System	Poin	Indeks Merit System : Akumulasi atau jumlah dari skor/nilai dari tim penilai mandiri yang telah diverifikasi oleh KASN, dari aspek-aspek di bawah ini, sesuai dengan bobot yang telah ditentukan dalam Peraturan KASN Nomor 9 Tahun 2019 : - perencanaan kebutuhan (10%) - pengadaan (10%) - pengembangan karir (30%) - promosi dan mutasi (10%) - manajemen kinerja (20%) - penggajian, penghargaan dan disiplin (10%) - perlindungan dan pelayanan (4%) - sistem informasi (6%)
		Indeks Profesionalitas ASN	Poin	Jumlah total hasil perkalian dari bobot dimensi/indikator dikalikan skor/nilai masing-masing jawaban dimensi/indikator (tata cara detail berdasarkan Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019))

G. BADAN ...

G. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APIP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60 %, hasil 40 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Nilai Lakip Perangkat Daerah	Poin	Nilai lakip yang dinilai setiap tahun oleh APIP dengan komponen perencanaan kinerja 30 %, pengukuran kinerja 25 %, pelaporan kinerja 15 % dan Evaluasi Internal 10 % dan Capaian Kinerja 20 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
2.	Mewujudkan kondusivitas wilayah, kerukunan umat beragama dan nilai-nilai luhur keagamaan	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	Berdasarkan hasil penilaian dari BPS (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahu n-1)

H. BADAN ...

H. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APIP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60 %, hasil 40 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Nilai Lakip Perangkat Daerah	Poin	Nilai lakip yang dinilai setiap tahun oleh APIP dengan komponen perencanaan kinerja 30 %, pengukuran kinerja 25 %, pelaporan kinerja 15 % dan Evaluasi Internal 10 % dan Capaian Kinerja 20 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
2.	Meningkatnya ketangguhan bencana	Persentase Masyarakat di Wilayah Rawan Bencana yang mendapatkan Informasi Kebencaaaan	%	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana dibagi jumlah penduduk di kawasan rawan bencana x 100%
		Persentase Masyarakat di Wilayah Rawan Bencana yang mendapatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	%	Jumlah Aparatur yang menangani urusan bencana ditambah jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana dibagi jumlah aparatur yang menangani urusan bencana dan jumlah penduduk di kawasan rawan bencana x 100%
		Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban bencana dibagi jumlah korban bencana x 100%

I. DINAS ...

I. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APIP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60 %, hasil 40 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Nilai Lakip Perangkat Daerah	Poin	Nilai lakip yang dinilai setiap tahun oleh APIP dengan komponen perencanaan kinerja 30 %, pengukuran kinerja 25 %, pelaporan kinerja 15 % dan Evaluasi Internal 10 % dan Capaian Kinerja 20 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
2.	Meningkatnya Kualitas Penataan ruang, dan infrastuktur kota	Persentase rumah tangga yang mendapatkan Akses air Minum yang Layak dan Aman	Persen	Jumlah Rumah tangga Yang mendapat akses air minum (jaringan perpipaan ditambah bukan jaringan perpipaan ditambah mata air terlindungi ditambah sumber lainnya (sungai, waduk,irigasi dan tanki) dibagi Jumlah total rumah tangga dikali Seratus persen.
		Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Persen	Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah dibagi dengan jumlah total rumah tangga di kota Cilegon dikali seratus persen
		Rasio Kepatuhan Perizinan Bangunan Gedung	Persen	Jumlah bangunan yang memiliki Perizinan Bangunan Gedung dibagi Jumlah bangunan yang ada di kota cilegon dikali Seratus persen
		Rasio Tenaga Kerja Konstruksi yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	Persen	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat (operator, teknisi, analis) dibagi Jumlah tenaga kerja konstruksi yang ada wilayah kota cilegon dikali Seratus persen.
		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persen	Luas pemanfaatan lahan yang sesuai dengan peruntukan dibagi Luas total lahan kawasan budidaya dikali Seratus persen.
		Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap	Persen	Panjang jalan kota dalam kondisi baik dan sedang (km) (termasuk bangunan pelengkap) dibagi panjang seluruh jalan kota (km) dikali Seratus persen.
3.	Mewujudkan kota yang bebas banjir	Persentase Penanganan Banjir	Persen	Luas banjir atau genangan yang ditangani dibagi Luas seluruh banjir atau genangan (SK) dikali Seratus persen.

J. DINAS ...

J. DINAS PENDIDIKAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APIP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60 %, hasil 40 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Nilai Lakip Perangkat Daerah	Poin	Nilai lakip yang dinilai setiap tahun oleh APIP dengan komponen Perencanaan Kinerja 30 %, pengukuran kinerja 25 %, Pelaporan Kinerja 15 % dan Evaluasi Internal 10 % dan Capaian Kinerja 20 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
2.	Terwujudnya kualitas pendidikan yang merata	Rata-Rata pencapaian Kinerja SPM Pendidikan	Persen	(APM kesetaraan/target APM kesetaraan + APM PAUD/target APM PAUD +APM SD/target SD + APM SMP/target APM SMP)/4)*100%
		Jumlah Kurikulum Muatan Lokal yang Ditetapkan	Dokumen	Jumlah kurikulum muatan lokal pada jenjang SD ditambah jenjang SMP ditambah jenjang PAUD
		Proporsi Pendidik Yang telah lulus Sertifikasi	Persen	Jumlah pendidik jenjang PAUD, SD dan SMP yang telah bersertifikat sebagai pendidik dibagi jumlah seluruh pendidik jenjang PAUD, SD dan SMP) x 100%
		Persentase Lembaga Pendidikan yang Memiliki Izin	Persen	Jumlah sekolah PAUD, SD dan SMP yang memiliki izin dibagi jumlah seluruh sekolah PAUD, SD dan SMP) x 100%
		Tingkat Pengenalan Bahasa Daerah pada Masyarakat Usia Sekolah	Persen	(Jumlah siswa PAUD, SD dan SMP yang belajar bahasa daerah dibagi jumlah penduduk usia 5 - 15 tahun) x 100%

K. DINAS ...

K. DINAS KESEHATAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APIP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60 %, hasil 40 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Nilai Lakip Perangkat Daerah	Poin	Nilai lakip yang dinilai setiap tahun oleh APIP dengan komponen perencanaan kinerja 30 %, pengukuran kinerja 25 %, pelaporan kinerja 15 % dan Evaluasi Internal 10 % dan Capaian Kinerja 20 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Indeks Kepuasan Masyarakat (Puskesmas dan RSUD)	Poin	Berdasarkan hasil penilaian (IKM) Pelayanan Puskesmas dan RSUD yang dilakukan oleh Surveyor dengan berpedoman pada Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017. (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
2.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan individu	Rata-Rata pencapaian Kinerja SPM Kesehatan	Persen	Jumlah total nilai keseluruhan kinerja SPM Bidang Kesehatan di bagi Jumlah indikator SPM Bidang Kesehatan dikali 100 Persen

L. DINAS ...

L. DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APIP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60 %, hasil 40 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Nilai Lakip Perangkat Daerah	Poin	Nilai lakip yang dinilai setiap tahun oleh APIP dengan komponen perencanaan kinerja 30 %, pengukuran kinerja 25 %, pelaporan kinerja 15 % dan Evaluasi Internal 10 % dan Capaian Kinerja 20 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Indeks Kearsipan	Poin	Indeks Kearsipan adalah Nilai yang diperoleh dari hasil Audit Kearsipan yang dilakukan oleh Lembaga Nasional Pusat (ANRI) melali Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi kepada Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota
		Persentase Perangkat Daerah yang melakukan Penyelamatan arsip sesuai prosedur	Persen	Jumlah perangkat daerah yang melakukan penyelamatan arsip sesuai prosedur dibagi jumlah seluruh perangkat daerah dikali seratus persen
2.	Meningkatnya kompetensi literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Persen	data dan informasi tentang tingkat pembangunan literasi masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran kuantitatif atas unsur-unsur pembangun literasi masyarakat (UPLM) yang bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat (AM) dalam upaya membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat guna meningkatkan budaya literasi masyarakat.
		Jumlah Naskah Kuno yang di Akuisisi/dialih media/ digitalisasi/terdaftar yang ada diwilayah Kota Cilegon	Naskah	Jumlah Naskah Kuno yang di Akuisisi/dialih media/ digitalisasi/terdaftar yang ada diwilayah Kota Cilegon

M. DINAS ...

M. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APIP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60 %, hasil 40 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Nilai Lakip Perangkat Daerah	Poin	Nilai lakip yang dinilai setiap tahun oleh APIP dengan komponen perencanaan kinerja 30 %, pengukuran kinerja 25 %, pelaporan kinerja 15 % dan Evaluasi Internal 10 % dan Capaian Kinerja 20 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Pertumbuhan Realisasi Retribusi (OPD Penghasil)	%	$Gx = \frac{Xt - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$ *Ket :* Gx = Laju pertumbuhan Retribusi Daerah *Xt* = Realisasi Retribusi Daerah pada tahun Tertentu *X (t – 1)* = Realisasi Retribusi Daerah pada tahun Sebelumnya
		Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	Poin	Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan berpedoman pada Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
2.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	Memakai Perhitungan IKLH Kota = **(IKA × 30%) + (IKU × 30%) + (IKTL × 40%)** Ket : - Indeks Kualitas Air (IKA) - Indeks Kualitas Udara (IKU) - Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

N. DINAS ...

N. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APIP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60 %, hasil 40 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Nilai Lakip Perangkat Daerah	Poin	Nilai lakip yang dinilai setiap tahun oleh APIP dengan komponen perencanaan kinerja 30 %, pengukuran kinerja 25 %, pelaporan kinerja 15 % dan Evaluasi Internal 10 % dan Capaian Kinerja 20 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
2.	Peningkatan kualitas pembangunan dan kualitas hidup masyarakat	Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani	Persen	Persentase penanganan pengaduan yang merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap anak yang diajukan korban berada pada rentang 0 s.d. 100 Jumlah Anak korban kekerasan yang ditangani intansi terkait kota (UPTD PPA) dibagi jumlah anak yang mengalami korban kekerasan yang terlaporkan ke instansi kota dikali serratus persen
		Tingkat Pertumbuhan Alamiah Penduduk	Persen	Pertumbuhan penduduk yang diperoleh dari selisih kelahiran dan kematian Akumulasi Jumlah Kelahiran Hidup dikurangi jumlah kematian penduduk sepanjang tahun n dibagi jumlah penduduk pada awal tahun n
		Rasio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	Persen	Jumlah Perempuan yang mengalami kekerasan Per 100.000 Jumlah Penduduk Peremepuan Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan dibagi Jumlah Penduduk Perempuan x 100.000
		Presentase Pelaku Usaha Perempuan yang Meningkat Skala Usahanya	Persen	Capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan kepada pelaku usaha perempuan yang meningkat skala usahanya Jumlah pelaku usaha yang dibina di Kota Cilegon dibagi jumlah pelaku usaha perempuan yang ada x 100%

O. DINAS ...

O. DINAS SOSIAL

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APIP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60 %, hasil 40 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Nilai Lakip Perangkat Daerah	Poin	Nilai lakip yang dinilai setiap tahun oleh APIP dengan komponen perencanaan kinerja 30 %, pengukuran kinerja 25 %, pelaporan kinerja 15 % dan Evaluasi Internal 10 % dan Capaian Kinerja 20 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	Poin	Berdasarkan hasil penilaian (IKM) yang dilakukan oleh Surveyor dengan berpedoman pada Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017. (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
2.	Berkurangnya kesenjangan sosial ekonomi masyarakat	Persentase Penanganan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	Persen	Jumlah persentase jenis PPKS yang ditangani dibagi jumlah jenis PPKS Kota yang ada dikali seratus persen Formula = (∑Xi)/n Xi : Persentase PPKS jenis ke i yang ditangani n : jumlah jenis PPKS Xi = (Ri/Si) x 100% Ri : jumlah PPKS jenis ke-i yang ditangani Si : jumlah PPKS Kota jenis ke-i yang ada
3.	Meningkatnya ketangguhan bencana	Persentase Korban Bencana Alam/sosial yang Mendapatkan Perlindungan Sosial	Persen	X = Jumlah Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Y = Jumlah Korban Bencana alam dan sosial di daerah kota yang membutuhkan kebutuhan dasar/Perlindungan Sosial Indikator Kinerja = X/Y x 100%
4.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Rata-Rata Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Sesuai Standar	Persen	Rata-rata persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, RT, RW) yang Aktif (berdasarkan instrumen tertentu) dibagi Jumlah seluruh Lembaga Kemasyarakatan (LPM, RT, RW)

P. DINAS ...

P. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APIP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60 %, hasil 40 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Nilai Lakip Perangkat Daerah	Poin	Nilai lakip yang dinilai setiap tahun oleh APIP dengan komponen perencanaan kinerja 30 %, pengukuran kinerja 25 %, pelaporan kinerja 15 % dan Evaluasi Internal 10 % dan Capaian Kinerja 20 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
2.	Berkurangnya Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Luas Kawasan Kumuh yang ditangani	Persen	Luas Kawasan Kumuh yang ditangani dibagi Luas Total Kawasan Kumuh dikali seratus persen
3.	Meningkatnya Kualitas Prasarana, Sarana, dan Utilitas Permukiman	Persentase Capaian Penyediaan PSU Permukiman	Persen	Rata-rata persentase Rukun Warga (RW) yang difasilitasi oleh prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) permukiman.
4.	Penyediaan Rehabilitasi Perumahan Terdampak Bencana	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana	Persen	Jumlah Rumah tidak Layak Huni korban bencana yang ditangani (direhab) dibagi jumlah total Rumah Tidak Layak Huni Terkena Bencana dikali seratus persen

Q. DINAS ...

Q. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APIP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60 %, hasil 40 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Nilai Lakip Perangkat Daerah	Poin	Nilai lakip yang dinilai setiap tahun oleh APIP dengan komponen perencanaan kinerja 30 %, pengukuran kinerja 25 %, pelaporan kinerja 15 % dan Evaluasi Internal 10 % dan Capaian Kinerja 20 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Pertumbuhan Realisasi Retribusi (OPD Penghasil)	%	$Gx = \frac{Xt - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$ *Ket :* Gx = Laju pertumbuhan Retribusi Daerah Xt = Realisasi Retribusi Daerah pada tahun Tertentu X (t – 1) = Realisasi Retribusi Daerah pada tahun Sebelumnya
		Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	Point	Berdasarkan hasil penilaian (IKM) yang dilakukan oleh Surveyor dengan berpedoman pada Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017. (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
2.	Meningkatnya Stabilitas Pangan	Tingkat stabilitas harga pangan	%	CV = SD/M x 100% SD : standar deviasi harga pangan M : rata-rata harga pangan $STDEV = \sqrt{\frac{n\sum P_i^2 - \left(\sum P_i\right)^2}{n(n-1)}}$

R. DINAS ...

R. DINAS PERHUBUNGAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APIP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60 %, hasil 40 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Nilai Lakip Perangkat Daerah	Poin	Nilai lakip yang dinilai setiap tahun oleh APIP dengan komponen perencanaan kinerja 30 %, pengukuran kinerja 25 %, pelaporan kinerja 15 % dan Evaluasi Internal 10 % dan Capaian Kinerja 20 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	Poin	Berdasarkan hasil penilaian (IKM) yang dilakukan oleh Surveyor dengan berpedoman pada Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017. (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Transportasi Kota	Rasio Konektivitas Wilayah	Persen	trayek yang ada dibandingkan dengan jumlah angkot yang melayani seluruh trayek yang dibutuhkan di Kota Cilegon. *Jumlah angkot yang aktif melayani trayek yang ada pada kabupaten/kota* x 100% *Jumlah angkot yang melayani seluruh trayek yang dibutuhkan pada kabupaten/kota*
		Kinerja Lalu Lintas Jalan	Poin	Tingkat pelayanan ruas jalan kota, yang diklasifikasikan menjadi 6 , yaitu : Tingkat Pelayanan A sampai dengan Tingkat Pelayanan F $= \frac{volume\ lalu-lintas}{kapasitas\ jalan}$

S. DINAS ....

S. DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APIP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60 %, hasil 40 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Nilai Lakip Perangkat Daerah	Poin	Nilai lakip yang dinilai setiap tahun oleh APIP dengan komponen perencanaan kinerja 30 %, pengukuran kinerja 25 %, pelaporan kinerja 15 % dan Evaluasi Internal 10 % dan Capaian Kinerja 20 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
2.	Meningkatnya Kondusifitas Wilayah	Rata Rata Pencapaian Kinerja SPM Trantibum linmas	Persen	Pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum terhadap jumlah penegakan perda sesuai mutu - Penegakan Perda sesuai SOP; - Pelaksanaan penegakan perda sesuai dengan standar jumlah SDM Pol PP dan Linmas yang sesuai standar; dan - Pelaksanaan Penegakan Perda menggunakan Sarpras sesuai standar

T. DINAS ...

T. DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI SANDI DAN STATISTIK

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APIP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60 %, hasil 40 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Nilai Lakip Perangkat Daerah	Poin	Nilai lakip yang dinilai setiap tahun oleh APIP dengan komponen perencanaan kinerja 30 %, pengukuran kinerja 25 %, pelaporan kinerja 15 % dan Evaluasi Internal 10 % dan Capaian Kinerja 20 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
2.	Meningkatnya kualitas pemanfaatan data dan teknologi informasi	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Poin	Berdasarkan hasil Penilaian Keterbukaan Informasi Publik Pemerintahan Kabupaten/Kota Oleh Komisi Informasi Provinsi (KIP)
		Indeks SPBE	Poin	Proses penilaian dengan metode tertentu yang dilakukan oleh evaluator terhadap penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan pelayanan kepada pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha. Ada 3 domain yang dinilai yaitu : Kebijakan, tata kelola dan layanan yang terdiri dari 7 aspek yaitu : kebijakan tata kelola, kebijakan layanan, kelembagaan, strategi dan perencanaan, TIK, layanan administrasi pemerintahan, layanan publik
		Tingkat Kepuasan Pelayanan Statistik Sektoral	Persen	Berdasarkan hasil penilaian (IKM) yang dilakukan oleh Surveyor dengan berpedoman pada Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017. (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Persentase Layanan Keamanan Informasi	Persen	Jumlah layanan keamanan informasi dibagi dengan jumlah penerapan Standar manajemen Keamanan Informasi dikalikan 100%

U. DINAS ...

U. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APIP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60 %, hasil 40 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Nilai Lakip Perangkat Daerah	Poin	Nilai lakip yang dinilai setiap tahun oleh APIP dengan komponen perencanaan kinerja 30 %, pengukuran kinerja 25 %, pelaporan kinerja 15 % dan Evaluasi Internal 10 % dan Capaian Kinerja 20 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	Poin	Berdasarkan hasil penilaian (IKM) yang dilakukan oleh Surveyor dengan berpedoman pada Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017. (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
2.	Meningkatnya tata kelola Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase Kepemilikan dokumen Pendaftaran Penduduk	Persen	Rata-rata persentase kepemilikan dokumen Pendaftaran Penduduk yaitu Cakupan KK, KTP-el, Kartu Identitas Anak (KIA), Surat Keterangan Pindah Keluar Kota Cilegon, Surat Keterangan Tempat Tinggal
		Persentase Kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil	Persen	Rata-rata persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil yaitu cakupan akta kelahiran usia 0-17 tahun, akta kematian, akta perkawinan, dan akta perceraian
		Persentase Validitas Data Kependudukan	Persen	Jumlah Data bermasalah yang Terverifikasi dibagi jumlah Data Bermasalah
		Persentase Ketersediaan Data Profil Kependudukan	Persen	Jumlah jenis data profil yang tersedia dibagi dengan jumlah jenis data yang seharusnya tersedia

V. DINAS ...

V. DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APIP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60 %, hasil 40 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Nilai Lakip Perangkat Daerah	Poin	Nilai lakip yang dinilai setiap tahun oleh APIP dengan komponen perencanaan kinerja 30 %, pengukuran kinerja 25 %, pelaporan kinerja 15 % dan Evaluasi Internal 10 % dan Capaian Kinerja 20 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Pertumbuhan Realisasi Retribusi (OPD Penghasil)	Persen	$Gx = \frac{Xt - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$ *Ket :* *Gx* = Laju pertumbuhan Retribusi Daerah *Xt* = Realisasi Retribusi Daerah pada tahun Tertentu *X (t – 1)* = Realisasi Retribusi Daerah pada tahun Sebelumnya
2.	Meningkatnya kualitas penanganan bencana kebakaran dan penyelamatan	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi dalam tingkat waktu tanggap	Persen	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota pada tahun n dalam tingkat waktu tanggap (response time) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dibagi Jumlah kejadian kebakaran dikalikan 100%
		Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi oleh BALAKAR dalam tingkat waktu tanggap	Persen	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota pada tahun n dalam tingkat waktu tanggap (response time) oleh BALAKAR dibagi Jumlah kejadian kebakaran dikalikan 100%
		Persentase layanan penyelamatan, dan evakuasi kejadian non kebakaran	Persen	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) yang terlayani oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dibagi jumlah kejadian penyelamatan dan evakuasi dikalikan 100%

W. DINAS ...

W. DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APIP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60 %, hasil 40 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Nilai Lakip Perangkat Daerah	Poin	Nilai lakip yang dinilai setiap tahun oleh APIP dengan komponen perencanaan kinerja 30 %, pengukuran kinerja 25 %, pelaporan kinerja 15 % dan Evaluasi Internal 10 % dan Capaian Kinerja 20 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
2.	Meningkatkan Pelestarian Budaya dan Destinasi Pariwisata	Persentase realisasi destinasi wisata	Persen	Progres pembangunan destinasi pariwisata dihitung secara akumulatif : - Tahun ke-1 asumsi pembobotan progres pembangunan sebesar 17% - Tahun ke-2 asumsi pembobotan progres pembangunan sebesar 58 % - Tahun ke-3 asumsi pembobotan progres pembangunan sebesar 71% - Tahun ke-4 asumsi pembobotan progres pembangunan sebesar 80% - Tahun ke-5 asumsi pembobotan progres pembangunan sebesar 100%
		Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	Jumlah kunjungan wisatawan pada tahun berjalan yang meliputi kunjungan pada hotel, restoran wisata tirta (kolam renang), wisata agro dan wisata lainnya.
		Persentase SDM kepariwisataan ekonomi kreatif yang bersertifikat	Persen	(Jumlah sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikat dibagi jumlah sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang ada) x 100%
		Jumlah even kebudayaan yang diselenggarakan	Even	Jumlah event kebudayaan yang diselenggarakan pada tahun berjalan
		Persentase kelompok pelaku kesenian tradisional yang dibina	Persen	(Jumlah kelompok pelaku kesenian tradisional yang dibina dibagi Jumlah kelompok pelaku kesenian tradisional yang ditargetkan ditahun n) x 100%
		Persentase kajian sejarah yang dilakukan/jumlah kesejarahan yang ada	Persen	(Jumlah kajian sejarah yang dilakukan dibagi Jumlah kesejarahan yang ditargetkan ditahun n) x 100%
		Persentase penetapan cagar budaya	Persen	(Jumlah cagar budaya yang ditetapkan dalam SK dibagi Jumlah cagar budaya yang dikaji) x 100%
		Progres pembangunan museum Daerah	Persen	Progres pembangunan museum daerah dihitung secara akumulatif : - Tahun ke-1 asumsi pembobotan progres pembangunan sebesar 10% - Tahun ke-2 asumsi pembobotan progres pembangunan sebesar 20 % - Tahun ke-3 asumsi pembobotan progres pembangunan sebesar 60% - Tahun ke-4 asumsi pembobotan progres pembangunan sebesar 100%

X. DINAS ...

X. DINAS KOPERASI DAN UKM

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APIP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60 %, hasil 40 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Nilai Lakip Perangkat Daerah	Poin	Nilai lakip yang dinilai setiap tahun oleh APIP dengan komponen perencanaan kinerja 30 %, pengukuran kinerja 25 %, pelaporan kinerja 15 % dan Evaluasi Internal 10 % dan Capaian Kinerja 20 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	Poin	Berdasarkan hasil penilaian (IKM) yang dilakukan oleh Surveyor dengan berpedoman pada Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017. (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
2.	Meningkatnya kesempatan kerja masyarakat	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Persen	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi menjadi wirausaha dibagi jumlah usaha mikro yang difasilitasi dikali seratus persen

Y. DINAS ...

Y. DINAS TENAGA KERJA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APIP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60 %, hasil 40 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Nilai Lakip Perangkat Daerah	Poin	Nilai lakip yang dinilai setiap tahun oleh APIP dengan komponen perencanaan kinerja 30 %, pengukuran kinerja 25 %, pelaporan kinerja 15 % dan Evaluasi Internal 10 % dan Capaian Kinerja 20 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	Poin	Berdasarkan hasil penilaian (IKM) yang dilakukan oleh Surveyor dengan berpedoman pada Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017. (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Pertumbuhan Realisasi Retribusi	Persen	$Gx = \frac{Xt - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$ *Ket :* Gx = Laju pertumbuhan Retribusi Daerah Xt = Realisasi Retribusi Daerah pada tahun Tertentu $X(t-1)$ = Realisasi Retribusi Daerah pada tahun Sebelumnya
2.	Meningkatnya kesempatan kerja masyarakat	Tingkat Penempatan Tenaga Kerja	Persen	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan/magang dibagi Jumlah pencari kerja yang terdaftar

Z. DINAS ...

Z. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APIP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60%, hasil 40% (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Nilai Lakip Perangkat Daerah	Poin	Nilai lakip yang dinilai setiap tahun oleh APIP dengan komponen perencanaan kinerja 30 %, pengukuran kinerja 25 %, pelaporan kinerja 15 % dan Evaluasi Internal 10 % dan Capaian Kinerja 20 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Pertumbuhan Realisasi Retribusi	Persen	$Gx = \frac{Xt - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$ *Ket :* Gx = Laju pertumbuhan Retribusi Daerah Xt = Realisasi Retribusi Daerah pada tahun Tertentu $X(t-1)$ = Realisasi Retribusi Daerah pada tahun Sebelumnya
2.	Meningkatnya peran perindustrian terhadap perluasan lapangan kerja	Persentase terselesaikannya Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persen	Realisasi rencana pembangunan industry kota (RPIK) tahun n dibagi Target pembangunan tahun n dikali seratus persen
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan Industri kecil menengah	Persen	Jumlah Industri kecil menengah yang memiliki kesesuaian dokumen ijin usaha berdasarkan hasil pemantauan dan pengawasan dibagi jumlah industri kecil menengah yang diterbitkan ijin usaha dikali seratus persen.
		Persentase IKM yang terdata dalam Sistem Informasi Industri Nasional	Persen	Jumlah Industri Kecil dan Menengah tahun n yang terdata dalam SIINAS dibagi Jumlah Industri Kecil dan Menengah Tahun n

NO ...

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
3.	Meningkatnya Fasilitasi Perdagangan	Persentase Pasar Rakyat yang Sesuai Standar	Persen	Rata-Rata progres pasar rakyat yang direvitalisasi untuk ber-SNI
		Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	Persen	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin dan pendaftaran sesuai dengan ketentuan / Jumlah pelaku usaha di Kota Cilegon x 100% (jml pelaku usaha:toko modern+swalayan+pelaku usaha yg memiliki TDG)
4.	Terwujudnya stabilitas harga bahan pokok	Tingkat stabilitas harga bahan pokok	Persen	Rata-rata koefisien variasi harga bahan pokok (10 komoditas diluar beras). Formula : (CV1 + CV2 + CV3 + ... + CV10)/10 CVi = SDi / Mi X 100% CV : koefisien variasi SD : standar deviasi M : mean/rata-rata I : komoditas ke-i , i = 1,2,3,....,10

AA. DINAS ...

AA. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APIP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60%, hasil 40% (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Nilai Lakip Perangkat Daerah	Poin	Nilai lakip yang dinilai setiap tahun oleh APIP dengan komponen perencanaan kinerja 30 %, pengukuran kinerja 25 %, pelaporan kinerja 15 % dan Evaluasi Internal 10 % dan Capaian Kinerja 20 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	Berdasarkan hasil penilaian (IKM) yang dilakukan oleh Surveyor dengan berpedoman pada Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017. (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
2.	Meningkatnya investasi daerah	Realisasi Investasi	Triliun	Realisasi Investasi PMA + Realisasi PMDN Pada Tahun n (dalam Rupiah) Ket. Data rilis dari BKPM

BB. DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APIP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60%, hasil 40% (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Nilai Lakip Perangkat Daerah	Poin	Nilai lakip yang dinilai setiap tahun oleh APIP dengan komponen perencanaan kinerja 30 %, pengukuran kinerja 25 %, pelaporan kinerja 15 % dan Evaluasi Internal 10 % dan Capaian Kinerja 20 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
2.	Meningkatnya kualitas pembangunan pemuda dan olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	Jumlah pemuda (usia 16-30 tahun) yang berwirausaha x 100% Jumlah pemuda yang ada di kota Ket. - Definisi pemuda Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan; - Data jumlah pemuda wirausaha dari perangkat daerah yang membidangi Usaha Mikro Kecil; dan Data jumlah pemuda dari perangkat daerah yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil.
		Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Persen	Jumlah organisasi pemuda yang aktif x 100% Jumlah seluruh organisasi pemuda
		Tingkat Prestasi Olahraga	Persen	Jumlah jenis pertandingan olahraga yang berprestasi di tingkat Provins x 100% Jumlah jenis pertandingan olahraga yang diikuti di tingkat Provinsi
		Persentase Anggota Pramuka yang Aktif	Persen	Jumlah anggota pramuka yang aktif x 100 % Jumlah anggota pramuka yang terdaftar

CC. KECAMATAN ...

CC. KECAMATAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APIP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60%, hasil 40% (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Nilai Lakip Perangkat Daerah	Poin	Nilai lakip yang dinilai setiap tahun oleh APIP dengan komponen perencanaan kinerja 30 %, pengukuran kinerja 25 %, pelaporan kinerja 15 % dan Evaluasi Internal 10 % dan Capaian Kinerja 20 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Indeks Kepuasan Masyarakat (Kecamatan)	Poin	Berdasarkan hasil penilaian (IKM) yang dilakukan oleh Surveyor dengan berpedoman pada Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017. (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
2.	Mewujudkan Ketangguhan Bencana, Kondusifitas Wilayah, Kerukunan Umat Beragama dan Nilai-nilai Luhur Keagamaan	Tingkat pengetahuan dan pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan, karakter bangsa dan bela negara	Persen	**Rumus = X/Y x 100%** X= Jumlah peserta yang mendapatkan nilai post test >=70 dari nilai maksimal 100 (satuan nya : orang) pada kegiatan sosialisasi/bintek tentang ideologi dan wasbang, karakter x100% Y = Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialiasi/bintek Tentang ideologi dan wasbang, karakter bangsa dan bela negara
		Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani	Persen	**Rumus = X/Y x 100%** Jumlah gangguan trantibum yang dapat ditangani (kasus) x 100% Jumlah gangguang trantibum yang terjadi (kasus)
3.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan	Persen	**Rumus = (∑Xi)/n x 100%** Xi = Jumlah swadaya masyarakat di kelurahan baik terkait fisik ataupun non fisik di tahun ybs (Rp) terhadap total anggaran dana lingkungan (Rp) x 100% n = Kelurahan

WALI KOTA CILEGON

HELLDY AGUSTIAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntable serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. H. NIKMATULLAH, M.Si**

Jabatan : **KEPALA PELAKSANA BPBD KOTA CILEGON**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. HELLDY AGUSTIAN, SE., SH., MH.**

Jabatan : **WALIKOTA CILEGON**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cilegon, 15 November 2021

Pihak Kedua,

H. HELLDY AGUSTIAN, SE., SH., MH.

Pihak Pertama,

Drs. H. NIKMATULLAH, M.Si

NIP: 196307041984101011

Dipindai dengan CamScanner

SATUAN KERJA : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan Profesionalitas Aparatur	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	Poin	79
		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	42
2	Meningkatnya Ketahanggulan Bencana	Persentase Masyarakat Di Wilayah Rawan Bencana Yang Mendapatkan Informasi Kebencanaan	%	100
		Persentase Masyarakat Di Wilayah Rawan Bencana Yang Mendapatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	%	100
		Persentase Masyarakat Di Wilayah Rawan Bencana Yang Mendapatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100

	Urusan / Program	Anggaran
A	**Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**	**18.922.401.119,00**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	8.691.254.840,00
2.	Program Penanggulangan Bencana	10.231.146.279,00
	Total Jumlah Anggaran : Rp.	**18.922.401.119,00**

Walikota

H. HELLDY AGUSTIAN, SE., SH., MH.

Kepala Pelaksana BPBD
Kota Cilegon

Drs. H. NAKMATULLAH, M.Si

NIP. 196307041984101011

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntable serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. LILIT BASUKI, MM**

Jabatan : **SEKRETARIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. H. NIKMATULLAH, M.Si**

Jabatan : **KEPALA PELAKSANA BPBD KOTA CILEGON**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cilegon, 15 November 2021

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
Drs. H. NIKMATULLAH, M.Si	**Drs.LILIT BASUKI, MM**
NIP: 196307041984101011	**NIP: 196508011992031021**

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya nilai Lakip PD	Terpenuhinya Keg.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	%	100
2		Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100
3		Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada PD	%	100
4		Terlaksananya Administrasi Umum PD	%	100
5		Terlaksananya Pengadaan BMD Penunjang Urusan PD	%	100
6		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan PD	%	100
7		Terpeliharanya BMD Penunjang Urusan PD	%	100
8	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawean PD	%	100

Urusan / Program/Kegiatan	Anggaran
A Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	8.691.254.840,00
- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	52.785.386,00
- Kegiatan Administrasi Keuangan PD	5.587.133.935,00
- Kegiatan Administrasi BMD pada PD	18.000.000,00
- Kegiatan Administrasi Umum PD	705.822.089,00
- Kegiatan Pengadaan BMD Penunjang Urusan PD	47.314.152,00
- Kegiatan Jasa Penunjang Urusan PD	1.819.507.280,00
- Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	463.041.998,00
- Kegiatan Administrasi Kepegawean PD	197.550.000,00
TOTAL JUMLAH ANGGARAN Rp.	**8.691.254.840,00**

Kepala Pelaksana BPBD Kota Cilegon

Drs. H. NIKMATULLAH, M.Si

NIP: 196307041984101011

Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Drs.LILIT BASUKI, MM

NIP: 196508011992031021

Digitized dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntable serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **UTANG SUTARDI, S.Sos.**

Jabatan : **Plt. KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. H. NIKMATULLAH, M.Si**

Jabatan : **KEPALA PELAKSANA BPBD KOTA CILEGON**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cilegon, 15 November 2021

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
Drs. H. NIKMATULLAH, M.Si	**UTANG SUTARDI, S.Sos.**
NIP: 196307041984101011	**NIP: 196809272008011009**

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota	Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, informasi dan Edukasi Rawan Bencana Kab/Kota	Kegiatan	1
2	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	a. Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kab/Kota	Kegiatan	1
		b. Terlaksananya Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan		
3	Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Kab/Kota (Fasilitasi ISMAN dan Kesekretariatan Gugus Tugas COVID 19)	Kegiatan	2

Urusan / Program/ Kegiatan	Anggaran
A Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	
1. Program Penanggulangan Bencana	**9.546.545.160,00**
- Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana kab/kota	74.998.000,00
- Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	356.464.260,00
- Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	9.115.082.900,00
TOTAL JUMAH ANGGARAN Rp.	**9.546.545.160,00**

Kepala Pelaksana BPBD Kota Cilegon

Drs. H. NIKMATULLAH, M.Si
NIP: 196307041984101011

Plt. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

UTANG SUTARDI, S.Sos.
NIP: 196301081996031001

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntable serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H.AHMAD MAFRUH, S.Ag, MM**

Jabatan : **KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. H. NIKMATULLAH, M.Si**

Jabatan : **KEPALA PELAKSANA BPBD KOTA CILEGON**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cilegon, 15 November 2021

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
Drs. H. NIKMATULLAH, M.Si	**H.AHMAD MAFRUH, S.Ag, MM**
NIP: 196307041984101011	**NIP: 197610122002121007**

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Terlaksananya Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kab/Kota	Kegiatan	1
2	Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	a. Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Kab/Kota (Operasional Tanggap Darurat)	Kegiatan	1
		b. Tersedianya Logistik Penyelamata dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota	Kegiatan	1

Urusan / Program/ Kegiatan	Anggaran
A Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	
1. Program Penanggulangan Bencana	**540.961.769,00**
- Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	17.257.967,00
- Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	523.703.802,00
TOTAL JUMLAH ANGGARAN Rp.	**540.961.769,00**

Kepala Pelaksana BPBD Kota Cilegon

Drs. H. NIKMATULLAH, M.Si
NIP: 196307041984101011

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

H.AHMAD MAFRUH, S.Ag, MM
NIP: 197610122002121007

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntable serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUDARSONO, S.Sos**

Jabatan : **KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. H. NIKMATULLAH, M.Si**

Jabatan : **KEPALA PELAKSANA BPBD KOTA CILEGON**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cilegon, 15 November 2021

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
Drs. H. NIKMATULLAH, M.Si	**SUDARSONO, S.Sos**
NIP: 196307041984101011	**NIP: 196401281985091001**

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Terlaksananya Penanganan Pasca Bencana Kab/Kota	1	Kegiatan

Urusan / Program/ Kegiatan	Anggaran
A Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	
1. Program Penanggulangan Bencana	**143.639.350,00**
- Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	143.639.350,00
TOTAL JUMAH ANGGARAN Rp.	**143.639.350,00**

Kepala Pelaksana BPBD Kota Cilegon

Drs. H. NIKMATULLAH, M.Si
NIP. 196307041984101011

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

SUDARSONO, S.Sos
NIP: 196401281985091001

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntable serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **UMU ATIYAH, S.I.P, M.Si**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs.LILIT BASUKI, MM**

Jabatan : **SEKRETARIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cilegon, 15 November 2021

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Drs.LILIT BASUKI, MM	UMU ATIYAH, S.I.P, M.Si
NIP: 196508011992031021	NIP: 197503052002122001

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Dukungan Pelayanan Pemerintahan	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	unit	3
		Tersedianya Mebel	unit	10
		Terpeliharanya Gedung kantor	Unit	1
		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jenis	8
		Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	unit	3
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Orang	65
		Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	Jenis	5
		Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan	12
		Tersedianya peralatan RT	Jenis	9
		Terlaksananya rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Bulan	12
		tersedianya bahan bacaan dan peraturan Per UU	jenis	6
		Tersedianya makan dan minum tamu	Orang	100
		Tersedianya jasa surat menyurat	jenis	2
		Tersedianya jasa komuikasi SDA dan Listrik	bulan	12
		Terpenuhinya jasa Peleayanan umum kantor	bulan	12
		Terpeliharanya dan perijinan rutin/berkala kendaraan	Unit	23
		Terpenuhinya Penatausahaan BMD pada SKPD	Orang	3
		Terpeliharanya rutin/berkala Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas	Unit	24

Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	**3.051.335.519,00**
1 Kegiatan Administrasi Kepegawaian PD	**197.650.000,00**
a Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	197.650.000,00
2 Kegiatan Administrasi Umum PD	**705.822.089,00**
a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	9.226.496,00
b Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	302.061.129,00
c Penyediaan Peralatan RT	30.507.488,00
d Penyediaan Bahan Logistik Kantor	139.792.974,00
e Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	50.950.000,00
f Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perUU	28.776.000,00
g Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.840.000,00
h Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	136.668.000,00
3 Kegiatan Administrasi BMD pada PD	**18.000.000,00**
a Penatausahaan BMD pada PD	18.000.000,00

Diprediksi dengan CamScanner

4	**Kegiatan Pengadaan BMD pada penunjang urusan Pemerintahan Daerah**	**47.314.152,00**
a	Pengadaan Mebel	12.406.359,00
b	Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya	34.907.793,00
5	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.619.507.280,00**
a	Pengadaan Jasa surat menyurat	6.000.000,00
b	Penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik	240.245.023,00
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.373.262.257,00
6	**Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD**	**463.041.998,00**
a.	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	365.782.201,00
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	48.797.000,00
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	48.462.797,00
	TOTAL JUMLAH ANGGARAN Rp.	**3.051.335.519,00**

Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Drs.LILIT BASUKI, MM
NIP: 196508011992031021

Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian

UMU ATIYAH, S.I.P, M.Si
NIP: 197503052002122001

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntable serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **E. MILA CANDRAYANI, S.I.P., MM**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs.LILIT BASUKI, MM**

Jabatan : **SEKRETARIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cilegon, 15 November 2021

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
Drs.LILIT BASUKI, MM	**E. MILA CANDRAYANI, S.I.P., MM**
NIP: 196508011992031021	**NIP: 197412252003122005**

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dok. Evaluasi dan Pelaporan Data Pembangunan Sektoral	Dokumen	2
2		Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	3
3		Jumlah Dokumen Evaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	3
4		Jumlah Dokumen RKA	Dokumen	1
5		Jumlah Dokumen Perubahan RKA	Dokumen	1
6		Jumlah Dokumen DPA	Dokumen	1
7		Jumlah Dokumen Perubahan DPA	Dokumen	1

Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	**52.785.386,00**
1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	**52.785.386,00**
a Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	8.395.290,00
b Koordinas dan Penyusunan Dok. RKA-SKPD	2.498.000,00
c Koordinas dan Penyusunan Dok. Perubahan RKA-SKPD	2.000.000,00
d Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	2.999.732,00
e Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.499.000,00
f Koordinasi dan penyusunan Lap.Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.897.624,00
g Evaluasi kinerja PD	8.495.740,00
TOTAL JUMAH ANGGARAN Rp.	**52.785.386,00**

Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Drs.LILIT BASUKI, MM
NIP: 196508011992031021

Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi

E. MILA CANDRAYANI, S.I.P., MM
NIP: 197412252003122005

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntable serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **EHA NURSOLEHA, SE**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs.LILIT BASUKI, MM**

Jabatan : **SEKRETARIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cilegon, 15 November 2021

Pihak Kedua,

Drs.LILIT BASUKI, MM
NIP: 196508011992031021

Pihak Pertama,

EHA NURSOLEHA, SE
NIP: 196804072008012006

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Keuangan	Jumlah Orang dan Bulan yang terpenuhi gajinya	Bulan	12
2		Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	Dokumen	3
3		Jumlah orang yang melaksanakan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	orang	3

Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	**5.587.133.935,00**
1 Kegiatan Administrasi Keuangan PD	**5.587.133.935,00**
a Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	5.527.524.021,00
b Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan/Triwulaan/Semesteran SKPD	12.449.914,00
c Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	47.160.000,00
TOTAL JUMAH ANGGARAN Rp.	**5.587.133.935,00**

Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Drs.LILIT BASUKI, MM
NIP: 196508011992031021

Kepala Sub Bagian Keuangan

EHA NURSOLEHA, SE
NIP: 196804072008012006

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntable serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **UTANG SUTARDI, S.Sos**

Jabatan : **KEPALA SEKSI PENCEGAHAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **UTANG SUTARDI, S.Sos.**

Jabatan : **Plt. KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cilegon, 15 November 2021

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
UTANG SUTARDI, S.Sos.	**UTANG SUTARDI, S.Sos**
NIP: 196809272008011009	**NIP: 196809272008011009**

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Pelayanan Pencegahan Bencana	Tersedianya Dokumen Kajian Risiko Bencana	Dokumen	0
2		Terlaksananya Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana	Kegiatan	1
3		Tercapainya kemampuan tentang kebencanaan	Orang	44
4		Terlaksananya FGD Forum PRB	Orang	40
5	Meningkatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terfasilitasinya isolasi mandiri Covid 19 dan Penanganan Covid 19 pada Satgas Kota Cilegon	Kegiatan	2

Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
Program Penanggulangan Bencana	**9.546.545.160,00**
1 Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota	**74.998.000,00**
a Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kab/Kota	0,00
b Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan bencana kab/kota	74.998.000,00
2 Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	**356.464.260,00**
a. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kab/Kota	47.144.026,00
b Penguatan Kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	309.320.234,00
3 Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	**9.115.082.900,00**
a. Respon Cepat Darurat Bencana Kab/Kota	9.115.082.900,00
TOTAL JUMAH ANGGARAN Rp.	**9.546.545.160,00**

Plt. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

UTANG SUTARDI, S.Sos.
NIP: 196301081996031001

Kepala Seksi Pencegahan

UTANG SUTARDI, S.Sos
NIP: 196809272008011009

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntable serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ADRIAN IBNUDIN,SE, M.Si**

Jabatan : **KEPALA SEKSI KESIAPSIAGAAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **UTANG SUTARDI, S.Sos.**

Jabatan : **Plt. KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cilegon, 15 November 2021

Pihak Kedua,

UTANG SUTARDI, S.Sos.
NIP: 196809272008011009

Pihak Pertama,

ADRIAN IBNUDIN, SE, M.Si
NIP: 197905022002121005

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Pelayanan Kesiapsiagaan Bencana	a. Tersedianya Sistem Peralatan Pusdalops PB	Unit	0
		b. Tercapainya Apel Siaga Bencana	Orang	180
		c. Terlaksananya Pengamanan Hari Raya PHBI/PHBN	Orang	20

Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
Program Penanggulangan Bencana	**309.320.234,00**
1 Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	**309.320.234,00**
a. Penguatan Kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	309.320.234,00
TOTAL JUMAH ANGGARAN Rp.	**309.320.234,00**

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

UTANG SUTARDI, S.Sos.
NIP. 196809272008011009

Kepala Seksi Kesiapsiagaan

ADRIAN PRIJONO, SE., M.Si
NIP. 197908012002121005

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntable serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SIDIK, SE, M.Si**

Jabatan : **KEPALA SEKSI TANGGAP DARURAT**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H.AHMAD MAFRUH, S.Ag, .,MM**

Jabatan : **KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cilegon, 15 November 2021

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
H.AHMAD MAFRUH, S.Ag, .,MM	**SIDIK, SE, M.Si**
NIP: 197610122002121007	**NIP: 196502012003121001**

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Penanganan Bencana	Terpenuhinya pelayanan tanggap darurat bencana	Tahun	1
2		Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM PB	Orang	33

Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
Program Penanggulangan Bencana	**290.515.825,00**
1 Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	**17.257.967,00**
a Pengembangan Kapasitas TRC Bencana Kab/Kota	17.257.967,00
2 Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	**273.257.858,00**
b Respon Cepat Darurat Bencana Kab/Kota	273.257.858,00
TOTAL JUMAH ANGGARAN Rp.	**290.515.825,00**

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

HAHMAD MAFRUH, S.Ag, MM
NIP: 197610122002121007

Kepala Seksi Tanggap Darurat

SIDIK, SE, M.Si
NIP: 196502012003121001

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntable serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AGUSCI, SH**

Jabatan : **KEPALA SEKSI LOGISTIK**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H.AHMAD MAFRUH, S.Ag, MM**

Jabatan : **KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah diletapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cilegon, 15 November 2021

Pihak Kedua,

H.AHMAD MAFRUH, S.Ag, MM
NIP: 197610122002121007

Pihak Pertama,

AGUSCI, SH
NIP: 197108102007011011

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Penanganan Logistik	a. Terlaksananya keg. Operasional pendistribusian logistik kebencanaanasan	Tahun	1
		b. Terlaksananya kegiatan penyediaan dukungan logistik dan peralatan kebencanaan	Tahun	1

Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
Program Penanggulangan Bencana	**250.427.944,00**
1 Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	**250.427.944,00**
a Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota	250.427.944,00
TOTAL JUMAH ANGGARAN Rp.	**250.427.944,00**

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

H.AHMAD MAFRUH, S.Ag, ,MM
NIP: 197610122002121007

Kepala Seksi Logistik

AGUSCI, SH
NIP: 197108102007011011

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntable serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ANRY SETIAWAN, SE, MM**

Jabatan : **KEPALA SEKSI REKONSTRUKSI**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SUDARSONO, S.Sos**

Jabatan : **KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cilegon, 15 November 2021

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
SUDARSONO, S.Sos	**ANRY SETIAWAN, SE, MM**
NIP: 196401281985091001	**NIP: 197701242002121005**

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Penanganan Rekonstruksi Pasca Bencana	Terlaksaya Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Penanganan Rekonstruksi Pasca Bencana	Kegiatan	3

Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
Program Penanggulangan Bencana	**143.639.350,00**
1 Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	**143.639.350,00**
a Penanganan Pascabencana Kab/Kota	143.639.350,00
TOTAL JUMAH ANGGARAN Rp.	**143.639.350,00**

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

SUDARSONO, S.Sos
NIP: 196401261985091001

Kepala Seksi Rekonstruksi

ANRY SETIAWAN, SE, MM
NIP: 197701242002121005

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntable serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **PUTRI HANNY ZAMANI, ST**

Jabatan : **KEPALA SEKSI REHABILITASI**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SUDARSONO, S.Sos**

Jabatan : **KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cilegon, 15 November 2021

Pihak Kedua,

SUDARSONO, S.Sos
NIP: 196401281985091001

Pihak Pertama,

PUTRI HANNY ZAMANI, ST
NIP: 198206252006042015

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Penanganan Rehabilitasi Pasca Bencana	a. Terlaksananya Rapat Koordinasi Penanganan Rehabilitasi Pasca Bencana	Kegiatan	4
		b. Terlaksanya survey/monitoring koordinasi penanganan rehabilitasi pasca Bencana	kali	64

Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
Program Penanggulangan Bencana	**143.639.350,00**
1 Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	**143.639.350,00**
a Penanganan Pascabencana Kab/Kota	143.639.350,00
TOTAL JUMAH ANGGARAN Rp.	**143.639.350,00**
TOTAL JUMAH ANGGARAN Rp.	**143.639.350,00**

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

SUDARSONO, S.Sos
NIP: 196401281985091001

Kepala Seksi Rehabilitasi

PUTRI HANNY ZAMANI, ST
NIP: 198206252006042015

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntable serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ROSILAWATI**

Jabatan : **FUNGSIONAL UMUM**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **UMU ATIYAH, S.I.P, M.Si**

Jabatan : **KEPALA SUB BAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencansan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cilegon, 15 November 2021

Pihak Kedua,

UMU ATIYAH, S.I.P, M.Si
NIP: 197503052002122001

Pihak Pertama,

ROSILAWATI
NIP: 198303062009012001

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Membantu Meningkatnya Administrasi Umum dan Penunjang Urusan	Jumlah Pengadministrasian Penerimaan, pencatatan dan penyortiran surat masuk dan surat keluar	Dokumen	1
		Jumlah Pengadministrasian SK	Dokumen	1
		Jumlah Pengadministrasian Surat Pertanggungjawaban Kegiatan	Kegiatan	22
		Jumlah Dokumentasi Kegiatan	Kegiatan	22
		Jumlah Laporan Kegiatan	Kegiatan	22

Kepala Sub Bag Umum dan Kepegawalan

UMU ATIYAH, S.I.P, M.Si
NIP: 197503052002122001

Fungsional Umum

ROSILAWATI
NIP: 198303062009012001

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntable serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YUDHA EKA PRASETYANDA UFIANTO HERLAMBANG**

Jabatan : **FUNGSIONAL UMUM/PENGURUS BARANG**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **UMU ATIYAH, S.I.P, M.Si**

Jabatan : **KEPALA SUB BAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cilegon, 15 November 2021

Pihak Kedua,

UMU ATIYAH, S.I.P, M.Si
NIP: 197503052002122001

Pihak Pertama,

YUDHA EKA PRASETYANDA UFIANTO HERLAMBANG
NIP: 19820816 201001 1 014

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Membantu Meningkatnya Administrasi, Pengadaan dan Pemeliharaan BMD	Jumlah Pengadministrasian laporan aset tetap Bulanan (KIB)	Dokumen	1
		Jumlah Pengadministrasian laporan aset tetap Triwulanan (KIB)	Dokumen	1
		Jumlah Pengadministrasian Laporan Pemeliharaan Aset	Dokumen	1
		Jumlah Pengadministrasian Buku Barang	Dokumen	1
		Jumlah Pengadministrasian BA. Stock Opname	Dokumen	1

Kepala Sub Bag Umum dan Kepegawaian

UMU ATIYAH, S.I.P, M.Si
NIP: 197503052002122001

Fungsional Umum/Pengurus Barang

YUDHA EKA PRASETYAWDA UTJANTO HERLAMBANG
NIP: 198208162010011014

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntable serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BUDI AMRIH RAHAYU, ST**

Jabatan : **FUNGSIONAL UMUM**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **UMU ATIYAH, S.I.P, M.Si**

Jabatan : **KEPALA SUB BAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cilegon, 15 November 2021

Pihak Kedua,

UMU ATIYAH, S.I.P, M.Si
NIP: 197503052002122001

Pihak Pertama,

BUDI AMRIH RAHAYU, ST
NIP: 198509102009022001

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Membantu Meningkatnya Administrasi Kepegawean	Jumlah Pengadministrasian Daftar Nominatif Pegawai dan Daftar Urut Kepangkatan	Dokumen	1
		Jumlah Pengadministrasian Data Usulan Kebutuhan Pegawai	Dokumen	1
		Jumlah Pengadministrasian Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan serta Standar	Dokumen	1
		Jumlah Pengadministrasian Laporan Absen Bulanan Pegawai	Dokumen	1
		Jumlah Pengadministrasian Data usulan Kenaikan Gaji Berkala	Dokumen	1
		Jumlah Pengadministrasian Data Kepemilikan TASPEN, KARPEG, KARSU/KARIS.	Dokumen	1
		Jumlah Pengadministrasian Data usulan Kenaikan Pangkat	Dokumen	1
		Jumlah Pengadministrasian Data usulan Cuti	Dokumen	1

Kepala Sub Bag Umum dan Kepegawaian

UMU ATIYAH, S.I.P, M.Si
NIP: 197503052002122001

Fungsional Umum

BUDI AMRIH RAHAYU, ST
NIP: 198509102009022001

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntable serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WAYARANI FATATUNNAJAH, SE**

Jabatan : **FUNGSIONAL UMUM**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **E. MILA CANDRAYANI, S.IP, MM**

Jabatan : **KEPALA SUB BAG PROGRAM DAN EVALUASI**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cilegon, 15 November 2021

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
E. MILA CANDRAYANI, S.I.P., MM	**WAYARANI FATATUNNAJAH, SE**
NIP: 197412252003122005	**NIP: 198103272010012006**

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Membantu Melaksanakan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Pengadministrasian Makan Minum kegiatan penyusunan dok. Perencanaan OPD	Dokumen	1
		Jumlah Pengadministrasian ATK kegiatan penyusunan dok. Perencanaan OPD	Dokumen	1
		Jumlah Pengadministrasian Cetak dan Penggandaan kegiatan penyusunan dok. Perencanaan OPD	Dokumen	1
		Jumlah SK Keg. penyusunan dok. Perencanaan OPD	Dokumen	1
		Jumlah Laporan Keg. penyusunan dok. Perencanaan OPD	Dokumen	1
		Jumlah Pengadministrasian Makan Minum kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1
		Jumlah Pengadministrasian ATK kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1
		Jumlah Pengadministrasian Cetak dan Penggandaan kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1
		Jumlah SK Keg. Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1
		Jumlah Laporan Keg. Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1
		Jumlah Pengadministrasian Makan Minum kegiatan Pelaporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1
		Jumlah Pengadministrasian ATK kegiatan Pelaporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1
		Jumlah Pengadministrasian Cetak dan Penggandaan kegiatan Pelaporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1
		Jumlah SK Keg. Pelaporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1
		Jumlah Laporan Keg. Pelaporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1
		Jumlah Pengadministrasian Makan Minum kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Data Pembangunan Sektoral	Dokumen	1
		Jumlah Pengadministrasian ATK kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Data Pembangunan Sektoral	Dokumen	1

Dipindai dengan CamScanner

		Jumlah Pengadministrasian Cetak dan Penggandaan kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Data Pembangunan Sektoral	Dokumen	1
		Jumlah SK Keg. Evaluasi dan Pelaporan Data Pembangunan Sektoral	Dokumen	1
		Jumlah Laporan Keg. Evaluasi dan Pelaporan Data Pembangunan Sektoral	Dokumen	1
		Jumlah Pengadministrasian Makan Minum kegiatan Penyusunan Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah	Dokumen	1
		Jumlah Pengadministrasian ATK kegiatan Penyusunan Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah	Dokumen	1
		Jumlah Pengadministrasian Cetak dan Penggandaan kegiatan Penyusunan Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah	Dokumen	1
		Jumlah SK Keg. Penyusunan Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah	Dokumen	1
		Jumlah Laporan Keg. Penyusunan Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah	Dokumen	1

Kepala Sub Bag Program dan Evaluasi

E. MILA CANDRAYANI, S.I.P., MM
NIP: 197412252003122005

Fungsional umum

WAYARANI FATATUNNAJAH, SE
NIP: 198103272010012006

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntable serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DIAN TRIWAHYUNI, SE**

Jabatan : **FUNGSIONAL UMUM/BENDAHARA PENGELUARAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **EHA NURSOLEHA, SE**

Jabatan : **KEPALA SUB BAG KEUANGAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cilegon, 15 November 2021

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
EHA NURSOLEHA, SE	**DIAN TRIWAHYUNI, SE**
NIP: 196804072006012006	**NIP: 198412192010012010**

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Membantu Meningkatkan Pelayanan Administrasi Keuangan	Jumlah Pengadministrasian SPJ (LS/GU)	Dokumen	1
		Jumlah Pengadministrasian SPM(LS/GU)	Dokumen	1
		Jumlah Pengadministrasian Laporan Kas Bulanan	Dokumen	1
		Jumlah Pengadministrasian Buku Kas Umum	Dokumen	1
		Jumlah Pengadministrasian Buku Pembantu Pajak	Dokumen	1
		Jumlah Pengadministrasian Surat Tanda Setoran	Dokumen	1
		Jumlah Pengadministrasian Buku Pembantu Pajak	Dokumen	1
		Jumlah Laporan Keg. penyusunan dok. Laporan Keuangan	Dokumen	1

Kepala Sub Bag Keuangan

EHA NURSOLEHA, SE
NIP: 196804072008012006

Fungsonal Umum/Bendahara Pengeluaran

DIAN TRIWAHYUNI, SE
NIP: 198412192010012010

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntable serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WENDY TISNA PRAMUDYA**

Jabatan : **FUNGSIONAL UMUM**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **EHA NURSOLEHA, SE**

Jabatan : **KEPALA SUB BAG KEUANGAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cilegon, 15 November 2021

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
EHA NURSOLEHA, SE	**WENDY TISNA PRAMUDYA**
NIP: 196804072008012006	**NIP. 198203112006041010**

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Membantu Pelayanan Administrasi Keuangan	Jumlah Pengadministrasian Makan Minum kegiatan penyusunan dok. Laporan Keuangan	Dokumen	1
		Jumlah Pengadministrasian ATK kegiatan penyusunan dok. Laporan Keuangan	Dokumen	1
		Jumlah Pengadministrasian Cetak dan Penggandaan kegiatan penyusunan dok. Laporan Keuangan	Dokumen	1
		Jumlah SK Keg. penyusunan dok. Laporan Keuangan	Dokumen	1
		Jumlah Laporan Gaji dan honor	Dokumen	1

Kepala Sub Bag Keuangan

EHA NURSOLEHA, SE
NIP: 196804072008012006

Fungsional Umum

WENDY TISNA PRAMUDYA
NIP. 198203112006041010

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntable serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HAERIYATI, SE, MM**

Jabatan : **FUNGSIONAL UMUM**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **UTANG SUTARDI, S.Sos**

Jabatan : **KEPALA SEKSI PENCEGAHAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cilegon, 15 November 2021

Pihak Kedua,

UTANG SUTARDI, S.Sos
NIP: 196809272008011009

Pihak Pertama,

HAERIYATI, SE, MM
NIP. 197312042006042003

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Membantu terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan bencana kab/kota	Jumlah Pengadministrasian Makan Minum kegiatan	Dokumen	1
		Jumlah Pengadministrasian ATK kegiatan	Dokumen	1
		Jumlah Pengadministrasian Cetak dan Penggandaan kegiatan	Dokumen	1
		Jumlah Pengadministrasian Narasumber kegiatan	Dokumen	1
		Jumlah Pengadministrasian Honorarium narasumber dan instruktur	Dokumen	1
		Jumlah Pengadministrasian bahan alat perlengkapan pendidikan	Dokumen	1
		Jumlah SK Keg.	Dokumen	1
		Jumlah Laporan Keg.	Dokumen	1
2	Membantu Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kab/Kota	Jumlah Pengadmeirestrasian Makan Minum kegiatan	Dokumen	1
		Jumlah Pengadministrasian ATK kegiatan	Dokumen	1
		Jumlah Pengadministrasian Cetak dan Penggandaan kegiatan	Dokumen	1
		Jumlah Pengadministrasian Narasumber kegiatan	Dokumen	1
		Jumlah Pengadministrasian bahan alat perlengkapan pendidikan	Dokumen	1
		Jumlah Pengadministrasian Penyediaan Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	Dokumen	1
		Jumlah SK Keg.	Dokumen	1
		Jumlah Laporan Keg.	Dokumen	1
3	Membantu Terlaksananya Terlaksananya FGD Forum PRB	Jumlah Pengadministrasian Makan Minum kegiatan	Dokumen	1
		Jumlah Pengadministrasian ATK kegiatan	Dokumen	1
		Jumlah Pengadministrasian Cetak dan Penggandaan kegiatan	Dokumen	1
		Jumlah Pengadministrasian Narasumber kegiatan	Dokumen	1
		Jumlah Pengadministrasian bahan alat perlengkapan pendidikan	Dokumen	1
		Jumlah Pengadministrasian jasa promosi dan propaganda	Dokumen	1

Dipindai dengan CamScanner

		Jumlah SK Keg.	Dokumen	1
		Jumlah Laporan Keg.	Dokumen	1

Kepala Seksi Pencegahan

UTANG SUTARDI, S.Sos
NIP: 196809272008011009

Fungsional Umum

HAERIYATI, SE, MM
NIP. 197312042006042003

Diprindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntable serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WAHYU HAIDIR**

Jabatan : **FUNGSIONAL UMUM**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ADRIAN IBNUDIN,SE,.M.Si**

Jabatan : **KEPALA SEKSI KESIAPSIAGAAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cilegon, 15 November 2021

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
ADRIAN IBNUDIN,SE,.M.Si	**WAHYU HAIDIR**
NIP: 197905022002121005	**NIP. 197302222008011005**

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Membantu Terlaksananya Apel Siaga Bencana	Jumlah Pengadministrasian Makan Minum kegiatan	Dokumen	1
		Jumlah Pengadministrasian ATK kegiatan	Dokumen	1
		Jumlah Pengadministrasian Cetak kegiatan	Dokumen	1
		Jumlah Pengadministrasian Penyediaan pakaian kerja lapangan	Dokumen	1
		Jumlah Pengadministrasian Honorarium pegawai diluar Pemda	Dokumen	1
		Jumlah SK Keg.	Dokumen	1
		Jumlah Laporan Keg.	Dokumen	1
2	Membantunya Terlaksananya Pengamanan Hari Raya (Hari Besar Islam dan Hari Besar Nasional)	Jumlah Pengadministrasian Makan Minum kegiatan	Dokumen	1
		Jumlah Pengadministrasian ATK kegiatan	Dokumen	1
		Jumlah Pengadministrasian Cetak kegiatan	Dokumen	1
		Jumlah Pengadministrasian Penyediaan pakaian kerja lapangan	Dokumen	1
		Jumlah Pengadministrasian Honorarium pegawai diluar Pemda (satgas PAM)	Dokumen	1
		Jumlah Pengadministrasian Belanja BBM untuk gladi dan drill	Dokumen	1
		Jumlah SK Keg.	Dokumen	1
		Jumlah Laporan Keg.	Dokumen	1
3	Membantu Terlaksananya kegiatan kesekretariatan Gugus Tugas Covid-19 di Kota Cilegon	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	1

Kepala Seksi Kesiapsiagaan

ADRIAN IBNUDIN,SE., M.Si
NIP: 197905022002121005

FUNGSIONAL UMUM

WAHYU HAIDIR
NIP. 197302222008011005

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntable serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SULURI**

Jabatan : **FUNGSIONAL UMUM**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SIDIK, SE, M.Si**

Jabatan : **KEPALA SEKSI TANGGAP DARURAT**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cilegon, 15 November 2021

Pihak Kedua,

SIDIK, SE, M.Si
NIP: 196502012003121001

Pihak Pertama,

SULURI
NIP. 196807102002121007

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Membantu Terlaksananya pelayanan tanggap darurat bencana	Jumlah pelaksanaan Kegiatan tanggap darurat	Kegiatan	1
		Jumlah Pengadministrasian Makan Minum kegiatan	Dokumen	1
		Jumlah Pengadministrasian ATK kegiatan	Dokumen	1
		Jumlah Pengadministrasian Cetak kegiatan	Dokumen	1
		Jumlah Dokumentasi Kegiatan tanggap darurat	Dokumen	1
		Jumlah Laporan Kegiatan tanggap darurat	Dokumen	1
2	Membantu Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM PB	Jumlah pelaksanaan Kegiatan tanggap darurat	Kegiatan	1
		Jumlah Pengadministrasian Makan Minum kegiatan	Dokumen	1
		Jumlah Pengadministrasian ATK kegiatan	Dokumen	1
		Jumlah Pengadministrasian bahan alat perlengkapan pendidikan	Dokumen	1
		Jumlah Dokumentasi Kegiatan	Dokumen	1
		Jumlah Laporan Kegiatan	Dokumen	1

Kepala Seksi Tanggap Darurat

SIDIK, SE. M.Si
NIP: 196502012003121001

Fungsional Umum

SULURI
NIP. 196807102002121007

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntable serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SAYIDI**

Jabatan : **FUNGSIONAL UMUM**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AGUSCI, SH**

Jabatan : **KEPALA SEKSI LOGISTIK**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cilegon, 15 November 2021

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
AGUSCI, SH	**SAYIDI**
NIP: 197108102007011011	**NIP. 197409122008011006**

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Membantu Terlaksananya Kegiatan Distribusi Logistik dan Peralatan pendukung kebencanaan	Jumlah pelaksanaan Kegiatan logistik	Kegiatan	1
		Jumlah Pengadministrasian Makan Minum kegiatan	Dokumen	1
		Jumlah Pengadministrasian ATK kegiatan	Dokumen	1
		Jumlah Pengadministrasian Cetak kegiatan	Dokumen	1
		Jumlah Dokumentasi Kegiatan logistik	Dokumen	1
		Jumlah Laporan Kegiatan logistik	Dokumen	1
2	Membantu Tersedianya Logistik dan Peralatan Kebencanaan	Jumlah Pengadministrasian Makan Minum kegiatan	Dokumen	1
		Jumlah Pengadministrasian ATK kegiatan	Dokumen	1
		Jumlah Pengadministrasian Cetak dan penggandaan kegiatan	Dokumen	1
		Jumlah SK Keg.	Dokumen	1
		Jumlah Laporan Keg.	Dokumen	1

Kepala Seksi Logistik

AGUSCI, SH

NIP: 197108102007011011

FUNGSIONAL UMUM

SAYIDI

NIP. 197409122008011006

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntable serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ATUL JUBAEDAH, S.Sos**

Jabatan : **FUNGSIONAL UMUM**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **PUTRI HANNY ZAMANI, ST**

Jabatan : **KEPALA SEKSI REHABILITASI**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cilegon, 15 November 2021

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
PUTRI HANNY ZAMANI, ST	**ATUL JUBAEDAH, S.Sos**
NIP: 198206252006042015	**NIP: 198211252009022005**

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Membantu Terlaksananya Penanganan Pascabencana Kab/Kota	Jumlah Pengadministrasian Makan Minum kegiatan	Dokumen	1
		Jumlah Pengadministrasian ATK kegiatan	Dokumen	1
		Jumlah Pengadministrasian Cetak dan penggandaan kegiatan	Dokumen	1
		Jumlah Pengadministrasian Narasumber kegiatan	Dokumen	1
		Jumlah Pengadministrasian data kerusakan dan kerugian bencana	Dokumen	1
		Jumlah Pengadministrasian instrumen survey DALA	Dokumen	1
		Jumlah Pengadministrasian SK kegiatan	Dokumen	1
		Jumlah Pengadministrasian laporan kegiatan	Dokumen	1
2	Membantu Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Isolasi Mandiri Covid-19 Di Kota Cilegon	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	1

Kepala Seksi Rehabilitasi

PUTRI HANNY ZAMANI, ST

NIP: 198206252006042015

Fungsional Umum

ATUL JUBAEDAH, S.Sos

NIP: 198211252009022005

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
[illegible]	[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]		Indeks Kinerja Lain	Indeks	70,6	[illegible]	71,91	[illegible]	73,61	[illegible]	75,31	[illegible]	77,01	[illegible]	78,71	[illegible]	78,71	[illegible]	
[illegible]	[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]		Rata-Rata pemegang Sinergi dan Kebijakan Umum	%	100,00	[illegible]	100,00	[illegible]	100,00	[illegible]	100,00	[illegible]	100,00	[illegible]	100,00	[illegible]	100,00	[illegible]	
[illegible]	[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]		Persentase Luas Lahan yang [illegible]	%	14,19	[illegible]	15,00	[illegible]	15,12	[illegible]	15,61	[illegible]	16,17	[illegible]	16,71	[illegible]	16,71	[illegible]	
[illegible]	[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]		Persentase Rumah Tangga yang Mengakses air Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	%	64,33	[illegible]	64,72	[illegible]	65,27	[illegible]	66,51	[illegible]	66,84	[illegible]	66,75	[illegible]	66,85	[illegible]	
[illegible]	[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]		Nilai sosialisasi SMB	%	28,33	[illegible]	28,64	[illegible]	34,58	[illegible]	45,13	[illegible]	51,26	[illegible]	51,25	[illegible]	51,25	[illegible]	
[illegible]	[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]		Rasio Tenaga Ahli Konstruksi yang Memiliki Sertifikat Kompetensi (Operator, Teknisi, Analis)	%	14,00	[illegible]	58,33	[illegible]	60,00	[illegible]	64,00	[illegible]	100,00	[illegible]	100,00	[illegible]	100,00	[illegible]	
[illegible]		Persentase Kelancaran Pemanfaatan Ruang	%	33,27	[illegible]	33,27	[illegible]	34,27	[illegible]	36,27	[illegible]	38,27	[illegible]	50,27	[illegible]	50,27	[illegible]	
[illegible]	[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]		Persentase Kelancaran Pemanfaatan Ruang	%	11,73	[illegible]	30,29	[illegible]	34,66	[illegible]	38,41	[illegible]	100,00	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00	[illegible]	
[illegible]	[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]		Tingkat Pemanfaatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ke Lokasi	%	0,00	[illegible]	15,24	[illegible]	65,13	[illegible]	65,15	[illegible]	75,54	[illegible]	80,10	[illegible]	80,26	[illegible]	
[illegible]	[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]		Persentase Tanah kosong yang terkonsolidasi	%	0,56	[illegible]	43,10	[illegible]	45,62	[illegible]	47,62	[illegible]	49,70	[illegible]	50,19	[illegible]	50,26	[illegible]	
[illegible]	[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]		Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Lokasi	%	13,00	[illegible]	31,00	[illegible]	60,60	[illegible]	64,00	[illegible]	67,00	[illegible]	72,10	[illegible]	76,50	[illegible]	
[illegible]		Nilai Pola Asuhan PSU pemukiman dan sarana perlengkapan	%	31,61	[illegible]	75,79	[illegible]	94,51	[illegible]	98,33	[illegible]	98,51	[illegible]	100,40	[illegible]	100,50	[illegible]	
[illegible]	[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]		Persentase Capaian Pemenuhan PSU Permukiman	%	91,61	[illegible]	93,79	[illegible]	94,17	[illegible]	98,19	[illegible]	98,31	[illegible]	100,01	[illegible]	100,00	[illegible]	
[illegible]	[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]		Persentase Pola Ruhur yang Sesuai Standar	%	0,00	[illegible]	30,00	[illegible]	35,00	[illegible]	45,00	[illegible]	65,00	[illegible]	85,10	[illegible]	90,00	[illegible]	
[illegible]	[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]		Rata-Rata Layanan SPAM Pelayanan jalur dan konsesinasi	%	100,00	[illegible]	100,00	[illegible]	100,00	[illegible]	100,00	[illegible]	100,00	[illegible]	100,00	[illegible]	100,00	[illegible]	
[illegible]	[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]		Persentase Jalur Sebut Kondisi Mantap	%	97,41	[illegible]	97,61	[illegible]	98,19	[illegible]	98,19	[illegible]	98,61	[illegible]	98,61	[illegible]	98,61	[illegible]	
[illegible]	[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]		Rasio kemandirian Wilayah	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00	[illegible]	0,72	[illegible]	0,72	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00	[illegible]	
[illegible]		Inserta Lalu Lintas Jalan	[illegible]	0,40	[illegible]	0,40	[illegible]	0,42	[illegible]	0,42	[illegible]	0,42	[illegible]	0,44	[illegible]	0,44	[illegible]	
[illegible]	[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	

LAMPIRAN I

TABEL VI-7 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH YANG DISERTAI DENGAN PAGU INDIKATIF KOTA CILEGON

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Rp	Tahun-1 Target	Tahun-1 Rp	Tahun-2 Target	Tahun-2 Rp	Tahun-3 Target	Tahun-3 Rp	Tahun-4 Target	Tahun-4 Rp	Tahun-5 Target	Tahun-5 Rp	Kondisi Akhir RPJMD Target	Kondisi Akhir RPJMD Rp	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
[illegible]	[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
T1.1	T1.1 [illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
T1.1.1		Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
S1.1.1	S1.1.1 [illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
S1.1.1.1		Nilai SAKIP	Nilai	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]		[illegible]	poin	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		Indeks RB Perangkat Daerah	poin	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik	poin	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		Indeks RB Perangkat Daerah	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]		[illegible]	poin	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		Indeks RB Perangkat Daerah	poin	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]		[illegible]	poin	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		Indeks RB Perangkat Daerah	poin	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]		[illegible]	poin	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		Indeks RB Perangkat Daerah	poin	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		Indeks RB Perangkat Daerah	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	%	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]		[illegible]	poin	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		Indeks RB Perangkat Daerah	poin	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		Indeks RB Perangkat Daerah	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]		[illegible]

Kode	Urusan/Bidang/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Output/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Akhir RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
[illegible]		Persentase rumah tangga [illegible]	%	0,00	2.078.481.750	17,00	767.600.000	58,00	2.000.000.000	71,00	4.721.553.410	80,00	3.610.815.000	100,00	1.679.154.000	100,00	11.667.541.000		
[illegible]	[illegible] PROGRAM PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP				52.166.677		640.000.000		1.000.000.000		4.250.000.000		1.000.000.000		860.000.000		8.750.000.000		
[illegible]		Persentase rumah tangga [illegible]	%	0,00	61.166.677	11,00	640.000.000	58,00	1.000.000.000	68,00	4.250.000.000	88,00	1.000.000.000	100,00	860.000.000	100,00	8.750.000.000		
[illegible]	[illegible] Program Pengelolaan Persampahan				607.700.624		750.000.000		470.000.000		470.000.000		470.000.000		500.000.000		1.670.000.000		
[illegible]		Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	2.000.000	600.700.624	2.000.000	750.000.000	2.500.000	470.000.000	2.600.000	470.000.000	2.700.000	470.000.000	2.800.000	500.000.000	2.800.000	1.670.000.000		
[illegible]	[illegible] PROGRAM PENGEMBANGAN TEMPAT DAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				72.539.229		271.000.000		186.000.000		100.000.000		200.000.000		200.000.000		900.000.000		
[illegible]		Persentase Gas rumah tangga [illegible]	%	100 Orang	72.539.229	10,00	271.000.000	10,00	186.000.000	10,00	100.000.000	10,00	200.000.000	10,00	200.000.000	10,00	900.000.000		
[illegible]		Indeks Pembangunan Pariwisata	Poin	12,14	447.954.000	52,19	750.000.000	53,69	1.000.000.000	57,00	3.000.000.000	57,97	3.040.000.000	58,00	630.000.000	58,00	9.070.000.000		
[illegible]	[illegible] PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				400.000.287		650.000.000		340.000.000		200.000.000		300.000.000		200.000.000		1.690.000.000		
[illegible]		Jumlah event kebudayaan yang diselenggarakan	Event	5,00	400.000.287	11,00	650.000.000	11,00	340.000.000	14,00	200.000.000	14,00	300.000.000	15,00	200.000.000	15,00	1.690.000.000		
[illegible]	[illegible] PROGRAM PENGEMBANGAN WISATA TRADISIONAL						600.000.000		100.000.000		200.000.000		200.000.000		120.000.000		520.000.000		
[illegible]		Persentase Kelompok Pelaku Ekonomi Tradisional yang dibina	%	100,00		100,00	100.000.000	100,00	100.000.000	100,00	200.000.000	100,00	200.000.000	100,00	120.000.000	100,00	520.000.000		
[illegible]	[illegible] PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA				47.995.674		500.000.000		1.000.000.000		1.437.500.000		1.000.000.000		350.000.000		4.350.000.000		
[illegible]		Persentase kajian wisata yang dikembangkan/jumlah kawasan yang ada	%	100,00	47.995.674	100,00	500.000.000	100,00	1.000.000.000	100,00	1.437.500.000	100,00	1.000.000.000	100,00	350.000.000	100,00	4.350.000.000		
[illegible]	[illegible] PROGRAM PELESTARIAN DAN PEMANFAATAN CAGAR BUDAYA						50.000.000		52.500.000		55.125.000		57.881.250		60.775.313		276.281.563		
[illegible]		Persentase Pelestari Cagar Budaya	%	100,00		100,00	50.000.000	100,00	52.500.000	100,00	55.125.000	100,00	57.881.250	100,00	60.775.313	100,00	276.281.563		
[illegible]	[illegible] PROGRAM PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN						500.000.000		250.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		-		2.500.000.000		
[illegible]		Pogram Pembangunan Museum Daerah	%	0,00		0,00	150.000.000	0,00	150.000.000	0,00	1.000.000.000	0,00	1.000.000.000	100,00	-	100,00	2.300.000.000		
[illegible]	[illegible] Meningkatkan kualitas Pengel, Lingkungan hidup, kualitas/fisik udara, kualitas air dan lainnya dan dikendalikan kerusakan lingkungan dan dikendalikan kerusakan lingkungan				92.369.839.441		219.545.316.488		129.161.744.000		179.369.946.960		126.323.631.248		121.291.087.248		644.699.685.894		
[illegible]		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	nomor	64,05	9.241.551.211	65,00	17.123.119.348	66,79	23.429.130.275	67,00	26.876.605.219	68,00	25.629.089.824	68,79	21.329.935.893	69,00	130.329.487.705		
[illegible]	[illegible] PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				679.343.228		600.000.000		550.000.000		500.000.000		250.000.000		100.000.000		2.810.943.263		
[illegible]		Perkembangan Dokumen Analisis Mawas Lingkungan	Dokumen	0,00	-	1,00	100.000.000	1,00	150.000.000	1,00	150.000.000	1,00	150.000.000	1,00	100.000.000	1,00	650.000.000		
[illegible]		Persentase IKM yang Memiliki Izin	%	100,00	679.343.228	100,00	500.000.000	100,00	400.000.000	100,00	360.943.263	100,00	-	100,00	-	100,00	1.160.943.263		
[illegible]	[illegible] PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				2.600.000.000		1.600.700.000		1.670.234.670		1.870.000.414		1.070.000.000		1.700.100.000		8.370.234.734		
[illegible]		Rata-Rata Persentase Capaian Peningkatan Kualitas Air dan Udara	%	100,00	2.600.700.000	100,00	1.600.700.000	100,00	1.670.234.670	100,00	1.800.000.414	100,00	1.000.000.000	100,00	1.700.100.000	100,00	8.370.234.734		
[illegible]	[illegible] PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				84.000.000		70.000.000		70.000.000		220.000.000		200.000.000		320.000.000		860.000.000		
[illegible]		Luasan Pengelolaan Kawasan Lindung	%	12,12	84.000.000	12,14	70.000.000	14,14	70.000.000	14,14	220.000.000	14,14	200.000.000	14,14	320.000.000	14,14	860.000.000		
[illegible]	[illegible] PROGRAM PENGENDALIAN KAWASAN BERMASALAH DAN BENCANA SDE DAN LINGKUNGAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LINGKUNGAN)				80.000.000		120.000.000		200.000.000		120.000.000		150.000.000		100.000.000		750.000.000		
[illegible]		Rata-Rata Persentase Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Limbah B3	%	100,00	80.000.000	100,00	120.000.000	100,00	200.000.000	100,00	120.000.000	100,00	150.000.000	100,00	100.000.000	100,00	750.000.000		
[illegible]	[illegible] PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP UPL LINGKUNGAN DAN SDE MERUSAKKAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL)				284.330.421		822.479.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		370.000.000		1.800.479.000		

Kode	SKPD/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
[illegible]		Cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan	%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] DINAS LINGKUNGAN HIDUP
[illegible]	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]		Persentase Penyuluhan/Sosialisasi Masyarakat yang mendapatkan pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] DINAS LINGKUNGAN HIDUP
[illegible]	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]		Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] DINAS LINGKUNGAN HIDUP
[illegible]	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]		Persentase Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup	%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] DINAS LINGKUNGAN HIDUP
[illegible]	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]		Rata-Rata Persentase Cakupan Wilayah Pengelolaan Sampah	%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] DINAS LINGKUNGAN HIDUP
[illegible]		Indeks Risiko Bencana	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]		Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana	%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
[illegible]	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]		Persentase Masyarakat di Wilayah Rawan Bencana yang Mendapatkan Informasi Kebencanaan	%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
[illegible]		Persentase Masyarakat di Wilayah Rawan Bencana yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
[illegible]		Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
[illegible]	[illegible] PROGRAM PENANGANAN BENCANA				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]		Persentase Korban Bencana Alam yang Mendapatkan Perlindungan Sosial	%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] DINAS SOSIAL
[illegible]		Persentase Pengurangan Banjir	%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]		[illegible]	%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
[illegible]	[illegible] PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]		Persentase Drainase dalam Kondisi Baik dan Tidak Tersumbat	%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
[illegible]		Tingkat stabilitas harga pangan dan bahan pokok	%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible] PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]		Persentase Konsumsi Energi dan Protein Perkapita	Persentase (%)	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
[illegible]		Persentase Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita	Persentase (%)	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
[illegible]		Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Ton	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
[illegible]		Stabilitas Harga Pangan (Beras)	Persentase (%)	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
[illegible]	[illegible] PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN						[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]		Cakupan Daerah rawan pangan yang ditangani	%	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
[illegible]	[illegible] PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN						[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BPBD KOTA CILEGON TAHUN 2021-2026

KODE (RENSTRA)	TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN (RENSTRA)	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	KODE (RENSTRA)										Kondisi Akhir RPJMD			
					Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)					
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET		Rp. 2021	
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*8*	*7*	*10*	*9*	*12*	*11*	*14*	*13*	*16*	*15*	*18*	*6*	
1.05.0.00.0.00.04.00	**1.05.0.00.0.00.04.00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**					**10.594.285.257**		**12.053.473.853**		**11.157.377.759**		**11.121.715.324**		**11.856.536.648**		**67.365.614.768**	**10.582.225.927**	
T1.1	T1.1 Peningkatan layanan pemerintahan					8.174.081.989		8.493.270.585		8.827.174.491		9.176.512.056		9.361.333.380		51.755.772.613	7.723.400.112	
T1.1.1		Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	62,97 (B)	71,2 (BB)		75,3 (BB)		78 (BB)		82,2 (A)		84,2 (A)		84,2 (A)		7.723.400.112	
S1.1.1	S1.1.1 Meningkatnya akuntabilitas					8.174.081.989		8.493.270.585		8.827.174.491		9.176.512.056		9.361.333.380		51.755.772.613	7.723.400.112	
0.00.01.1.05.0.00.0.00.04.00.1		Nilai Lakip Perangkat Daerah	poin	79	80		81		82		83		85		85		7.723.400.112	
0.00.01.1.05.0.00.0.00.04.00.2		Indeks RB Perangkat Daerah	poin	42	45		48		50		52		52		52		-	
0.00.01.1.05.0.00.0.00.04.00	0.00.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN					8.174.081.989		8.493.270.585		8.827.174.491		9.176.512.056		9.361.333.380		51.755.772.613	7.723.400.112	
0.00.01.1.05.0.00.0.00.04.00.1		Nilai Lakip Perangkat Daerah	poin	79	80	8.167.081.989	81	8.486.270.585	82	8.820.174.491	83	9.169.512.056	85	9.354.333.380	85	51.720.772.613	7.723.400.112	
0.00.01.2.01.0.00.01.1.05.0.00.0.00.04.00.1	0.00.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan					25.496.732		25.496.732		25.496.732		25.496.732		25.496.732		180.269.046	52.785.386	
IK		Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada	%	100	100	25.496.732	100	25.496.732	100	25.496.732	100	25.496.732	100	25.496.732	100	180.269.046	52.785.386	
0.00.01.2.01.011.05.0.00.0.00.04.00	0.00.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen					2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		20.895.290	8.395.290	
1893		Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang disusun	dokumen	3	3	2.500.000	3	2.500.000	3	2.500.000	3	2.500.000	3	2.500.000	3	20.895.290	8.395.290	
0.00.01.2.01.021.05.0.00.0.00.04.00	0.00.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan					2.498.000		2.498.000		2.498.000		2.498.000		2.498.000		14.988.000	2.498.000	
1894		Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun	dokumen	1	1	2.498.000	1	2.498.000	1	2.498.000	1	2.498.000	1	2.498.000	1	14.988.000	2.498.000	
0.00.01.2.01.031.05.0.00.0.00.04.00	0.00.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan					2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		12.000.000	2.000.000	
1895		Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang disusun	dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	12.000.000	2.000.000	
0.00.01.2.01.041.05.0.00.0.00.04.00	0.00.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-					2.999.732		2.999.732		2.999.732		2.999.732		2.999.732		17.998.392	2.999.732	
1896		Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun	dokumen	1	1	2.999.732	1	2.999.732	1	2.999.732	1	2.999.732	1	2.999.732	1	17.998.392	2.999.732	
0.00.01.2.01.051.05.0.00.0.00.04.00	0.00.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan					2.499.000		2.499.000		2.499.000		2.499.000		2.499.000		14.994.000	2.499.000	

1897		Jumlah Dokumen DPA Perubahan yang disusun	dokumen	1	1	2.499.000	1	2.499.000	1	2.499.000	1	2.499.000	1	2.499.000	1	14.994.000	2.499.000
0.00.01.2.01.061.05.0.00.0.00.04.00	0.00.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		75.897.624	25.897.624
1898		Jumlah DokumenCapaian Kinerja dan	dokumen	3	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	75.897.624	25.897.624
0.00.01.2.01.071.05.0.00.0.00.04.00	0.00.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		23.495.740	8.495.740
1899		Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Data	dokumen	2	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	23.495.740	8.495.740
0.00.01.2.02.0.00.01.1.05.0.00.0.00.04.00.1	0.00.01.2.02 Administrasi Keuangan					5.645.697.474		5.836.355.185		6.035.301.662		6.242.933.926		6.278.964.685		35.186.356.867	5.147.103.935
IK		Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada	%	100	100	5.645.697.474	100	5.836.355.185	100	6.035.301.662	100	6.242.933.926	100	6.278.964.685	100	35.186.356.867	5.147.103.935
0.00.01.2.02.011.05.0.00.0.00.04.00	0.00.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan					5.590.467.560		5.781.125.271		5.980.071.748		6.187.704.012		6.223.734.771		34.854.977.383	5.091.874.021
1900		Jumlah orang .bulan ASN yang mendapat gaji dan	OB	12	12	5.590.467.560	12	5.781.125.271	12	5.980.071.748	12	6.187.704.012	12	6.223.734.771	12	34.854.977.383	5.091.874.021
0.00.01.2.02.031.05.0.00.0.00.04.00	0.00.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan					47.160.000		47.160.000		47.160.000		47.160.000		47.160.000		282.960.000	47.160.000
1901		Jumlah PPK,Bendahara Pengeluaran,Pemb	org/bulan	12	12	47.160.000	12	47.160.000	12	47.160.000	12	47.160.000	12	47.160.000	12	282.960.000	47.160.000
0.00.01.2.02.071.05.0.00.0.00.04.00	0.00.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan					8.069.914		8.069.914		8.069.914		8.069.914		8.069.914		48.419.484	8.069.914
1902		Jumlah Laporan Keuangan yang disusun (Laporan	dokumen	3	3	8.069.914	3	8.069.914	3	8.069.914	3	8.069.914	3	8.069.914	3	48.419.484	8.069.914
0.00.01.2.03.0.00.01.1.05.0.00.0.00.04.00.1	0.00.01.2.03 Administrasi Barang Milik					18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		108.000.000	18.000.000
IK		Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada	%	100	100	18.000.000	100	18.000.000	100	18.000.000	100	18.000.000	100	18.000.000	100	108.000.000	18.000.000
0.00.01.2.03.061.05.0.00.0.00.04.00	0.00.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik					18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		108.000.000	18.000.000
1903		Jumlah Pengurus Barang dan Pembantu	OB	12	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	12	108.000.000	18.000.000
1904		Jumlah Pengurus Barang dan Pembantu	org/bulan	0	0	-	0		0		0		0		0	-	
0.00.01.2.06.0.00.01.1.05.0.00.0.00.04.00.1	0.00.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat					430.617.200		349.269.285		401.547.499		351.069.285		381.576.773		2.442.829.789	528.749.747
IK		Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada	%	100	100	430.617.200	100	349.269.285	100	401.547.499	100	351.069.285	100	381.576.773	100	2.442.829.789	528.749.747
0.00.01.2.06.011.05.0.00.0.00.04.00	0.00.01.2.06.01 Penyediaan Komponen					10.000.000		9.226.498		9.226.498		9.226.498		9.226.498		56.132.490	9.226.498
1908		Jumlah komponen listrik yang disediakan	bulan	12	12	10.000.000	12	9.226.498	12	9.226.498	12	9.226.498	12	9.226.498	12	56.132.490	9.226.498
0.00.01.2.06.021.05.0.00.0.00.04.00	0.00.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan					89.042.787		88.042.787		89.842.787		89.842.787		89.842.787		536.456.722	89.842.787

1909		Jumlah peringatan hari-hari besar yang difasilitasi	kegiatan	3	3	8.000.000	3	7.000.000	3	8.800.000	3	8.800.000	3	8.800.000	3	50.200.000	8.800.000
1910		Jumlah Alat Tulis kantor yang disediakan	jenis	25	25	81.042.787	25	81.042.787	25	81.042.787	25	81.042.787	25	81.042.787	25	486.256.722	81.042.787
0.00.01.2.06.031.05.0.00.0.00.04.00	0.00.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah					30.507.488		10.000.000		25.000.000		10.000.000		30.507.488		136.522.464	30.507.488
1911		jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	jenis	9	9	30.507.488	9	10.000.000	9	25.000.000	9	10.000.000	9	30.507.488	9	136.522.464	30.507.488
0.00.01.2.06.041.05.0.00.0.00.04.00	0.00.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor					111.616.925		100.000.000		104.978.214		100.000.000		110.000.000		666.388.113	139.792.974
1912		Jumlah Penyediaan Kebutuhan makanan dan	bulan	12	12	111.616.925	12	100.000.000	12	104.978.214	12	100.000.000	12	110.000.000	12	666.388.113	139.792.974
0.00.01.2.06.051.05.0.00.0.00.04.00	0.00.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan					50.950.000		25.000.000		50.000.000		25.000.000		25.000.000		226.900.000	50.950.000
1913		Jenis barang cetakan dan penggandaan	jenis	8	8	50.950.000	8	25.000.000	8	50.000.000	8	25.000.000	8	25.000.000	8	226.900.000	50.950.000
0.00.01.2.06.061.05.0.00.0.00.04.00	0.00.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan					15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		103.776.000	28.776.000
1914		Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan	jenis	6	6	15.000.000	6	15.000.000	6	15.000.000	6	15.000.000	6	15.000.000	6	103.776.000	28.776.000
0.00.01.2.06.081.05.0.00.0.00.04.00	0.00.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu					3.500.000		2.000.000		7.500.000		2.000.000		2.000.000		24.840.000	7.840.000
1915		Jumlah penyediaan makan dan minum	bulan	12	12	3.500.000	12	2.000.000	12	7.500.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	24.840.000	7.840.000
0.00.01.2.06.091.05.0.00.0.00.04.00	0.00.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi					120.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		691.814.000	171.814.000
1916		Jumlah penyediaan akomodasi	bulan	12	12	120.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	691.814.000	171.814.000
0.00.01.2.07.0.00.01.1.05.0.00.0.00.04.00.1	0.00.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah					27.406.359		15.000.000		50.000.000		25.272.625		35.000.000		195.993.136	43.314.152
IK		Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada	%	100	100	27.406.359	100	15.000.000	100	50.000.000	100	25.272.625	100	35.000.000	100	195.993.136	43.314.152
0.00.01.2.07.051.05.0.00.0.00.04.00	0.00.01.2.07.05 Pengadaan Mebel					12.406.359		-		15.000.000		10.272.625		15.000.000		65.085.343	12.406.359
1917		Jumlah mebel yang tersedia	unit	10	10	12.406.359	10	-	10	15.000.000	10	10.272.625	10	15.000.000	10	65.085.343	12.406.359
0.00.01.2.07.061.05.0.00.0.00.04.00	0.00.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan					15.000.000		15.000.000		35.000.000		15.000.000		20.000.000		130.907.793	30.907.793
1918		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	unit	3	3	15.000.000	3	15.000.000	3	35.000.000	3	15.000.000	3	20.000.000	3	130.907.793	30.907.793
0.00.01.2.08.0.00.01.1.05.0.00.0.00.04.00.1	0.00.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan					1.525.285.023		1.786.960.287		1.786.960.287		2.022.160.287		2.022.160.287		10.613.931.066	1.470.404.895
IK		Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada	%	100	100	1.525.285.023	100	1.786.960.287	100	1.786.960.287	100	2.022.160.287	100	2.022.160.287	100	10.613.931.066	1.470.404.895
0.00.01.2.08.011.05.0.00.0.00.04.00	0.00.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat					6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		36.000.000	6.000.000

1919		Jumlah materai yang disediakan	lembar	1250	1250	6.000.000	1250	6.000.000	1250	6.000.000	1250	6.000.000	1250	6.000.000	1250	36.000.000	6.000.000
0.00.01.2.08.021.05.0.00.0.00.04.00	0.00.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi,					240.245.023		240.245.023		240.245.023		240.245.023		240.245.023		1.441.470.138	240.245.023
1920		Jumlah jasa komunikasi (telp, Internet), jasa	bulan	12	12	240.245.023	12	240.245.023	12	240.245.023	12	240.245.023	12	240.245.023	12	1.441.470.138	240.245.023
0.00.01.2.08.041.05.0.00.0.00.04.00	0.00.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum					1.279.040.000		1.540.715.264		1.540.715.264		1.775.915.264		1.775.915.264		9.136.460.928	1.224.159.872
1921		Jumlah Jasa pelayanan umum kantor yang	bulan	12	12	1.279.040.000	12	1.540.715.264	12	1.540.715.264	12	1.775.915.264	12	1.775.915.264	12	9.136.460.928	1.224.159.872
0.00.01.2.09.0.00.01.1.05.0.00.0.00.04.00.1	0.00.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik					494.579.201		455.189.096		502.868.311		484.579.201		593.134.903		2.993.392.709	463.041.997
IK		Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada	%	100	100	494.579.201	100	455.189.096	100	502.868.311	100	484.579.201	100	593.134.903	100	2.993.392.709	463.041.997
0.00.01.2.09.041.05.0.00.0.00.04.00	0.00.01.2.09.04.01 Jasa Pemeliharaaan,					365.782.201		365.782.201		384.071.311		365.782.201		384.071.311		2.231.271.426	365.782.201
1922		Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	unit	24	24	365.782.201	24	365.782.201	24	384.071.311	24	365.782.201	24	384.071.311	24	2.231.271.426	365.782.201
0.00.01.2.09.061.05.0.00.0.00.04.00	0.00.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan					48.797.000		48.797.000		48.797.000		48.797.000		48.797.000		292.782.000	48.797.000
1923		Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	jenis	5	5	48.797.000	5	48.797.000	5	48.797.000	5	48.797.000	5	48.797.000	5	292.782.000	48.797.000
0.00.01.2.09.091.05.0.00.0.00.04.00	0.00.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung					80.000.000		40.609.895		70.000.000		70.000.000		160.266.592		469.339.283	48.462.796
1924		Jumlah Gedung kantor yang dipelihara	unit	1	1	80.000.000	1	40.609.895	1	70.000.000	1	70.000.000	1	160.266.592	1	469.339.283	48.462.796
0.00.01.1.05.0.00.0.00.04.00.2		Indeks RB Perangkat Daerah	poin	42	45	7.000.000	48	7.000.000	50	7.000.000	52	7.000.000	52	7.000.000	52	35.000.000	-
0.00.01.2.05.0.00.01.1.05.0.00.0.00.04.00.2	0.00.01.2.05 Administrasi Kepegawaian					7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		35.000.000	-
IK		Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada	%	100	100	7.000.000	100	7.000.000	100	7.000.000	100	7.000.000	100	7.000.000	100	35.000.000	-
0.00.01.2.05.031.05.0.00.0.00.04.00	0.00.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan					2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		12.500.000	-
1905		Jumlah laporan pendataan dan pengolahan	dok	0	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	12.500.000	-
0.00.01.2.05.041.05.0.00.0.00.04.00	0.00.01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan					2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		12.500.000	-
1906		Jumlah pegawai yang mengelola Sistem Informasi	org	0	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	12.500.000	-
0.00.01.2.05.051.05.0.00.0.00.04.00	0.00.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan					2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		10.000.000	-
1907		Jumlah Laporan monitoring, evaluasi dan	dok	0	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	10.000.000	-
T5.1	T5.1 Peningkatan kualitas hidup masyarakat					2.420.203.268		3.560.203.268		2.330.203.268		1.945.203.268		2.495.203.268		15.609.842.155	2.858.825.815

S5.1.3.2		Indeks Resiko Bencana	poin	135	130		125		120		115		110		110		2.858.825.815
S5.1.3	S5.1.3 Meningkatnya ketangguhan					2.420.203.268		3.560.203.268		2.330.203.268		1.945.203.268		2.495.203.268		15.609.842.155	2.858.825.815
1.05.03.1.05.0.00.0.00.04.00.1		Persentase Masyarakat di Wilayah Rawan	%	100	100		100		100		100		100		100		324.998.000
1.05.03.1.05.0.00.0.00.04.00.2		Persentase Masyarakat di Wilayah Rawan	%	100	100		100		100		100		100		100		983.294.660
1.05.03.1.05.0.00.0.00.04.00.3		Persentase Pelayanan Penyelamatan dan	%	100	100		100		100		100		100		100		1.550.533.155
1.05.03.1.05.0.00.0.00.04.00	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					2.420.203.268		3.560.203.268		2.330.203.268		1.945.203.268		2.495.203.268		15.609.842.155	2.858.825.815
1.05.03.1.05.0.00.0.00.04.00.1		Persentase Masyarakat di Wilayah Rawan	%	100	100	350.000.000	100	330.000.000	100	230.000.000	100	130.000.000	100	230.000.000	100	1.594.998.000	324.998.000
1.05.03.2.01.1.05.03.1.05.0.00.0.00.04.00.1	1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan					350.000.000		330.000.000		230.000.000		130.000.000		230.000.000		1.594.998.000	324.998.000
IK		Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada	%	100	100	350.000.000	100	330.000.000	100	230.000.000	100	130.000.000	100	230.000.000	100	1.594.998.000	324.998.000
1.05.03.2.01.011.05.0.00.0.00.04.00	1.05.03.2.01.01 Penyusunan Kajian Risiko Bencana					250.000.000		230.000.000		130.000.000		30.000.000		130.000.000		1.020.000.000	250.000.000
1925		Jumlah Dokumen Peta Potensi Bencana per resiko	Dokumen	0	0	-	1	100.000.000	0	-	0	-	0	-	0	100.000.000	-
1926		Jumlah Dokumen Kajian Resiko Bencana	Dokumen	0	1	200.000.000	0		0	-	0	-	0	-	0	200.000.000	-
1927		Jumlah Tempat Evakuasi Sementara	Titik lokasi	0	0	-	0	-	3	100.000.000	0	-	3	100.000.000	3	200.000.000	-
1928		Jumlah dokumen FS titik relokasi bencana yang	dok	0	0	-	1	100.000.000	0		0	-	0		0	100.000.000	-
1929		Jumlah dokumen analisa data/informasi	Dokumen	1	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	100.000.000	100.000.000
1930		Jumlah Koordinasi Perkuatan data dan informasi per	keg	7	7	50.000.000	7	30.000.000	7	30.000.000	7	30.000.000	7	30.000.000	7	320.000.000	150.000.000
1.05.03.2.01.021.05.0.00.0.00.04.00	1.05.03.2.01.02 Sosialisasi, Komunikasi,					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		574.998.000	74.998.000
1931		Jumlah Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi	Titik	0	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	250.000.000	-
1932		Jumlah Penduduk di kawasan rawan bencana yang	Orang	0	443803	50.000.000	443803	50.000.000	443803	50.000.000	443803	50.000.000	443803	50.000.000	443803	324.998.000	74.998.000
1.05.03.1.05.0.00.0.00.04.00.2		Persentase Masyarakat di Wilayah Rawan	%	100	100	1.195.203.268	100	2.385.203.268	100	1.185.203.268	100	935.203.268	100	1.385.203.268	100	8.069.311.000	983.294.660
1.05.03.2.02.1.05.03.1.05.0.00.0.00.04.00.2	1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan					1.195.203.268		2.385.203.268		1.185.203.268		935.203.268		985.233.268		7.669.341.000	983.294.660
IK		Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada	%	100	100	1.195.203.268	100	2.385.203.268	100	1.185.203.268	100	935.203.268	100	985.233.268	100	7.669.341.000	983.294.660
1.05.03.2.02.011.05.0.00.0.00.04.00	1.05.03.2.02.01 Penyusunan Rencana					150.000.000		-		-		-		-		150.000.000	-

1933		Jumlah Dokumen data/informasi tentang rencana	dokumen	0	1	150.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	150.000.000	-
1.05.03.2.02.021.05.0.00.0.00.04.00	1.05.03.2.02.02 Pelatihan Pencegahan dan					75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		422.144.026	47.144.026
1934		Jumlah masyarakat yang ikut pelatihan pencegahan dan	Orang	44	40	75.000.000	40	75.000.000	40	75.000.000	40	75.000.000	40	75.000.000	40	422.144.026	47.144.026
1.05.03.2.02.031.05.0.00.0.00.04.00	1.05.03.2.02.03 Pengendalian Operasi dan					140.000.000		1.540.000.000		140.000.000		140.000.000		140.000.000		2.100.000.000	-
1935		Jumlah kegiatan Koordinasi teknis inventarisasi	pemangku kepentingan (pemerintah,	0	7	20.000.000	7	20.000.000	7	20.000.000	7	20.000.000	7	20.000.000	7	100.000.000	-
1936		Jumlah sarpras operasional kesiapsiagaan	unit	0	2	120.000.000	1	1.520.000.000	2	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	1	2.000.000.000	-
1.05.03.2.02.041.05.0.00.0.00.04.00	1.05.03.2.02.04 Penyediaan Peralatan					170.000.000		170.000.000		370.000.000		170.000.000		70.000.000		993.671.560	43.671.560
1937		Jumlah peralatan dan perlindungan kesiapsiagaan	unit APD, perahu karet	1	70	170.000.000	70	170.000.000	70	370.000.000	70	170.000.000	70	70.000.000	70	993.671.560	43.671.560
1.05.03.2.02.051.05.0.00.0.00.04.00	1.05.03.2.02.05 Pengelolaan Risiko Bencana					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		250.000.000	-
1938		Jumlah koordinasi dengan pemangku kepentingan	jumlah pemangku kepentingan	0	7	50.000.000	7	50.000.000	7	50.000.000	7	50.000.000	7	50.000.000	7	250.000.000	-
1.05.03.2.02.061.05.0.00.0.00.04.00	1.05.03.2.02.06 Penguatan Kapasitas Kawasan					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		100.000.000		609.320.234	309.320.234
1939		Jumlah Orang yang melaksanakan Pengamanan Hari	Orang	20	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	100.000.000	20	609.320.234	309.320.234
1940		Jumlah koordinasi dengan pemangku kepentingan	jumlah pemangku kepentingan	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-
1.05.03.2.02.071.05.0.00.0.00.04.00	1.05.03.2.02.07 Penanganan Pascabencana					30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		343.158.840	193.158.840
1941		Jumlah koordinasi dan evaluasi Rekonstruksi pasca	pemangku kepentingan (pemerintah,	7	7	30.000.000	7	30.000.000	7	30.000.000	7	30.000.000	7	30.000.000	7	343.158.840	193.158.840
1.05.03.2.02.081.05.0.00.0.00.04.00	1.05.03.2.02.08 Pengembangan Kapasitas Tim					70.203.268		10.203.268		10.203.268		110.203.268		110.203.268		311.016.340	
1942		Jumlah Satgas Penanganan dan Mitigasi Bencana	Orang	0	2	70.203.268	1	10.203.268	1	10.203.268	3	110.203.268	3	110.203.268	3	311.016.340	
1943		Jumlah Petugas Penanggulangan Bencana di BPBD	Orang	0	0	-	0		0		0		0		0	-	
1.05.03.2.02.091.05.0.00.0.00.04.00	1.05.03.2.02.09 Penyusunan Rencana Kontijensi					150.000.000		150.000.000		150.000.000		-		100.000.000		550.000.000	-
1944		Jumlah Evaluasi renkon	dokumen	0	0	-	0	-	0	-	0	-	1	100.000.000	1	100.000.000	-
1945		Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi yang disusun	dokumen	0	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	0	-	0	-	0	450.000.000	-
1.05.03.2.02.101.05.0.00.0.00.04.00	1.05.03.2.02.10 Gladi Kesiapsiagaan					290.000.000		290.000.000		290.000.000		290.000.000		290.000.000		1.690.000.000	240.000.000
1946		Jumlah aparatur dan masyarakat yang mengikuti	Orang	110	150	200.000.000	150	200.000.000	150	200.000.000	150	200.000.000	150	200.000.000	150	1.150.000.000	150.000.000

1947		Jumlah aparatur dan masyarakat yang mengikuti	Orang	180	180	90.000.000	180	90.000.000	180	90.000.000	180	90.000.000	180	90.000.000	180	540.000.000	90.000.000
1.05.03.2.02.111.05.0.00.0.00.04.00	1.05.03.2.02.11 Penyusunan Rencana					20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		250.000.000	150.000.000
1948		Jumlah koordinasi dengan pemangku kepentingan	keg	7	7	20.000.000	7	20.000.000	7	20.000.000	7	20.000.000	7	20.000.000	7	250.000.000	150.000.000
1949		Jumlah dokumen rencana penanggulangan	Dokumen	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-
1.05.03.2.04.1.05.03.1.05.0.00.0.00.04.00.2	1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar					-		-		-		-		400.000.000		400.000.000	-
IK		Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada	%	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	400.000.000	100	400.000.000	-
1.05.03.2.04.011.05.0.00.0.00.04.00	1.05.03.2.04.01 Penyusunan Regulasi					-		-		-		-		100.000.000		100.000.000	-
1961		Jumlah regulasi penanggulangan bencana	Jenis	0	0	-	0	-	0	-	0	-	1	100.000.000	1	100.000.000	-
1.05.03.2.04.021.05.0.00.0.00.04.00	1.05.03.2.04.02 Penguatan Kelembagaan					-		-		-		-		-		-	-
1962		Jumlah kelembagaan yang dibentuk	Jenis	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-
1.05.03.2.04.031.05.0.00.0.00.04.00	1.05.03.2.04.03 Kerjasama antar Lembaga dan					-		-		-		-		100.000.000		100.000.000	-
1963		Jumlah MOU yang disusun dalam rangka kerjasama	Jenis	0	0	-	0	-	0	-	0	-	1	100.000.000	1	100.000.000	-
1.05.03.2.04.041.05.0.00.0.00.04.00	1.05.03.2.04.04 Pengelolaan dan Pemanfaatan					-		-		-		-		100.000.000		100.000.000	-
1964		Jenis Sistem informasi kebencanaan yang	Jenis	0	0	-	0	-	0	-	0	-	1	100.000.000	1	100.000.000	-
1.05.03.2.04.051.05.0.00.0.00.04.00	1.05.03.2.04.05 Pembinaan dan Pengawasan					-		-		-		-		100.000.000		100.000.000	-
1965		Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan	dok	0	0	-	0	-	0	-	0	-	1	100.000.000	1	100.000.000	-
1.05.03.1.05.0.00.0.00.04.00.3		Persentase Pelayanan Penyelamatan dan	%	100	100	875.000.000	100	845.000.000	100	915.000.000	100	880.000.000	100	880.000.000	100	5.945.533.155	1.550.533.155
1.05.03.2.03.1.05.03.1.05.0.00.0.00.04.00.3	1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan					875.000.000		845.000.000		915.000.000		880.000.000		880.000.000		5.945.533.155	1.550.533.155
IK		Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada	%	100	100	875.000.000	100	845.000.000	100	915.000.000	100	880.000.000	100	880.000.000	100	5.945.533.155	1.550.533.155
1.05.03.2.03.011.05.0.00.0.00.04.00	1.05.03.2.03.01 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		550.000.000	300.000.000
1950		Persentase Penanganan Operasional	%	100	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	550.000.000	300.000.000
1.05.03.2.03.021.05.0.00.0.00.04.00	1.05.03.2.03.02 Respon Cepat Darurat Bencana					340.000.000		350.000.000		360.000.000		370.000.000		370.000.000		2.170.533.155	380.533.155
1951		Jumlah orang yang mengikuti peningkatan	orang	70	0	-	0		0		0		0		0	17.257.297	17.257.297

1952		Jumlah petugas penanggulangan Bencana di BPBD	orang	10	4	90.000.000	4	90.000.000	4	90.000.000	4	90.000.000	4	90.000.000	4	540.000.000	90.000.000
1953		Persentase Penanganan Operasional	%	100	100	250.000.000	100	260.000.000	100	270.000.000	100	280.000.000	100	280.000.000	100	1.613.275.858	273.275.858
1.05.03.2.03.031.05.0.00.0.00.04.00	1.05.03.2.03.03 Pencarian, Pertolongan dan					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		500.000.000	250.000.000
1954		Presentase Jumlah Korban yang tertolong dan	%	100	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	500.000.000	250.000.000
1.05.03.2.03.041.05.0.00.0.00.04.00	1.05.03.2.03.04 Penyediaan Logistik					385.000.000		345.000.000		405.000.000		360.000.000		360.000.000		2.225.000.000	370.000.000
1955		Jumlah jenis logistik dan peralatan	jenis (sandang, pangan, obat-obatan)	3	3	165.000.000	3	155.000.000	3	160.000.000	3	160.000.000	3	160.000.000	3	1.050.000.000	250.000.000
1956		Jumlah peningkatan dan pembinaan SDM	org/keg	0	66	50.000.000	66	50.000.000	66	50.000.000	66	50.000.000	66	50.000.000	66	250.000.000	
1957		Jumlah kegiatan pelatihan manajemen	keg	0	1	40.000.000	0		1	45.000.000	0		0		0	85.000.000	
1958		Persentase Logistik yang terdistribusi	%	100	100	130.000.000	100	140.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	840.000.000	120.000.000
1.05.03.2.03.051.05.0.00.0.00.04.00	1.05.03.2.03.05 Aktivasi Sistem Komando					30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		150.000.000	-
1959		Jumlah aktivasi sistem komando Penanganan	keg	0	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	150.000.000	-
1.05.03.2.03.061.05.0.00.0.00.04.00	1.05.03.2.03.06 Respon Cepat Bencana Non Alam					20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		350.000.000	250.000.000
1960		Persentase Penanganan Respon Cepat	%	100	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	350.000.000	250.000.000

TARGET DAN PENGUKURAN KINERJA SASARAN TW 1 TAHUN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	TW 1		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan Profesionalitas Aparatur	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	79	29,89	29,89	100%
		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	42	18,06	18,06	100%
2	Meningkatnya Ketangguhan Bencana	Persentase Masyarakat Di Wilayah Rawan Bencana Yang Mendapatkan Informasi Kebencanaan	100%	46,25	45	97%
		Persentase Masyarakat Di Wilayah Rawan Bencana Yang Mendapatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	100%	34	34	100%
		Persentase Masyarakat Di Wilayah Rawan Bencana Yang Mendapatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	27,5	24,5	89%

TARGET DAN PENGUKURAN KINERJA SASARAN TW II TAHUN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	TW II		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan Profesionalitas Aparatur	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	79	26,15	25,74	98%
		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	42	27,48	27,48	100%
2	Meningkatnya Ketangguhan Bencana	Persentase Masyarakat Di Wilayah Rawan Bencana Yang Mendapatkan Informasi Kebencanaan	100%	13,75	11,25	82%
		Persentase Masyarakat Di Wilayah Rawan Bencana Yang Mendapatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	100%	21	21	100%
		Persentase Masyarakat Di Wilayah Rawan Bencana Yang Mendapatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	10	10	100%

TARGET DAN PENGUKURAN KINERJA SASARAN TW III TAHUN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	TW III		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan Profesionalitas Aparatur	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	79	24,49	24,49	100%
		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	42	20,56	17,025	83%
2	Meningkatnya Ketangguhan Bencana	Persentase Masyarakat Di Wilayah Rawan Bencana Yang Mendapatkan Informasi Kebencanaan	100%	6,25	6,25	100%
		Persentase Masyarakat Di Wilayah Rawan Bencana Yang Mendapatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	100%	21	21	100%
		Persentase Masyarakat Di Wilayah Rawan Bencana Yang Mendapatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	25	21	84%

TARGET DAN PENGUKURAN KINERJA SASARAN TW IV TAHUN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	IV		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan Profesionalitas Aparatur	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	79	19,48	19,48	100%
		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	42	33,90	30,75	91%
2	Meningkatnya Ketangguhan Bencana	Persentase Masyarakat Di Wilayah Rawan Bencana Yang Mendapatkan Informasi Kebencanaan	100%	33,75	33,75	100%
		Persentase Masyarakat Di Wilayah Rawan Bencana Yang Mendapatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	100%	24	24	100%
		Persentase Masyarakat Di Wilayah Rawan Bencana Yang Mendapatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	37,5	37,5	100%

TARGET DAN PENGUKURAN KINERJA PROGRAM TW 1 TAHUN 2021

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	TW 1		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	79	29,89	29,89	100%
		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	42	18,06	18,06	100%
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Masyarakat Di Wilayah Rawan Bencana Yang Mendapatkan Informasi Kebencanaan	100%	46,25	45	97%
		Persentase Masyarakat Di Wilayah Rawan Bencana Yang Mendapatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	100%	34	34	100%
		Persentase Masyarakat Di Wilayah Rawan Bencana Yang Mendapatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	27,5	24,5	89%

TARGET DAN PENGUKURAN KINERJA PROGRAM TW II TAHUN 2021

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	TW II		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	79	26,15	25,74	98%
		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	42	27,48	27,48	100%
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Masyarakat Di Wilayah Rawan Bencana Yang Mendapatkan Informasi Kebencanaan	100%	13,75	11,25	82%
		Persentase Masyarakat Di Wilayah Rawan Bencana Yang Mendapatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	100%	21	21	100%
		Persentase Masyarakat Di Wilayah Rawan Bencana Yang Mendapatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	10	10	100%

TARGET DAN PENGUKURAN KINERJA PROGRAM TW III TAHUN 2021

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	TW III		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	79	24,49	24,49	100%
		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	42	20,56	17,025	83%
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Masyarakat Di Wilayah Rawan Bencana Yang Mendapatkan Informasi Kebencanaan	100%	6,25	6,25	100%
		Persentase Masyarakat Di Wilayah Rawan Bencana Yang Mendapatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	100%	21	21	100%
		Persentase Masyarakat Di Wilayah Rawan Bencana Yang Mendapatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	25	21	84%

TARGET DAN PENGUKURAN KINERJA PROGRAM TW IV TAHUN 2021

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	IV		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	79	19,48	19,48	100%
		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	42	33,90	30,75	91%
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Masyarakat Di Wilayah Rawan Bencana Yang Mendapatkan Informasi Kebencanaan	100%	33,75	33,75	100%
		Persentase Masyarakat Di Wilayah Rawan Bencana Yang Mendapatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	100%	24	24	100%
		Persentase Masyarakat Di Wilayah Rawan Bencana Yang Mendapatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	37,5	37,5	100%

Rekapitulasi Kejadian Bencana (RKB)
BANDAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA CILEGON
TAHUN 2021

No	Hari,Tanggal	Waktu	Lokasi	Jenis Kejadian/Bencana	Penyebab Bencana	Korban Bencana	Dampak/Kerusakan/Kerugian	Data Pemilik	Sumber Bantuan Intansi/Dinas/Perusahaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Senin,11 Januari 2021	15.40 WIB	Link.Kedung Baya RT 02/RW 04 Kelurahan Kalitimbang Kecamatan Cibeber	Kebakaran Lahan	Human Error	Nihil	Rumput ilalang yang ada disekitar lokasi terbakar	Milik Masyarakat	-	lahan seluas -+ 1 hektar
2	Selasa,19 Januari 2021	13.30 WIB	Link.Telu RT 03/RW 04 Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang	Angin Puting Beliung (Pohon Tumbang)	Cuaca Ekstrim dan Angin Kenceng	Nihil	Rumah warga sebanyak 1 kk/3 jiwa kondisi rusak berat Rumah warga sebanyak 1 kk/3 jiwa kondisi rusak sedang Rumah warga sebanyak 1 kk / 5 jiwa kondisi rusak sedang (kerugian -+Rp.50.000.000)	Milik Masyarakat	BPBD Kota Cilegon mengeluarkan bantuan terpal 4 dan matras 3	Rumah warga rusak akibat tertimpa pohon yang tumbang
3	Rabu,03 Februari 2021	14.30 WIB	Link.Baru Tamansari RT 02/RW 04 Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak	Banjir	Cuaca Ekstrim dan Hujan Deras	Nihil	Rumah warga sebanyak 150 kk/350 jiwa terendam air	Milik Masyarakat	-	Ketinggian air ± 50 cm
4	Kamis,04 Februari 2021	18.00 WIB	Link.Kubang Lampit RT 10/RW01 Kelurahan Tegal Bundar Kecamatan Purwarkarta	Banjir	Cuaca Ekstrim dan Hujan Deras	Nihil	Rumah warga sebanyak 10 kk terendam air	Milik Masyarakat	-	Ketinggian air ± 50 cm
5	Jum'at,05 Februari 2021	07.00WIB	Jl.Cibeber No2 Kelurahan Kalitimbang Kecamatan Kalitimbang	Angin Puting Beliung (Pohon Tumbang)	Cuaca Ekstrim dan Angin Kenceng	Nihil	Menimpah tembok pagar kelurahan bagian belakang roboh	Milik Masyarakat	-	Kantor kelurahan rusak akibat pohon tumbang
6	Sabtu,06 Februari 2021	20.30 WIB	Link.Sudimampir Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak Link.Baru Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak Link Langon.RT 05/RW06 Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak Link.Sawah lebak Gede RT 06/RW 03 Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak	Banjir	Cuaca Ekstrim dan Hujan Deras	Nihil	Rumah warga RT 01/RW05 sebanyak 98kk/236 jiwa terendam air Rumah warga RT 02/RW05 sebanyak 70kk/140 jiwa terendam air Rumah Warga RT 04/RW 05 sebanyak 122 kk/512 jiwa terendam air Rumah warga RT05/RW05 sebanyak 108 kk/256 jiwa terendam air Rumah warga RT 01,02,03,04/RW 04 sebanyak 300 kk terendam air Rumah warga sebanyak 9 kk jiwa terendam air Rumah warga sebanyak 100 kk jiwa terendam air	Milik Masyarakat		Ketinggian air ± 50 cm-70

No	Hari,Tanggal	Waktu	Lokasi	Jenis Kejadian/Bencana	Penyebab Bencana	Korban Bencana	Dampak/Kerusakan/Kerugian	Data Pemilik	Sumber Bantuan Intansi/Dinas/Perusahaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Minggu,07 Februari 2021	07.00 WIB	Jl.Raya Merak Kelurahan Kotasari Kecamatan Grogol (dibelakang pos polisi perempatan lampu merah jalan damkar)	Angin Puting Beliung (Pohon Tumbang)	Cuaca Ekstrim dan Angin Kenceng	Nihil	Menimpah akses jalan utama ,menimpah Pagar dan pembatasan jalan	Milik Masyarakat	-	Akses jalan menuju Tol Cilegon barat tertutup
8	Senin,08 Februari 2021	19 .00 WIB	Link. Jerang Tengah RT 02/RW 02 Kelurahan Karang asem Kecamatan Cibeber	Angin Puting Beliung (Pohon Tumbang)	Cuaca Ekstrim dan Angin Kenceng	Nihil	Pohon tumbang menutupi akses jalan utama arah ke kantor kecamatan cibeber	Milik Masyarakat	-	Pohon tumbang menutupi akses jalan utama arah ke kantor kecamatan cibeber
9	Jum'at,12 Februari 2021	07.00 WIB	Link.Nagreg RT 011/RW 003 Kelurahan Kepuh Kecamatan Ciwandan	ngsor (rumah robol	Cauca Ekstrim dan Angin Kenceng	Nihil	mengakibatkan rumah rusak	Milik Masyarakat	-	mengakibatkan rumah rusak
10	Sabtu, 27 Februari 2021	02.30 WIB	Link. Cigading Pasar Kelurahan Kubangsari Kecamatan Ciwandan	Banjir	Cauca Ekstrim dan Angin Kenceng	Nihil	Rumah warga RT 001/RW 002 sebanyak 50 kk/ jiwa 197 terendam air	Milik Masyarakat		Ketinggian air ± 50 cm-70
			Link. Pintu Air Kelurahan Kubangsari Kecamatan Ciwandan				Rumah warga RT 001/RW 004 sebanyak 32 kk/ jiwa 125			
			Link.Penauan RT 04 RW 01 Kelurahan Kubangsar Kecamatan Ciwandan				Rumah warga RT 001/RW 004 sebanyak 7 kk/ jiwa 25			
		01.00 WIB	Link. Kubang Welut RT 04/RW O2 NO.078 Kelurahan Samangraya Kecamatan Citangkil	ngsor (rumah robol	Cuaca Ekstrim dan Angin Kenceng	Nihil	1 rumah roboh bagian dapur (rusak sedang) jumlah 2 kk / 9 jiwa (kerugian ± .Rp.20.000.000)	Milik Masyarakat	BPBD Kota Cilegon mengeluarkan bantuan terpal 2	rumah ambruk/ roboh bagian dapur (rusak sedang)
11	Rabu,03 Maret 2021	22.00 WIB	Link.Sudimampir Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak	Banjir	Cuaca Ekstrim dan Hujan Deras	Nihil	Rumah warga RT 001/RW 005 sebanyak 125 KK terendam air	Milik Masyarakat	BPBD Kota Cilegon mengeluarkan bantuan berupa mei instan 40 dus air mineral botol 40 dus kecap abc 2 dus dan saos abc 2 dus	Ketinggian air ± 50 cm-80
							Rumah warga RT 002/RW 005 sebanyak 65 kk terendam air			
							Rumah warga RT 001/RW 004 sebanyak 100 kk terendam air			
							Rumah warga RT 002/RW 004 sebanyak 160 kk terendam air			
							Rumah warga RT 003/RW 004 sebanyak 216 kk terendam air			
							Rumah warga RT 004/RW 004 sebanyak 152 kk terendam air			
							Rumah warga RT 006/RW 004 sebanyak 60 kk terendam air			
							Rumah warga RT 007/RW 004 sebanyak 60 kk terendam air			
							Rumah warga RT 003/RW 003 sebanyak 42 kk terendam air			

No	Hari,Tanggal	Waktu	Lokasi	Jenis Kejadian/Bencana	Penyebab Bencana	Korban Bencana	Dampak/Kerusakan/Kerugian	Data Pemilik	Sumber Bantuan Intansi/Dinas/Perusahaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		20:30 WIB	Link.Baru Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak	Banjir	Cuaca Ekstrim dan Hujan Deras	Nihil	Genangan air berasal dari curah hujan dengan intensistas tinggi dan luapan dari sungai serta drainase yang kurang berfungsi	Milik Masyarakat	-	Genangan air berasal dari curah hujan dengan intensistas tinggi dan luapan dari sungai serta drainase yang kurang berfungsi
			Link.Bumi Waras Keluran Tamansari Kecamatan Pulomerak							
12	Kamis,04 Maret 2021	01:30 WIB	Link.Sukajaya RT 03 RW 01 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulomerak	ngsor (rumah robol	Cuaca Ekstrim dan Angin Kenceng	Nihil	dinding rumah roboh	Milik Masyarakat	BPBD Kota Cilegon mengeluarkan bantuan mie instan 30 dus air mineral 30 dus kecap abc 2 dus kecap manis 2 dus terpal 2 buah familiy 1 paket tiker 2 lembar	dinding rumah roboh
13	Rabu,24 Maret 2021	16.00 WIB	Link. Seneja RT 04 RW 01 Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Jombang	Angin Puting Beliung (Pohon Tumbang)	Cuaca Ekstrim dan Angin Kenceng	Nihil	Mengakibatkan garansi dan pos ronda rusak	Milik Masyarakat	-	Mengakibatkan garansi dan pos ronda rusak
14	Kamis,01 April 2021	12.39 WIB	Jalan. Mayjen Sutoyo Km RT 03 RW 01 Kelurahan Rawa Arum kecamatan Grogol (SMP 3 Cilegon)	Angin Puting Beliung (Pohon Tumbang)	Cuaca Ekstrim dan Angin Kenceng	Nihil	Menimpah Kanopi Tangga Sekol	Milik Masyarakat	-	Menimpah Kanopi Tangga Sekolah
		16.00 WIB	Link.Karang Bolong RT 04 RW 05 Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan	ngsor (rumah robol	Cuaca Ekstrim dan Angin Kenceng		I Rumah roboh sebanyak 2 kk 6 j	Milik Masyarakat		Hujan dengan intensis sedang hingga lebat disertai angin kencang menyebabkan rumah roboh

No	Hari,Tanggal	Waktu	Lokasi	Jenis Kejadian/Bencana	Penyebab Bencana	Korban Bencana	Dampak/Kerusakan/Kerugian	Data Pemilik	Sumber Bantuan Intansi/Dinas/Perusahaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Sabtu,03 April 2021	09.00 WIB	Jl. Pondok Cilegon Indah No.1, Kedaleman, Kec. Cibeber, Kota Cilegon	Banjir	Cuaca Ekstrim dan Hujan Deras	Nihil	Genangan air berasal dari curah hujan dengan intensistas tinggi dan luapan dari sungai serta drainase yang kurang berfungsi	Milik Masyarakat	-	Ketinggian air ± 50 cm-70
			Jalan Cibeber Kecamatan Cibeber (polsekk Cibeber)							
			Perumahan Bumi Praja Mandiri Cibeber Kecamtan Cibeber				Genangan air berasal dari curah hujan dengan intensistas tinggi dan luapan dari sungai serta drainase yang kurang berfungsi			
			Link.Jerang Barat Kelurahan Karangsem Kecamatan Cibeber							
			Link.Sambirata RT 05 RW 03 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber				Rumah warga RT 05 /RW 003 sebanyak 25 kk 75 jiwa terendam air			
			Jalan Pasar Kranggot RT 04 RW 04 Kelurahan Sukmajaya Kecamtan Jombang				Rumah warga RT 04 /RW 04 sebanyak 77 kk 320 jiwa terendam air			
			Link.Pintu air RT 01 RW 04 Kelurahan Kubangsari Kecamatan Ciwandan				Rumah warga RT 01 /RW 04 sebanyak 32 kk 125 jiwa terendam air			
			Link.Penauan RT 04 RW 01 Kelurahan Kubangsari Kecamtan Ciwandan				Rumah warga RT 04 /RW 01 sebanyak 7 kk 25 jiwa terendam air			
		15:17 WIB	Sd Negri Masigit 1 JLJayakarta Link Kenangan No 148 Kec Jombang				Mengenangi halaman sekolah			
16	Minggu,04 April 2021	00.30 WIB	Link.Sukajaya RT 03 RW 06 Kelurahan Mekasari Kecamatan Pulomerak	Angin Puting Beliung (Pohon Tumbang)	Cuaca Ekstrim dan Angin Kenceng	Nihil	I Pohon besar yang tumbang menutupi akses jalan utama sehingga menyebabkan lalulintas tidak dapat dilalui oleh kendaran roda 4 dan 2	Milik Masyarakat	-	Pohon besar yang tumbang menutupi akses jalan utama sehingga menyebabkan lalulintas tidak dapat dilalui oleh kendaran roda 4 dan 2

No	Hari,Tanggal	Waktu	Lokasi	Jenis Kejadian/Bencana	Penyebab Bencana	Korban Bencana	Dampak/Kerusakan/Kerugian	Data Pemilik	Sumber Bantuan Intansi/Dinas/Perusahaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Rabu,07 April 2021	06.00 WIB	jalan .Jenderal Sudirman Ramanuju Kelurahan Kebondalem Kecamatan Purwakarta (Lampu Merah ADP Alun-Alun Kota Cilegon)	Angin Puting Beliung (Pohon Tumbang)	Cuaca Ekstrim dan Angin Kenceng	Nihil	1 Pohon besar yang tumbang menutupi sebagian akses jalan utama sehingga menyebabkan lalulintas tidak berjalan normal	Milik Masyarakat	-	1 Pohon besar yang tumbang menutupi sebagian akses jalan utama sehingga menyebabkan lalulintas tidak berjalan normal
		15:00 WIB	Jalan. Bima Kavling Blok H RT 09 RW 05 Kelurahan Bendungan Kecamatan Cilegon				Menimpah Green House Hidrop			Menimpah Green House Hidroponik
18	Rabu ,1 Mei 2021	17:28 WIB	Link.Cikuasa N0 1 RT 02 Rw 02 Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol	Angin Puting Beliung (Pohon Tumbang)	Cuaca Ekstrim dan Angin Kenceng	Nihil	Dampak pohon tumbang mengakibatkan kemacetan panajang kendaraan roda dua empat pukul 17:30 s/d 18:10	Milik Masyarakat	-	Dampak pohon tumbang mengakibatkan kemacetan panajang kendaraan roda dua empat pukul 17:30 s/d 18:10
19	Rabu,12 Mei 2021	18:45 WIB	Link.Perum Praja Mandiri blok C8 no 05 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber	Kebakaran Lahan	Human Error	Nihil	Rumpur ilalang yang ada di sekitar lokasi terbakar	Milik Masyarakat	-	Rumpt ilalang yang ada di sekitar lokasi terbakar
20	Minggu,16 Mei 2021	17:22 WIB	Jalan .Ciwedus-Gagunung Kelurahan Ciwedus Kecamatan Cilegon (depan Indomaret)	Angin Puting Beliung (Pohon Tumbang)	Cuaca Ekstrim dan Angin Kenceng	Nihil	1 Pohon Besar yang tumbang menutupi akses jalan utama sehingga menyebabkan lalulintas tidak berjalan dengan normal	Milik Masyarakat	-	1 Pohon Besar yang tumbang menutupi akses jalan utama sehingga menyebabkan lalulintas tidak berjalan dengan normal
21	Kamis,27 Mei 2021	18:06 WIB	Jalan.Kubang Lampung Kelurahan Kota Bumi Kecamatan Purwakarta (di depan pintu gudang Kiec)	Angin Puting Beliung (Pohon Tumbang)	Cuaca Ekstrim dan Angin Kenceng	Nihil	Pohon yang tumbang menutupi akses jalan utama sehingga menyebabkan lalulintas tidak berjalan dengan normal	Milik Masyarakat	-	Pohon yang tumbang menutupi akses jalan utama sehingga menyebabkan lalulintas tidak berjalan dengan normal

No	Hari,Tanggal	Waktu	Lokasi	Jenis Kejadian/Bencana	Penyebab Bencana	Korban Bencana	Dampak/Kerusakan/Kerugian	Data Pemilik	Sumber Bantuan Intansi/Dinas/Perusahaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Jm'at ,04 Juni 2021	08:00WIB	Link Kampling blok J jl Kudus RT 08/RW 06 Kelurahan Bendungan Kecamtan Cilegon	Angin Puting Beliung (Pohon Tumbang)	Cuaca Ekstrim dan Angin Kenceng	Nihil	Pohon yang tumbang menutupi akses jalan utama	Milik Masyarakat	-	Pohon yang tumbang menutupi akses jalan utama
		13:00 WIB	link Pabuaran RT 02/RW 05 Kelurahan Rawa Arum Kecamatan Grogol							
			Link.Makam Maja RT 03/RW 05 Kelurahan Rawa Arum Kecamatan Grogol							
		08:00 WIB	link Kruwuk RT 04/RW 01 Kelurahan Rawa Arum Kecamatan Grogol	Banjir	Cuaca Ekstrim dan Hujan Deras		Genangan air berasal dari curah hujan dengan intensistas tinggi dan luapan dari sungai serta drainase yang kurang berfungsi			Genangan air berasal dari curah hujan dengan intensistas tinggi dan luapan dari sungai serta drainase yang kurang berfungsi
24	Sabtu 05, Juni 2021	18:37 WIB	Jalan Ahmad Yani nomor 35 RT 06/ RW 03 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber (fly over)	Kebakaran Lahan	Human Error	Nihil	di duga buangan putung rokokk	Milik Masyarakat	-	lahan seluas -+ 20000M
25	Minggu,06 Juni 2021	19:30 WIB	Jalan Protokol Kelurahan Masigit Kecamtan Jombang	Angin Puting Beliung (Pohon Tumbang)	Cuaca Ekstrim dan Angin Kenceng	Nihil	Pohon yang tumbang menutupi akses jalan utama	Milik Masyarakat	-	pohon yang tumbang menutupi akses jalan utama
26	Selasa,08 Juni 2021	10:20 WIB	Jalaan Ciberko RT 03/RW 04 Kelurahan Kalitimbang Kecamatan Cibeber	Kebakaran Lahan	Human Error	Nihil	di duga api sisa pembakaran sam	Milik Masyarakat	-	lahan seluas -+ 1 hektar
27	Kamis,10 Juni 2021	15:00 WIB	Jalan Cibeber RT 01/RW 01 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber	Kebakaran Lahan	Human Error	Nihil	di duga pembakaran oleh orang tak dikenal	Milik Masyarakat	-	lahan seluas -+ 3000 m
28	Selasa, 15 juni 2021	19:20 WIB	Link Cibeber RT 04/RW 03 Kelurahan Kalitimbang Kecamatan Cibeber	Kebakaran Lahan	Human Error	Nihil	di duga puntung rokok orang yang tidak bertanggung jawab	Milik Masyarakat	-	lahan seluas -+ 5000 m
29	Selasa 02 Juli 2021	22:00 WIB	Link.Gerem Raya RT 02 RW 04 Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol	Angin Puting Beliung (Pohon Tumbang)	Cuaca Ekstrim dan Angin Kenceng	Nihil	Akses jalan terganggu	Milik Masyarakat		Akses jalan terganggu
30	Rabu,07 Juli 2021	10:00 WIB	Link Sukasari RT 01 RW 01 Kelurahan TamanSari Kecamatan Pulomerak	ngsor (rumah robo	Cuaca Ekstrim dan Angin Kenceng	Nihil	atap rumah tembok bagian belakang roboh	Milik Masyarakat	-	atap rumah tembok bagian belakang roboh
31	Selasa,27 Juli 2021	18:00 WIB	Link.Gunung Ipik RT 08 RW 03 Kelurahan Cikerai Kecamatan Cibeber	Kebakaran Lahan	Human Error	Nihil	di duga puntung rokok orang yang tidak bertanggung jawab	Milik Masyarakat	-	di duga puntung rokok orang yang tidak bertanggung jawab
32	Kamis,05 Agustus 2021	08: 30 WIB	Link.Bumi Waras RT 01/RW 04 & RW 05 Kelurahan TamanSari Kecamatan Pulomerak	Banjir	Cuaca Ekstrim dan Hujan Deras	Nihil	Hujan intensitas sedang-lebat di wilayah Kota Cilegon menyebabkan air sungai meluap ke pemukiman dan drainase yang tidak berfungsi dengan baik	Milik Masyarakat	-	Ketinggian air ± 50 cm-70

No	Hari,Tanggal	Waktu	Lokasi	Jenis Kejadian/Bencana	Penyebab Bencana	Korban Bencana	Dampak/Kerusakan/Kerugian	Data Pemilik	Sumber Bantuan Intansi/Dinas/Perusahaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Senin,16 Agustus 2021	11:55 WIB	Jalan Ahmad Yani Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber (fly over)	Kebakaran Lahan	Human Error	Nihil	di duga pembakaran sampah yang di tinggalkan	Milik Masyarakat	-	lahan seluas -+ 4 hektar
34	Rabu,18 Agustus 2021	11:40 WIB	Link.Kedung Baya (depan hotel trans) Kelurahan Kalitimbang Kecamatan Cibeber	Kebakaran Lahan	Human Error	Nihil	Sengaja di bakar	Milik Masyarakat	-	lahan seluas -+ 5 hektar
35	Sabtu,21 Agustus 2021	09:00 WIB	Link Kapling Baru 1 RT 02 RW 04 Kelurahan Lebak Gede Kecamatan Pulomerak	Angin Puting Beliung (Pohon Tumbang)	Cuaca Ekstrim dan Angin Kenceng	Nihil	2 rumah roboh bagian belakang rusak ringan sedang akibat longsor tanah sebanyak 1 kk/ 3 jiwa dan 1 kk / 7 jiwa	Milik Masyarakat	-	mengakibatkan 2 unit atap rumah warga rusak ringan
36	Minggu,22 Agustus 2021	17: 20 WIB	Link.Cigiceh RT 04 RW 01 Kelurahan Purwakarta Kecamatan Purwakarta	Kebakaran Lahan	Human Error	Nihil	Pembakaran sampah yang di ting	Milik Masyarakat	-	lahan seluas -+ 5 hektar
37	Senin,23 Agustus 2021	19:30 WIB	Link.Palm Hills Jalan Orchid RT 05 RW 10 Kelurahan Kotabumi Kecamatan Purwakarta (Bukit Palm Hills)	Kebakaran Lahan	Human Error	Nihil	adanya pembakaran sampah yang di tinggalkan	Milik Masyarakat	-	lahan seluas -+ 2000 m
38	Sabtu,04 September 2021	10:57 WIB	Jalan Panasepan Link.Belacu RT 003/RW 002 Kelurahan Tegal Bunder Kecamatan Purwakarta	Kebakaran Lahan	Human Error	Nihil	adanya pembakaran sampah yang di tinggalkan	Milik Masyarakat	-	lahan seluas -+ 2000 m
		14:00 WIB	Link.Perigi Kelurahan Cikerai Kecamatan Cibeber (Panti Rehabilitasi Dinsos Kota Cilegon)							lahan seluas -+ 1000 m
		14:00 WIB	Perumahan Palm Hils Kelurahan Kotabumi Kecamatan Purwakarta							lahan seluas -+ 4000 m
39	Minggu,05 September 2021	10:10 WIB	Link.Cikopal RT 03/RW 06 Kelurahan taman baru Kecamatan Citangkil	Kebakaran Lahan	Human Error	Nihil	di duga dari putung rokok	Milik Masyarakat	-	lahan seluas -+ 7000 m
40	Selasa,14 September 2021	07: 40 WIB	Link. Pejaten RT 007/RW 003 Kelurahan Cikerai Kecamatan Cibeber	Angin Puting Beliung (Pohon Tumbang)	Cuaca Ekstrim dan Angin Kenceng	Nihil	Pohon menimpa kabel listik dan menutupi akses angin kencang	Milik Masyarakat	-	Pohon menimpa kabel listik dan menutupi akses angin kencang
41	Kamis,16 September 2021	02:00 WIB	Link.Dukuh RT 08/RW 03 Kelurahan BanjarNegara Kecamtan Ciwandan (MDTA Baiturrohman)	ngsor (rumah robo	Cuaca Ekstrim dan Angin Kenceng	Nihil	1 bangunan roboh dan 1 atap bangunan ambruk sedang akibat longsor	Milik Masyarakat	-	1 bangunan roboh dan 1 atap bangunan ambruk sedang akibat longsor
42	Minggu,19 September 2021	18:00 WIB	Jalan.Gerem RT 03/RW 01 Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol (samping PT.Sadikun LPG Cikuasa Bawah)	Angin Puting Beliung (Pohon Tumbang)	Cuaca Ekstrim dan Angin Kenceng	Nihil	1 Pohon Besar yang tumbang menutupi akses jalan utama sehingga menyebabkan lalu lintas tidak berjalan dengan normal dan menimpah kabel	Milik Masyarakat	-	1 Pohon Besar yang tumbang menutupi akses jalan utama sehingga menyebabkan lalu lintas tidak berjalan dengan normal dan menimpah kabel listrik

No	Hari,Tanggal	Waktu	Lokasi	Jenis Kejadian/Bencana	Penyebab Bencana	Korban Bencana	Dampak/Kerusakan/Kerugian	Data Pemilik	Sumber Bantuan Intansi/Dinas/Perusahaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							normal dan menimpa kabel			menimpa kabel listrik

No	Hari,Tanggal	Waktu	Lokasi	Jenis Kejadian/Bencana	Penyebab Bencana	Korban Bencana	Dampak/Kerusakan/Kerugian	Data Pemilik	Sumber Bantuan Intansi/Dinas/Perusahaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Minggu,04 Oktober 2021	10:00 WIB	Jalan Gerem RT 03/RW 01 Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol	Krisis air bersih	-	Nihil	Warga kesusahan air bersih jumlah 144 kk	Milik Masyarakat	-	Warga kesusahan air bersih jumlah 144 kk
44	Selasa,05 Oktober 2021	15:00 WIB	Link.Cikerai-Krotek RT 01 RW 02 Kelurahan Kalitimbang Kecamatan Cibeber	Kebakaran Lahan	Cuaca Ekstrim dan Angin Kenceng	Nihil	akibat pembakaran sampah yang ditinggalkan	Milik Masyarakat	-	akibat pembakaran sampah yang ditinggalkan lahan seluas -+ 1 hektar
		16:20 WIB	Gunung Pemancar bukit palm Kelurahan Kotabumi Kecamatan Purwakarta							
45	Kamis,07 Oktober 2021	21:00 WIB	Link.Rawa Ujung RT 01 RW 02 Kelurahan Rawa Arum Kecamatan Grogol	Angin Puting Beliung (Pohon Tumbang)	Cuaca Ekstrim dan Angin Kenceng	Nihil	1 Pohon yang tumbang menutupi akses jalan warga	Milik Masyarakat	-	1 Pohon yang tumbang menutupi akses jalan warga
46	Sabtu.09 Oktober 2021	14:00 WIB	jalan Sumedang blok J RT 008/RW 006 Bendungan	Kebakaran Lahan	Cuaca Ekstrim dan Angin Kenceng	Nihil	Api dari pembakaran sampah yang di tinggalkan	Milik Masyarakat	-	rumput alang-alang di lahan kosong seluas -+ 1200m
47	Senin, 11 Oktober 2021	18:35 WIB	Link .Perumahan Kedaung RT 03/RW 07 Kelurahan Taman Baru Kecamatan Citangkil	kebakaran Lahan	Cuaca Ekstrim dan Angin Kenceng	Nihil	Pembakaran sampah yang ditinggalkan	Milik Masyarakat	-	Pembakaran sampah yang ditinggalkan -+1 hektar
48	Senin,18 Oktober 2021	22: 30 WIB	Jalan Sastradika RT 05 RW 05 Kecamatan Jombang Kelurahan Jombang wetan (belakang Tk Nusantara)	Angin Puting Beliung (Pohon Tumbang)	Cuaca Ekstrim dan Angin Kenceng	Nihil	Pohon menimpah kabel pln dan menutupi akses jalan bagi warga setempat	Milik Masyarakat	-	Pohon menimpah kabel pln dan menutupi akses jalan bagi warga setempat
49	Rabu,20 Oktober 2021	23:15 WIB	Link. Kembang Kuning RT 02 RW 04 Kelurahan Suralaya Kecamatan pulomerak	Angin Puting Beliung (Pohon Tumbang)	Cuaca Ekstrim dan Angin Kenceng	Nihil	Pohon menimpah 1 unit rumah mengakibatkan rumah rusak sedang sebanyak 1 kk /4 jiwa	Milik Masyarakat		Pohon menimpah 1 unit rumah mengakibatkan rumah rusak sedang sebanyak 1 kk /4 jiwa
50	Senin,01 November 2021	17:30 WIB	Link Gardu Iman RT 03/RW 04 Kelurahan Warna Sari Kecamatan Citangkil	Banjir	Cauca Ekstrim dan Angin Kenceng	Nihil	Rumah warga RT 03 /RW 04 sebanyak 5 kk jiwa terendam air	Milik Masyarakat	-	Hujan dengan intensitas sedang sehingga menyebabkan banjir di wilayah tersebut
			Link Kramatjati RT 05 /RW 04 Kelurahan Warna Sari Kecamatan Citangkil				Rumah warga RT 04 /RW 04 sebanyak 30 kk jiwa terendam air			
			Link Warung Juwet RT 01 RW 02 Kelurahan Samangraya Kecamatan Citangkil				Rumah warga RT 05 /RW 04 sebanyak 20 kk terendam air			
			Link Warung Juwet RT 01 RW 02 Kelurahan Samangraya Kecamatan Citangkil							
51	Sabtu,06 November 2021	16:30 WIB	Curug Sambiranggon RT 04 RW 05 Kelurahan Karang Asem Kecamatan Cibeber	Kebakaran Lahan	Cuaca Ekstrim dan Angin Kenceng	Nihil	pembakaran sampah yang ditinggalkan	Milik Masyarakat	-	pembakaran sampah yang ditinggalkan

No	Hari,Tanggal	Waktu	Lokasi	Jenis Kejadian/Bencana	Penyebab Bencana	Korban Bencana	Dampak/Kerusakan/Kerugian	Data Pemilik	Sumber Bantuan Intansi/Dinas/Perusahaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Jum'at,12 November 2021	15:40 WIB	Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Kotabumi Kecamatan Grogol	Angin Puting Beliung (Pohon Tumbang)	Cuaca Ekstrim dan Angin Kenceng	Nihil	1 pohon yang tumbang menutipi setengah akses jalan utama	Milik Masyarakat	-	1 pohon yang tumbang menutipi setengah akses jalan utama
53	Minggu,21 November 2021	13:39 WIB	Jalan Perrumahan Cilegon Indah Blok D 97 No 14 RT 06 RW 05 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber	Angin Puting Beliung (Pohon Tumbang)	Cuaca Ekstrim dan Angin Kenceng	Nihil	1 Pohon yang tumbang menutupi akses jalan warga	Milik Masyarakat	-	1 Pohon yang tumbang menutupi akses jalan warga
54	Selasa, 23 November 2021	19:00 WIB	Jalan Sumampir RT 01 RW 05 Kelurahan Kebondalem Kecamatan Purwakarta	Angin Puting Beliung (Pohon Tumbang)	Cuaca Ekstrim dan Angin Kenceng	Nihil	1 pohon masuk di area kiec,cuman rantingnya patah di sisi jalan sumampir dan menimpah kabel pln	Milik Masyarakat	-	1 pohon masuk di area kiec,cuman rantingnya patah di sisi jalan sumampir dan menimpah kabel pln
55	Minggu,28 November 2021	20:10 WIB	Jalan Raya Grogol Kelurahan Kotasari Kecamatan Grogol	Angin Puting Beliung (Pohon Tumbang)	Cuaca Ekstrim dan Angin Kenceng	Nihil	1 pohon yang tumbang menutupi akses jalan raya	Milik Masyarakat	-	1 pohon yang tumbang menutupi akses jalan raya
56	Senin,29 November 2021	01:00 WIB	Link kruwuk RT 03/RW 07 Kelurahan Rawa Arum Kecamatan Grogol	Banjir	Cuaca Ekstrim dan Hujan Deras	Nihil	genangan air berasal dari curah hujan dengan intensitas tinggi dan luapan air dari kali/sungai kruwuk serta aliran drainase yang kurang berfungsi	Milik Masyarakat	-	genangan air berasal dari curah hujan dengan intensitas tinggi dan luapan air dari kali/sungai kruwuk serta aliran drainase yang kurang berfungsi
57	Minggu,05 Desember 2021	09:21 WIB	Link.Cupas Kulon RT 02/RW07 Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol	Longsor	Cuaca Ekstrim dan Angin Kenceng	Nihil	sebelum kejadian sudah terpantau kondisi tanah (TPT) yang sudah miring dan materiall tanah,bebatuan longsor yang menutupi badan jalan utama	Milik Masyarakat	-	sebelum kejadian sudah terpantau kondisi tanah (TPT) yang sudah miring dan materiall tanah,bebatuan longsor yang menutupi badan jalan utama
58	Kamis,09 Desember 2021	13:20 WIB	Link.Curug Rotan Kelurahan Karang Asem Kecamatan Cibeber	Kebakaran Lahan	Cuaca Ekstrim dan Angin Kenceng	Nihil	pembakaran sampah yang ditinggalkan	Milik Masyarakat	-	pembakaran sampah yang ditinggalkan luas lahan 3000 M²
59	Senin,20 Desember 2021	11:30 WIB	Jalan Lingkar Selatan (Lahan Sebelah Cilegon Prak)	Kebakaran Lahan	Cuaca Ekstrim dan Angin Kenceng	Nihil	Sengaja di bakar oleh orang yang tidak bertanggung jawab	Milik Masyarakat	-	Sengaja di bakar oleh orang yang tidak bertanggung jawab

No	Hari,Tanggal	Waktu	Lokasi	Jenis Kejadian/Bencana	Penyebab Bencana	Korban Bencana	Dampak/Kerusakan/Kerugian	Data Pemilik	Sumber Bantuan Intansi/Dinas/Perusahaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Sabtu,25 Desember 2021	20:56 WIB	Jalan Pabuaran RT 04/RW 05 Kelurahan RawaArum Kecamatan Grogol	banjiran	Cauca Ekstrim dan Hujan Deras	Nihil	Hujan deras serta debit air yang tinggi mencapai Ketinggian air ± 50 cm di wilayah setempat sudah mulai naik ke permukaan	Milik Masyarakat	-	Ketinggian air ± 50 cm
			Jalan Kruwuk RT 03/RT 07 Kelurahan RawaArum Kecamatan Grogol							
			Jalan Kruwuk RT 04/RT 07 Kelurahan RawaArum Kecamatan Grogol				Rumah warga RT 03 /RW 07 sebanyak 120 kk /400 jiwa terendam air			
			Rokal Mushola Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang				Rumah warga RT 03 /RW 07 sebanyak 12 kk terendam air			
			Sawah RW 02 Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Jombang							
			Perumahan metro kluster florida Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang				Hujan deras serta debit air yang tinggi mencapai Ketinggian air ± 50 cm di wilayah setempat sudah mulai naik ke permukaan			
			Perumahan metro kluster CendanaKelurahan Masigit Kecamatan Jombang							
		21: 09 WIB	Jalan kembar gedung KIEC Kelurahan Kotabumi Kecamatan Purwakarta	Angin Puting Beliung (Pohon Tumbang)	Cuaca Ekstrim dan Angin Kenceng	Nihil	Pohon tumbang menutupi akses kendaraan yang melintas			Pohon tumbang menutupi akses kendaraan yang melintas
			Jalan Buah Kopek Kelurahan Samangraya Kecamatan Citangkil							
			Jalan Pintu Masuk kawasan Kiec Kelurahan Warnasari Kecamatan Citangkil							
			Jalan raya anyer link tegal buntu Kelurahan Tegal Ratu Kecamatan Ciwandan							
			Jalan raya anyer link tegal buntu Kelurahan Tegal Ratu Kecamatan Ciwandan (depan kantor koramil 2307)							

No	Hari,Tanggal	Waktu	Lokasi	Jenis Kejadian/Bencana	Penyebab Bencana	Korban Bencana	Dampak/Kerusakan/Kerugian	Data Pemilik	Sumber Bantuan Intansi/Dinas/Perusahaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jalan raya anyer link tegal pintu air Kelurahan Tegal Ratu Kecamatan Ciwandan (depan kantor koramil 2307)							

No	Hari,Tanggal	Waktu	Lokasi	Jenis Kejadian/Bencana	Penyebab Bencana	Korban Bencana	Dampak/Kerusakan/Kerugian	Data Pemilik	Sumber Bantuan Intansi/Dinas/Perusahaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	Selasa,28 Desember 2021	20:15 WIB	Jalan piranha no 94 Kelurahan Taman Baru Kecamatan Citangkil (makam balung)	Angin Puting Beliung (Pohon Tumbang)	Cuaca Ekstrim dan Angin Kenceng	Nihil	Pohon menutupi separuh badan jalan makam balung	Milik Masyarakat	-	Pohon menutupi separuh badan jalan makam balung

Data Kejadian Bulan Januari - Desember 2021		
NO	Kebancanaan	Jumlah
1	Angin Puting Beliung (Pohon Tumbang)	26
2	Kebakaran lahan	18
3	Banjir	13
4	Longsor tebing /rumah roboh	7
5	Kekeringan	1
Jumlah		65

No	Hari,Tanggal	Waktu	Lokasi	Jenis Kejadian/Bencana	Penyebab Bencana	Korban Bencana	Dampak/Kerusakan/Kerugian	Data Pemilik	Sumber Bantuan Intansi/Dinas/Perusahaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Jumlah Data Korban Kejadian selama Tahun 2021

NO	Bulan	Bencana	Jumlah
1	Januari	Angin Puting Beliung (Pohon Tumbang)	3 kk /11 jiwa
2	Februari	Banjir	1.356 kk /1491 Jiwa
		Longsor	2 kk /9 jiwa
3	Maret	Banjir	975 kk
		Longsor	8 kk /21 Jiwa
4	April	Longsor	2 kk /6 Jiwa
		Banjir	141 kk /545 Jiwa
5	Mei	-	
6	Juni	-	
7	Juli	-	
8	Agustus	Longsor	2 kk /10 Jiwa
9	September	-	-
10	Oktober	Krisis Air Bersih	144 KK
11	November	Angin Puting Beliung (Pohon Tumbang)	1 kk
		Banjir	55 kk
12	Desember	-	-
	Jumlah		2.686 kk





JUHADI M SYUKUR
Plt. Kepala BPBD Cilegon
sekaligus sekretaris Gugus Covid-19

Satgas Covid-19 Kota Cilegon Siapkan Tempat Isolasi Baru

KOTA Cilegon yang sudah memasuki zona kuning dan berada dilevel 3, membuat personil Satgas Covid-19 menarik nafas lega. Betapa tidak selama berbulan-bulan, Satgas Covid-19 bekerja keras untuk menurunkan angka pasien yang terpapar Covid-19. Selain itu, guna mengantisipasi adanya gelombang ketiga, Satgas Covid-19,tetap menyiapkan wisma isolasi mandiri.

Sekretaris Satgas Covid-19 sekaligus Plt.Kepala Pelaksana BPBD Kota Cilegon Juhadi M Syukur mengatakan, saat ini sejumlah personil Satgas Covid-19, membongkar tenda dan mengangkuti peralatan medis dari wisma isolasi mandiri, Trans Hotel.

"Ini sudah tidak ada pasien yang melakukan isolasi mandiri. Makanya kami bongkar. Untuk mengantisipasi apabila ada pasien Covid-19, kami sudah menyiapkan tempat isolasi baru di Jalan Billet, Komplek Krakatau Steel,"katanya.

Dia mengatakan, Trans Hotel memang sebagai salah satu tempat wisma isolasi mandiri. Dan Satgas Covid-19, tidak akan memperpanjang lagi. Karena , Satgas Covid-19 sudah menyiapkan tempat yang baru.

"Iya, tidak akan diperpanjang, dan kontrak kerjasama berakhir pada 30 September ini. Tim sudah melakukan pembongkaran dan juga melakukan pengasapan bersama relawan. Agar segera Trans Hotel tersebut bisa ditempati oleh wisatawan yang ingin menginap,"ujarnya.

Satgas Covid-19, kata dia, seperti biasa tetap berjalan, dan masih terus melakukan pengawasan. Pihaknya akan tetap memantau kondisi Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang masih berlaku.

"Harapan kami, tidak ada lonjakan pasien Covid-19. Bahkan Kota Cilegon bisa meningkat ke zona hijau. Pelan-pelan ya, semuanya berangsur, tapi tetap sesuai dengan instruksi Mendagri di PPKM, protocol kesehatan tetap dilakukan seperti memakai masker, menghindari kerumunan dan menjaga jarak,"tuturnnya.

Sementara itu Walikota Cilegon Helldy Agustian ketika dikonfirmasi mengatakan, pihaknya bersyukur Kota Cilegon sudah memasuki zona kuning dan level 3. Dan ia akan tetap fokus untuk melakukan penanganan Covid-19, sampai Kota Cilegon menjadi zona hijau.

"Dalam menangani Covid-19 di Kota Cilegon, kami sudah buat team kecil sampai dengan tingkat Kelurahan,RW dan juga RT dilibatkan. Hal itu kamilakukan sebagai salah satu upaya guna mewujudkan Cilegon Sehat. Dan syukur alhamdullilah, tiap hari, warga yang terpapar terus menurun,"ucapnya.

Walikota Cilegon Helldy Agustian menambahkan,pihaknya bersama Satgas Covid-19 juga unsur Forkopimda, tidak henti-hentinya melakukan himbauan, agar tidak terjadi adanya gelombang ketiga dalam penanganan Pandemi Covid-19.

"Masyarakat jangan terlena dengan kondisi sekarang, tetap kebiasannya untuk memakai masker, mencuci tangan dan selalu menjaga jarak. Vaksinasi juga masih terus kami lakukan. Baik vaksin 1 dan 2, untuk jumlahnya saat ini mencapai sekitar 60 persen,"ungkapnya. (*)



Anggota Satgas Covid-19 tengah bebenah di Bilet sebagai tempat Isolasi mandiri yang baru.



Satgas Covid-19 bersama relawan tengah membongkar peralatan



Tenda di wisma Trans Hotel dibongkar oleh Satgas Covid-19



Satgas Covid-19 tengah memasang tenda di Jalan Billet kompek PT KS sebagai tempat isolasi mandiri yang baru



Pengasapan oleh relawan mengetuk langit bersama Satgas Covid-19.



Pengasapan di hotel Trans guna sterilisasi setelah dipakai sebagai tempat isolasi mandiri



Tim tengah memindahkan peralatan dari Trans Hotel ke Wisma isolasi Mandiri Jalan Billet komplek PT KS



Asda I Pemkot Cilegon Tatang Mufthadi tengah koordinasi dengan Satgas Covid-19



Asda I Pemkot Cilegon tatang Mufthadi tengah meninjau tempat isolasi mandiri yang baru di Jalan Billet PT KS.



Walikota Cilegon Helldy Agustian sekaligus Ketua Satgas Penanganan Covid - 19 Kota Cilegon meninjau lokasi Wisma Isoman di Perumahan KS.

Siaga Penanganan Covid – 19 Dengan Wisma Isoman Perumahan KS

Wujudkan Akselerasi Penanganan Covid - 19

SATUAN Gugus Tugas (Satgas) Penanganan Covid – 19 Kota Cilegon terus melakukan kewaspadaan pengendalian Covid -19. Bahkan, Satgas Covid – 19 Kota Cilegon tetap menyiapkan wisma isolasi mandiri (Isoman) untuk warga, di Perumahan Krakatau Steel (KS), Kelurahan Kotabumi, Kecamatan Purwakarta.

Pelaksana tugas (Plt) Badan Penanggulangan bencana Daerah (BPBD) Kota Cilegon yang uga Sekretaris Satgas Penanganan Covid – 19 Kota Cilegon Juhadi M Syukur menyatakan, kendati sudah tidak lagi menyewa Trans Hotel untuk isoman warga. Namun, pihaknya tetap menyediakan 24 kamar di Perumahan Krakatau Steel (KS) guna mengantisipasi adanya gelombang ketiga Covid-19.



Plt. Kepala BPBD Cilegon sekaligus Sekretaris Gugus Covid-19, Juhadi M Syukur.

"Untuk mengantisipasi apabila ada pasien Covid-19, kami sudah menyiapkan tempat isolasi baru di Jalan Billet, Komplek Krakatau Steel. Kami tetap waspada dan bersiap jika ada gelombang selanjutnya," katanya, Kamis (30/9).

Untuk Trans Hotel, papar Juhadi, pihaknya sudah melakukan sterilisasi, sehingga dipastikan aman. Hal itu agar warga yang ingin menginap tidak lagi khawatir, dan perekonomian, khususnya bidang perhotelan tetap berjalan.

"Iya, tidak akan diperpanjang, dan kontrak kerjasama berakhir pada 30 September ini. Tim sudah melakukan pembongkaran dan juga melakukan pengasapan bersama relawan agar Trans Hotel tersebut bisa segera ditempati oleh wisatawan yang ingin menginap," ujarnya.

Satgas Covid-19, papar Juhadi, seperti biasa tetap berjalan, dan masih terus melakukan pengawasan. Pihaknya akan tetap memantau kondisi Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), yang masih berlaku terus berjalan maksimal. "Harapan kami, tidak ada lonjakan pasien Covid-19. Bahkan Kota Cilegon bisa meningkat ke zona hijau. Pelan-pelan ya, semuanya berangsur, tapi tetap sesuai dengan instruksi Mendagri di PPKM, protokol kesehatan tetap dijalankan, seperti memakai masker, menghindari kerumunan dan menjaga jarak," tuturnya.

Sementara itu, Walikota Cilegon Helldy Agustian ketika dikonfirmasi mengatakan, pihaknya bersyukur Kota Cilegon sudah memasuki zona kuning dan level 3. Namun begitu, kata dia, pihaknya akan tetap fokus untuk melakukan penanganan Covid-19 sampai Kota Cilegon menjadi zona hijau.

"Dalam menangani Covid-19 di Kota Cilegon, kami sudah buat tim kecil sampai dengan tingkat kelurahan, RW dan juga RT dilibatkan. Hal itu kami lakukan sebagai salah satu upaya guna mewujudkan Cilegon sehat. Dan, syukur alhamdulillah tiap hari warga yang terpapar terus menurun,"ucapnya.

Helldy menambahkan, pihaknya bersama Satgas Covid-19 juga unsur Forkopimda tidak henti-hentinya menyampaikan imbauan, agar tidak terjadi adanya gelombang ketiga dalam penanganan Pandemi Covid-19.

"Masyarakat jangan terlena dengan kondisi sekarang, tetap kebiasaan untuk memakai masker, mencuci tangan dan selalu menjaga jarak. Vaksinasi juga masih terus kami lakukan, baik vaksin pertama dan kedua, untuk jumlahnya saat ini mencapai sekitar 60 persen," ungkapnya. **(Lensa Event BPBD Kota Cilegon)**





Petugas dan relawan melakukan pengasapan di Trans Hotel dalam rangka sterilisasi.



Asda I Pemkot Cilegon Tatang Mufthadi meninjau tempat isolasi mandiri di Perumahan KS, di Jalan Billet.



Anggota Satgas Covid-19 tengah merapikan tempat isolasi di Perumahan KS sebagai tempat Isolasi mandiri yang baru.



Walikota Cilegon Helldy Agustian yang juga Ketua Satgas Penanganan Covid - 19 Kota Cilegon meninjau lokasi Wisma Isoman di Perumahan KS.



Asda I Pemkot Cilegon Tatang Mufthadi berbincang dengan Satgas Covid-19.



Petugas dan relawan Covid-19 membongkar tenda di Trans Hotel.



Tim Satgas memindahkan peralatan dari Trans Hotel ke Wisma isolasi Mandiri Jalan Billet Komplek PT KS.



Petugas Satgas Covid-19 tengah memasang tenda di Jalan Billet Kompek PT KS sebagai tempat isolasi mandiri yang baru.



Petugas Satgas Covid-19 bersama relawan membongkar tenda.

MENGHADAPI BENCANA KEGAGALAN TEKNOLOGI

Kegagalan Teknologi adalah semua kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi dan/atau industri.

PENYEBAB TERJADINYA KEGAGALAN TEKNOLOGI:

1. Kebakaran
2. Kegagalan/kesalahan desain keselamatan pabrik/teknologi
3. Kesalahan prosedur pengoperasian pabrik/teknologi
4. Kerusakan komponen
5. Kebocoran reaktor nuklir
6. Kecelakaan transportasi (darat, laut, udara)
7. Sabotase atau pembakaran akibat kerusuhan
8. Dampak ikutan dari bencana alam (gempa bumi, banjir dan sebagainya)

GEJALA DAN PERINGATAN DINI:

1. Kejadian sangat cepat (dalam hitungan detik atau jam) dan secara tiba-tiba.
2. Pelepasan bahan-bahan pencemar yang berbahaya pada umumnya tidak terlalu cepat sehingga memungkinkan untuk memberikan peringatan dan evakuasi pekerja dan masyarakat sekitarnya.
3. Ledakan pabrik dalam beberapa kasus dapat diantisipasi.
4. Desain pabrik/industri harus dilengkapi dengan sistem monitoring dan sistem peringatan dini.





DAMPAK DARI KEGAGALAN TEKNOLOGI:

1. Dapat menyebabkan pencemaran (udara, air dan tanah)
2. Korban jiwa
3. Kerusakan bangunan dan kerusakan lainnya
4. Bencana Kegagalan Teknologi pada skala besar dapat mengancam kestabilan ekologi secara global

TIPS MENGHADAPI BENCANA KEGAGALAN TEKNOLOGI:

1. Dengarkan tanda bahaya (sirine/kentongan, dll)
2. Jangan panik
3. Apabila memungkinkan, segera lakukan hal-hal sebagai berikut:
   a) Matikan kompor dan peralatan listrik
   b) Bawa dokumen penting dan barang seperlunya
   c) Kunci dan tinggalkan rumah
4. Segera menuju ruang terbuka (keluar rumah) dan perhatikan arah angin
5. Periksa jumlah anggota keluarga
6. Jauhi sumber bencana dan jangan lari searah dengan arah angin
7. Gunakan kain basah untuk melindungi hidung dan mulut jika mencium bau
8. Apabila anda berada di dalam kendaraan segera menepi dan jauhi sumber bahaya/bencana
9. Dengarkan informasi dari pemerintah melalui satgas mengenai situasi dan kondisi terbaru
10. Segera jauhi sumber bahaya dan menuju ke tempat yang aman, seraya melakukan hal-hal berikut:
    a) Jangan sekali-kali berbalik arah
    b) Bantu masyarakat (anak-anak, ibu hamil, orang sakit, dan lanjut usia) dan bergerak ke tempat yang aman
11. Di lokasi aman segera laporkan keberadaan anggota keluarga ke satgas
12. Setelah mendapat informasi aman dari pemerintah kembali ke rumah masing-masing



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA CILEGON

Jl. Teuku Cikditiro No. 164 Kel. Sukmajaya Kec. Jombang - Kota Cilegon
Telp/Fax. (0254) 7870720

PUSDALOPS-PB Kota Cilegon
Telp. (0254) 7870720

WASPADA TERHADAP BENCANA KEGAGALAN TEKNOLOGI



NAMA-NAMA PERUSAHAAN KIMIA DI KOTA CILEGON

ZONA MERAK

1. PT. Amoco Mitsuipta
2. PT. Unggul Indah Cahaya
3. PT. Statomer
4. PT. Tridomain
5. PT. Titan Petrokimia
6. PT. Mitsubishi Chemical Industri
7. PT. Bumi Merak Terminalindo
8. PT. Indonesia Power
9. PT. Pertamina Unit III Tanjung Gerem
10. PT. MC Pet Film Indonesia
11. PT. Vopak
12. PT. Oil Tangking
13. PT. Castrol
14. PT. Pertamina (Persero) Depot LPG

ZONA KIEC

1. PT. Dystar Colour Indonesia
2. PT. Clariant
3. PT. Rohm and Haas
4. PT. Seamless Pipe Indonesia Jaya
5. PT. NX Indonesia
6. PT. Latinusa
7. PT. Dresser Rand
8. PT. Krakatau Wajatama
9. PT. Krakatau Daya Listrik
10. PT. Timah Industri
11. PT. Krakatau Steel
12. PT. Communication Cable
13. PT. Air Liquid Indonesia
14. PT. Cabot
15. PT. Chetham Garam Indonesia
16. PT. Multi Fabrindo Gemilang
17. PT. Krakatau Posco
18. PT. Posco Mtech Indonesia
19. PT. Stollberg Samil Indonesia
20. PT. KHI Pipe Industries

ZONA CIWANDAN

1. PT. Tripolyta Indonesia
2. PT. Asahimas Chemical
3. PT. Lautan Otsuka Chemical
4. PT. Chandra Asri Chemical
5. PT. Bayer Material Science
6. PT. Nippon Shokubai Indonesia
7. PT. Dong Jin Indonesia
8. PT. Jawa Manis Rafinasi
9. PT. Sentra Usahatama Jaya
10. PT. Permata Dunia Sukses Utama
11. PT. Redwood Indonesia
12. PT. Korindo Heavy Industries
13. PT. Taruna Bina Sarana
14. PT. Pundi Kencana
15. PT. Krakatau Bandar Samudera
16. PT. Petrokimia Butadiene Indonesia

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA CILEGON

Jl. Teuku Cikditiro No. 164 Kel. Sukmajaya Kec. Jombang - Kota Cilegon
Telp/Fax. (0254) 7870720

PUSDALOPS-PB Kota Cilegon
Telp. (0254) 7870720

LOKASI DAERAH EVAKUASI

1. Lokasi Evakuasi I dipusatkan di SD Kampung Baru Kab. Serang, jalur evakuasi melalui akses jalur Jl. Cilodan/Sriwi Kec. Ciwandan yang melewati perbatasan antara Kota Cilegon - Kab. Serang berjarak ± 2 Km dari jalur Jalan Utama/Jalan Nasional;
2. Lokasi Evakuasi II dipusatkan di Kampung Kopo Kidul, jalur evakuasi melalui akses jalur Jl. Kawasan Pancapuri dan Akses Jalur Jl. Ciromo-Kopolendeuh (Jl. Sunan Demak) berjarak ± 2 Km dari jalur Jalan Utama/Jalan Nasional;
3. Lokasi Evakuasi III dipusatkan di Kantor Kelurahan/MTs Randakari, jalur evakuasi melalui akses jalur Jl. Randakari (Sukasari-Sasak Asem) dan Akses Jalur Jl. Kp. Warung Kara-Umbul Burak berjarak ± 1,2 Km dari jalur Jalan Utama/Jalan Nasional;
4. Lokasi Evakuasi IV dipusatkan di Ko. Karang Jetak Lor (Kubang Sari), jalur evakuasi melalui akses jalur Jl. Mudakir (Meluar-Warung Juwet-Buah Kopek-Panauwan-Ciriu) dan akses jalan lain menuju lokasi berjarak ± 2 Km dari jalur Jalan Utama/Jalan Nasional;
5. Lokasi Evakuasi V dipusatkan di SD Warikukun (Lebak Denok), jalur evakuasi melalui akses jalur Jl. Ir. Sutami (Krenceng-Batukuda), Jl. H. Agus Salim, Jl. Kp. Leuweung Sawo, Delingseng, Kepuh Denok menuju lokasi berjarak ± 3 Km dari jalur Jalan Utama/Jalan Nasional;
6. Lokasi Evakuasi VI dipusatkan di SD Lebak Gebang (Bagendung) Kec. Cilegon, jalur evakuasi melalui akses Jl. Temu Putih, Ciwedus, arah TPA Bagendung menuju lokasi berjarak ± 4 Km dari jalur Jalan Utama/Jalan Nasional;
7. Lokasi Evakuasi VII dipusatkan di TPU Cikerai Kec. Cibeber, jalur evakuasi melalui akses jalur Jl. Tb. Ismail, Jl. Pagebangan, arah TPA Bagendung menuju lokasi berjarak ± 4 Km dari jalur Jalan Utama/Jalan Nasional;
8. Lokasi Evakuasi VIII dipusatkan di Kab. Serang (Waringin Kurung), jalur evakuasi melalui akses jalur Jalan Serdang Kab. Serang;
9. Lokasi Evakuasi IX dipusatkan di SD Pecinaan (Tegal Bunder), jalur evakuasi melalui akses jalur Jl. Sumampir, Kebondalem, Purwakarta, Pabean menuju lokasi berjarak ± 3 Km;
10. Lokasi Evakuasi X dipusatkan di SD Gerem 3 Kec. Grogol, jalur evakuasi melalui akses utama (Jl. H. Leman) berjarak ± 1,2 Km;
11. Lokasi Evakuasi XI dipusatkan di Lapangan Terbuka, jalur evakuasi melalui akses Jl. Statomer-Cikuasa berjarak ± 1,2 Km;
12. Lokasi Evakuasi XII dipusatkan di Daerah Terbuka, jalur evakuasi melalui akses Jl. Puskesmas Merak, Jl. Pasar Baru Merak, Jl. Merdeka, dan Jl. Langon 2 menuju ke lokasi berjarak ± 1,6 Km;
13. Lokasi Evakuasi XIII dipusatkan di Lapangan Terbuka, jalur evakuasi melalui akses Jl. Kp. Cipala menuju ke lokasi berjarak ± 1,2 Km;
14. Lokasi Evakuasi XIV dipusatkan di SD Pulorida (Lebak Gede), jalur evakuasi melalui akses Jl. Kp. Temposo menuju lokasi berjarak ± 0,8 Km;
15. Lokasi Evakuasi XV dipusatkan di Lapangan Terbuka (Kel. Suralaya), jalur evakuasi melalui akses Jl. Ki Kahal menuju lokasi berjarak ± 2,1 Km.

PETA EVAKUASI



NOMOR TELEPON PENTING

BPBD Kota Cilegon	0254 - 7870720	Puskesmas Cilegon	0254 - 393115
Pusdalops-PB Cilegon	0254 - 7870720	Puskesmas Jombang	0254 - 376265
Kodim 0623 Cilegon	0254 - 391386	Puskesmas Cibeber	0254 - 399193
	0254 - 392380	Puskesmas Cilangkil	0254 - 311336
Polres Cilegon	0254 - 395936	Puskesmas Purwakarta	0254 - 330362
Polsek Ciwandan	0254 - 312422	Puskesmas Grogol	0254 - 572418
Polsek Cilegon	0254 - 391004	Puskesmas Ciwandan	0254 - 601469
Polsek Pulomerak	0254 - 571210	Puskesmas Pulomerak	0254 - 571154
Polsek Cibeber	0254 - 399960	Pemkot Cilegon	0254 - 380577
KPPP Merak	0254 - 571002	DLHPE Cilegon	0254 - 389320
Damkar Pemkot Cilegon	0254 - 377113	Kesbang Linmas	0254 - 376273
Damkar PTKS	0254 - 372999	Kecamatan Cilegon	0254 - 391912
PMI Cilegon	0254 - 394617	Kecamatan Jombang	0254 - 376373
RS Krakatau Medika	0254 - 398846	Kecamatan Cibeber	0254 - 385869
	0254 - 396333	Kecamatan Cilangkil	0254 - 312664
	0254 - 372100	Kecamatan Purwakarta	0254 - 330393
RSUD Kota Cilegon	0254 - 330461	Kecamatan Grogol	0254 - 571225
BLH Kota Cilegon	0254 - 380577 Ext. 317	Kecamatan Ciwandan	0254 - 601611
		Kecamatan Pulomerak	0254 - 574362

SEBELUM TERJADI GEMPA BUMI

1. Kenali lingkungan tempat anda bekerja dan tinggal.
2. Perhatikan letak pintu, lift, serta tangga darurat, tujuannya apabila terjadi gempa bumi sudah mengetahui tempat paling aman untuk berlindung.
3. Belajar melakukan P3K.
4. Belajar menggunakan pemadam kebakaran.
5. Mencatat nomor telepon penting yang dapat dihubungi pada saat menghadapi gempa bumi.
6. Perabotan (Lemari, Filing Cabinet, dll) diatur menempel pada dinding (dipaku, diikat, dll) untuk menghindari jatuh, roboh, bergeser pada saat terjadi gempa bumi.
7. Menyimpan bahan yang mudah terbakar pada tempat yang tidak mudah pecah agar terhindar dari kebakaran.
8. Selalu mematikan air, gas, dan listrik, apabila sedang tidak digunakan.
9. Apabila membangun rumah disarankan mengikuti ketentuan teknis dalam membangun rumah.

SAAT TERJADI GEMPA BUMI

1. Jangan panik.
2. Segera keluar apabila masih dapat dilakukan.
3. Jika anda berada dalam bangunan:
   - 3.1. Cari perlindungan dekat dasar dinding sambil lindungi kepala dengan tangan.
   - 3.2. Jangan berlindung dekat jendela atau benda yang mengandung kaca, cermin, lemari.
   - 3.3. Apabila memungkinkan matikan kompor, listrik dan jangan menggunakan lift.
4. Jika berada di luar bangunan atau area terbuka, hindari bangunan yang ada di sekitar anda termasuk tiang listrik, pagar, pohon, dll, jangan masuk ke dalam bangunan.
5. Perhatikan tempat anda berpijak, hindari apabila terjadi rekahan tanah.
6. Bila sedang mengemudi maka berhenti dan tetap berada di dalam mobil, jauhi jembatan, tiang listrik, pohon besar.
7. Jika anda tinggal di daerah pantai, jauhi pantai untuk menghindari Tsunami.
8. Jika anda tinggal di daerah pegunungan, apabila terjadi gempa bumi hindari daerah yang mungkin terjadi longsoran.

SESUDAH TERJADI GEMPA BUMI

1. Jika anda masih berada dalam bangunan, maka keluar dari bangunan tersebut dengan hati-hati.
2. Jangan menggunakan tangga berjalan atau lift, gunakan tangga biasa.
3. Periksa apa ada yang terluka, lakukan P3K.
4. Teleponi/minta pertolongan apabila terjadi luka parah pada anda atau sekitar anda.
5. Jangan masuk bangunan yang sudah terjadi gempa, kemungkinan masih terdapat retuntuhan.
6. Jangan berjalan di sekitar gempa, kemungkinan terjadi bahaya susulan masih ada.
7. Mendengarkan informasi mengenai gempa dari radio (apabila terjadi gempa susulan).
8. Melaporkan kondisi keluarga, harta dan rumah serta kebutuhan makanan/minuman pada petugas di lapangan.
9. Bergotong royong mendirikan tenda untuk perawatan kesehatan dan tempat tinggal darurat.



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA CILEGON

Jl. Teuku Cikditiro No. 164 Kel. Sukmajaya Kec. Jombang - Kota Cilegon
Telp/Fax. (0254) 7870720

PUSDALOPS-PB Kota Cilegon
Telp. (0254) 7870720

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA CILEGON

Jl. Teuku Cikditiro No. 164 Kel. Sukmajaya Kec. Jombang - Kota Cilegon
Telp/Fax. (0254) 7870720

PUSDALOPS-PB Kota Cilegon
Telp. (0254) 7870720

WASPADA TERHADAP BENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI





MENGHADAPI TSUNAMI

1. Diawal terjadinya Guncangan/Gempa besar di atas 6,5 SR.
2. Diikuti dengan penyusutan air laut secara tiba-tiba.
3. Dengarkan informasi atau pengumuman Pemerintah melalui satgas dan bunyi sirene, bel, kentongan, dll.
4. Segera lakukan evakuasi diri anda:
   - 4.1. Jika berada di darat (di dalam bangunan, bibir pantai) segera keluar dan lari menuju tempat yang tinggi minimal >20 M di atas permukaan laut dan lihat peta.
   - 4.2. Jika sedang berada di laut (dalam perahu atau kapal laut), segera menjauhi pantai ke arah tengah laut.
5. Bantu masyarakat (anak-anak, ibu hamil, orang sakit, dan lanjut usia) bergerak ke tempat evakuasi (lihat peta lokasi evakuasi).
6. Tetap tenang di lokasi evakuasi dan tunggu informasi lanjutan dari BPBD Kota Cilegon.





LOKASI DAERAH EVAKUASI

1. Lokasi Evakuasi I dipusatkan di SD Kampung Baru Kab. Serang, jalur evakuasi melalui akses jalur Jl. Cilodan/Sriwi Kec. Ciwandan yang melewati perbatasan antara Kota Cilegon - Kab. Serang berjarak ± 2 Km dari jalur Jalan Utama/Jalan Nasional;
2. Lokasi Evakuasi II dipusatkan di Kampung Kopo Kidul, jalur evakuasi melalui akses jalur Jl. Kawasan Pancapuri dan Akses Jalur Jl. Ciromo-Kopolandeuh (Jl. Sunan Demak) berjarak ± 2 Km dari jalur Jalan Utama/Jalan Nasional;
3. Lokasi Evakuasi III dipusatkan di Kantor Kelurahan/MTs Randakari, jalur evakuasi melalui akses jalur Jl. Randakari (Sukasari-Sasak Asem) dan Akses Jalur Jl. Kp. Warung Kara-Umbul Burak berjarak ± 1,2 Km dari jalur Jalan Utama/Jalan Nasional;
4. Lokasi Evakuasi IV dipusatkan di Kp. Karang Jetak Lor (Kubang Sari), jalur evakuasi melalui akses jalur Jl. Mudakir (Meluar-Warung Juwet-Buah Kopek-Panauwan-Ciriu) dan akses jalan lain menuju lokasi berjarak ± 2 Km dari jalur Jalan Utama/Jalan Nasional;
5. Lokasi Evakuasi V dipusatkan di SD Walikukun (Lebak Denok), jalur evakuasi melalui akses jalur Jl. Ir. Sutami (Krenceng-Batukuda), Jl. H. Agus Salim, Jl. Kp. Leuweung Sawo, Delingseng, Kepuh Denok menuju lokasi berjarak ± 3 Km dari jalur Jalan Utama/Jalan Nasional;
6. Lokasi Evakuasi VI dipusatkan di SD Lebak Gebang (Bagendung) Kec. Cilegon, jalur evakuasi melalui akses Jl. Temu Putih, Ciwedus, arah TPA Bagendung menuju lokasi berjarak ± 4 Km dari jalur Jalan Utama/Jalan Nasional;
7. Lokasi Evakuasi VII dipusatkan di TPU Cikerai Kec. Cibeber, jalur evakuasi melalui akses jalur Jl. Tb. Ismail, Jl. Pagebangan, arah TPA Bagendung menuju lokasi berjarak ± 4 Km dari jalur Jalan Utama/Jalan Nasional;
8. Lokasi Evakuasi VIII dipusatkan di Kab. Serang (Waringin Kurung), jalur evakuasi melalui akses jalur Jalan Serdang Kab. Serang;
9. Lokasi Evakuasi IX dipusatkan di SD Pecinaan (Tegal Bunder), jalur evakuasi melalui akses jalur Jl. Sumampir, Kebondalem, Purwakarta, Pabean menuju lokasi berjarak ± 3 Km;
10. Lokasi Evakuasi X dipusatkan di SD Gerem 3 Kec. Grogol, jalur evakuasi melalui akses utama (Jl. H. Leman) berjarak ± 1,2 Km;
11. Lokasi Evakuasi XI dipusatkan di Lapangan Terbuka, jalur evakuasi melalui akses Jl. Statomer-Cikuasa berjarak ± 1,2 Km;
12. Lokasi Evakuasi XII dipusatkan di Daerah Terbuka, jalur evakuasi melalui akses Jl. Puskesmas Merak, Jl. Pasar Baru Merak, Jl. Merdeka, dan Jl. Langon 2 menuju ke lokasi berjarak ± 1,6 Km;
13. Lokasi Evakuasi XIII dipusatkan di Lapangan Terbuka, jalur evakuasi melalui akses Jl. Kp. Cipala menuju ke lokasi berjarak ± 1,2 Km;
14. Lokasi Evakuasi XIV dipusatkan di SD Pulonda (Lebak Gede), jalur evakuasi melalui akses Jl. Kp. Temposo menuju lokasi berjarak ± 0,8 Km;
15. Lokasi Evakuasi XV dipusatkan di Lapangan Terbuka (Kel. Suralaya), jalur evakuasi melalui akses Jl. Ki Kahal menuju lokasi berjarak ± 2,1 Km.

PETA EVAKUASI



NOMOR TELEPON PENTING

BPBD Kota Cilegon	: 0254 - 7870720	Puskesmas Cilegon	: 0254 - 393115
Pusdalops-PB Cilegon	: 0254 - 7870720	Puskesmas Jombang	: 0254 - 376255
Kodim 0623 Cilegon	: 0254 - 391386	Puskesmas Cibeber	: 0254 - 399193
	0254 - 392380	Puskesmas Citangkil	: 0254 - 311336
Polres Cilegon	: 0254 - 395936	Puskesmas Purwakarta	: 0254 - 330382
Polsek Ciwandan	: 0254 - 312422	Puskesmas Grogol	: 0254 - 572418
Polsek Cilegon	: 0254 - 381004	Puskesmas Ciwandan	: 0254 - 601486
Polsek Pulomerak	: 0254 - 571210	Puskesmas Pulomerak	: 0254 - 571154
Polsek Cibeber	: 0254 - 399480	Pemkot Cilegon	: 0254 - 380577
KPPP Merak	: 0254 - 571002	DLHPE Cilegon	: 0254 - 389320
Damkar Pemkot Cilegon	: 0254 - 577113	Kesbang Linmas	: 0254 - 376273
Damkar PTKS	: 0254 - 372999	Kecamatan Cilegon	: 0254 - 391912
PMI Cilegon	: 0254 - 394817	Kecamatan Jombang	: 0254 - 378373
RS Krakatau Medika	: 0254 - 398848	Kecamatan Cibeber	: 0254 - 385869
	0254 - 396333	Kecamatan Citangkil	: 0254 - 312584
	0254 - 372100	Kecamatan Purwakarta	: 0254 - 330393
RSUD Kota Cilegon	: 0254 - 330461	Kecamatan Grogol	: 0254 - 571225
BLH Kota Cilegon	: 0254 - 380577 Ext. 317	Kecamatan Ciwandan	: 0254 - 601611
		Kecamatan Pulomerak	: 0254 - 574362

DOKUMENTASI KEGIATAN SOSIALISASI EDUKASI RAWAN BENCANA DIKELURAHAN TEGAL RATU









DOKUMENTASI KEGIATAN APEL SIAGA BENCANA TAHUN 2021



DOKUMENTASI KEGIATAN (FGD-FPRB)









DOKUMENTASI KEGIATAN PAM NATAL DAN TAHUN BARU TAHUN 2021









DOKUMENTASI KEGIATAN PELATIHAN PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA KOTA CILEGON

TAHUN 2021









DOKUMENTASI KEGIATAN PENGAMANAN ARUS MUDIK

TAHUN 2021



DOKUMENTASI KEGIATAN SOSIALISASI EDUKASI RAWAN BENCANA DI KELURAHAN KUBANG SARI









DOKUMENTASI KEGIATAN PENANGANAN PASCA BENCANA KOTA
(Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana berupa rapat/Sosialisasi dan Survey data kerusakan)







DOKUMENTASI KEGIATAN PENANGANAN PASCA BENCANA KOTA
(Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana berupa rapat/Sosialisasi dan Survey data kerusakan)







DOKUMENTASI KEGIATAN PENANGANAN PASCA BENCANA KOTA
(Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana berupa rapat/Sosialisasi dan Survey data kerusakan)





FOTO KEJADIAN
ANGIN PUTING BELIUNG (POHON TUMBANG)







FOTO KEJADIAN
BANJIR







KEBAKARAN LAHAN







FOTO KEJADIAN
LONGSOR RUMAH ROBOH / LONGSOR TEBING







DOKUMENTASI LOGISTIK









ISOLASI MANDIRI (TRANS HOTEL)







TEMPAT ISOLASI MANDIRI (WISMA BILLET)







KEGIATAN KESEKRETARIATAN SATGAS PENANGANAN COVID 19





KEGIATAN KESEKRETARIATAN SATGAS PENANGANAN COVID 19



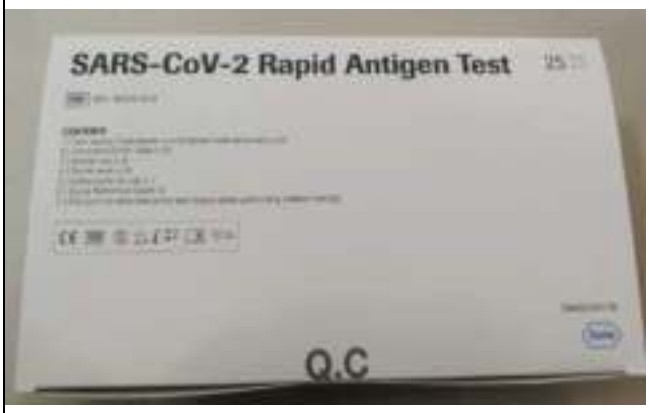


KEGIATAN KESEKRETARIATAN SATGAS PENANGANAN COVID 19





BARANG BANTUAN DARI DONATUR

NO	NAMA PERUSAHAAN	NAMA BARANG	FOTO BARANG
1,	PT Mitsubishi Chemical Indonesia	Rapid Rest Antigen	
2,	PT Chandra Asri Petrochemical	Masker Medis	
3.	PT Nippon Shukubai Indonesia	Masker Medis	
4.	PT Krakatau Posco	Masker Medis KN95	

5.	PT Asahimas Chemical	Handglove	

NO	NAMA PERUSAHAAN	NAMA BARANG	FOTO BARANG
6.	PT Nippon Shukubai Indonesia	Handglove	
7.	PT Krakatau Posco	Handglove	
8.	PT Krakatau industrial Estate Cilegon	Masker Medis	

9.	PT Rohm And Haas Indonesia	Masker Medis	
10	PT Indonesia Power Suralaya PGU	Masker Medis	
			